



**UNIVERSITAS PERTAHANAN**

**STRATEGI LANTAMAL II PADANG DALAM  
MENGAMANKAN OBYEK VITAL NASIONAL  
DI WILAYAH PERAIRAN SELATAN SUMATERA BARAT,  
(STUDI KASUS PELABUHAN TELUK BAYUR)**

**TESIS**

**PRIMA TEGAR ANUGRAH  
NIM : 120170302012**

**FAKULTAS KEAMANAN NASIONAL  
PROGRAM STUDI KEAMANAN MARITIM**

**BOGOR  
JANUARI 2019**



**UNIVERSITAS PERTAHANAN**

**STRATEGI LANTAMAL II PADANG DALAM  
MENGAMANKAN OBYEK VITAL NASIONAL  
DI WILAYAH PERAIRAN SELATAN SUMATERA BARAT,  
(STUDI KASUS PELABUHAN TELUK BAYUR)**

**TESIS**

**PRIMA TEGAR ANUGRAH  
NIM : 120170302012**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
gelar Magister dalam bidang Ilmu Pertahanan

**FAKULTAS KEAMANAN NASIONAL  
PROGRAM STUDI KEAMANAN MARITIM**

**BOGOR  
JANUARI 2019**

## **PERNYATAAN ORISINALITAS**

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya atau bagian karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan jenjang apapun di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat istilah, rasa, kalimat, paragraf, subbab atau bab dari karya yang pernah ditulis atau diterbitkan, kecuali yang secara tertulis diajukan dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Referensi.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa terdapat plagiat dalam tesis ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan/undang – undang yang berlaku.

Bogor, Januari 2019

Prima Tegar Anugrah

## LEMBAR PERSETUJUAN

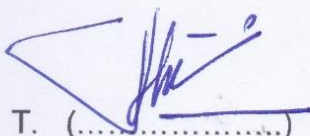
Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Prima Tegar Anugrah  
NIM : 120170302012  
Program Studi : Keamanan Maritim  
Judul Penelitian : Strategi Lantamal II Padang Dalam Mengamankan  
Obyek Vital Nasional Di Wilayah Perairan Selatan  
Sumatera Barat, Studi Kasus Pelabuhan Teluk Bayur

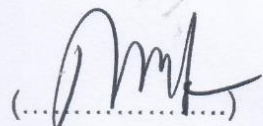
Tesis dengan judul dan atas nama mahasiswa tersebut di atas telah disetujui untuk dapat diujikan, sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar Magister dalam bidang Ilmu Pertahanan pada Program Studi Keamanan Maritim, Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan.

### DOSEN PEMBIMBING

Pembimbing 1 :

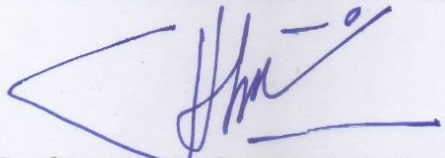
Laksda TNI Dr. Siswo Hadi Sumantri, S. T., M. M. T.  (.....)

Pembimbing 2 :

Kolonel Laut (KH) Dr. Panji Suwarno, S. E., M. Si.  (.....)

Bogor,

Dekan Fakultas Keamanan Nasional

  
Dr. Siswo Hadi Sumantri, S. T., M. MT.  
Laksamana Muda TNI

## LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Prima Tegar Anugrah  
NIM : 120170302012  
Program Studi : Keamanan Maritim  
Judul Penelitian : Strategi Lantamal II Padang Dalam Mengamankan  
Obyek Vital Nasional Di Wilayah Perairan Selatan  
Sumatera Barat, Studi Kasus Pelabuhan Teluk Bayur

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Pertahanan pada Program Studi Keamanan Maritim, Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan.

### REVIEWER

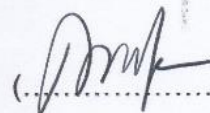
Pembimbing 1 :

Laksda TNI Dr. Siswo Hadi Sumantri, S. T., M. MT.

  
(.....)

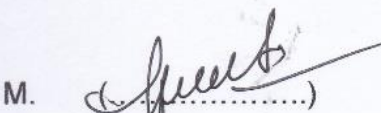
Pembimbing 2 :

Kolonel Laut (KH) Dr. Panji Suwarno, S. E., M. Si.

  
(.....)

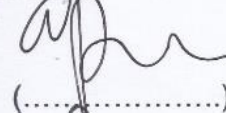
Penguji 1 :

Laksda TNI (Purn.) Ir. Budiman Djoko Said, M. M.

  
(.....)

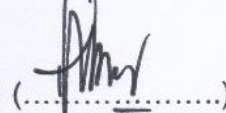
Penguji 2 :

Kolonel Laut (KH) Dr. Abdul Rivai Ras, M. M.

  
(.....)

Penguji 3 :

Kolonel Laut (P) Purwanto, S. E., M. M., M. Si. (Han.)

  
(.....)

Ditetapkan di : Bogor

Tanggal : Januari 2019

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH  
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Prima Tegar Anugrah

NIM : 120170302012

Program Studi : Keamanan Maritim

Fakultas : Keamanan Nasional

Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pertahanan Hak Bebas *Royalty Noneksklusif (Non exclusive Royalty – Free Right)* atas karya ilmiah saya yang berjudul :

STRATEGI LANTAMAL II PADANG DALAM MENGAMANKAN OBYEK  
VITAL NASIONAL DI WILAYAH PERAIRAN SELATAN SUMATERA  
BARAT, STUDI KASUS PELABUHAN TELUK BAYUR

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas *Royalty Noneksklusif* ini Universitas Pertahanan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta/Karya Intelektual dari tesis ini.

Demikian pernyataan saya buat dengan kesadaran penuh tanpa paksaan dari pihak manapun.

Bogor, Januari 2019

Prima Tegar Anugrah

## KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia – Nya penyusunan Tesis dengan judul “Strategi Lantamal II Padang Dalam Mengamankan Obyek Vital Nasional Di Wilayah Perairan Selatan Sumatera Barat, Studi Kasus Pelabuhan Teluk Bayur” dapat diselesaikan.

Penyusunan tesis ini ditujukan sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Magister pada Program Studi Keamanan Maritim, Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan.

Penyusunan tesis ini dapat diselesaikan berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu, pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada :

1. Letjen TNI Dr. Tri Legiono Suko, S. I. P., M. A. P. selaku Rektor Universitas Pertahanan.
2. Laksda TNI Dr. Siswo Hadi Sumantri, S. T., M. MT. selaku Dekan Fakultas Keamanan Nasional sekaligus Dosen Pembimbing 1, dan Kolonel Laut (KH) Dr. Panji Suwarno, S. E., M. Si. selaku pembimbing II atas kesabarannya selama ini dan telah memberi arahan kepada peneliti sehingga Tesis ini dapat terselesaikan.
3. Dewan penguji yang telah memberikan kritik dan saran dalam penyempurnaan Tesis ini.

4. Kolonel Laut (P) Purwanto, S. E., M. M., M. Si. (Han.) selaku Sekretaris Program Studi Keamanan Maritim dan seluruh dosen, staf dan mahasiswa pada Program Studi Keamanan Maritim dan Universitas Pertahanan yang telah membantu kelancaran perkuliahan.
5. Semua narasumber dan pihak – pihak yang telah banyak membantu peneliti selama proses pengumpulan data dan penulisan tesis ini. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk berdiskusi, dan telah berkenan membagi ilmu dengan peneliti sehingga karya ilmiah ini terselesaikan.
6. Seluruh keluarga tercinta, terutama Papa Gusmartin, S. E. dan Mama Dra. Nilmeli yang senantiasa mendoakan anaknya, juga buat Kakak Debby Rizqie Amelia Gustin, S. Ip., M. Si. (Han.) dan adik tersayang Ramadhana Fadhilla atas semangat dan motivasinya.
7. Seluruh sahabat peneliti yang namanya tidak dapat saya sebutkan satu – persatu karena keterbatasan tempat, namun bukan berarti terlupakan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas kebaikan – kebaikan berbagai pihak atas bantuannya.

Peneliti menyadari bahwa tesis ini masih kurang sempurna, oleh karena itu dengan kerendahan hati peneliti mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi menunjang kesempurnaan penelitian ini.

Bogor, Januari 2019

Peneliti

## ABSTRAK

### **Strategi Lantamal II Padang Dalam Mengamankan Obyek Vital Nasional Di Wilayah Perairan Selatan Sumatera Barat, Studi Kasus Pelabuhan Teluk Bayur**

**Prima Tegar Anugrah**

Indonesia mempunyai 4 *choke points* (selat sempit) perdagangan laut dunia. Posisi Indonesia berada di posisi silang dunia, di antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik yang mana hal ini membuat laut Indonesia menjadi sangat strategis. Pelabuhan Teluk Bayur merupakan ujung tombak dalam menentukan kesuksesan pengiriman barang dari daerah sekitar Sumatera Barat ke nusantara dan mancanegara. Pelabuhan ini merupakan gerbang perekonomian Indonesia bagian barat untuk tujuan ekspor ke India serta kawasan Timur Tengah. Oleh karena itu dibutuhkan pengelolaan dan pengamanan pelabuhan secara periodik dan berkala. Beberapa permasalahan yang terjadi di sekitar Pelabuhan Teluk Bayur yang dikelola oleh PT. Pelindo II, selain merupakan jalur pelayaran dan daerah tangkapan ikan adalah adanya ancaman pelayaran dan ancaman sumber daya di perairan wilayah kerja Lantamal II Padang. Penelitian ini berupaya menjawab bagaimana sesungguhnya strategi Lantamal II Padang dalam melaksanakan pengamanan obyek vital nasional dengan menganalisis kondisi nyata (*existing condition*) dan faktor – faktor yang mempengaruhi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain deskriptif yang diperkuat dengan studi kepustakaan dan analisis situasi yang diperoleh dari gambaran dan informasi kejadian. Hasil analisis diketahui bahwa pengamanan Obvitnas Pelabuhan Teluk Bayur di perairan Selatan Sumatera Barat oleh Lantamal II Padang masih belum optimal. Faktor penghambat berupa sumber daya manusia, kuantitas dan kualitas sarana patroli, dan keterbatasan anggaran pengamanan, sedangkan faktor pendukung adalah adanya payung hukum, dukungan dari *stakeholder*, dan budaya positif dari lingkungan masyarakat maritim. Rekomendasi optimalisasi pengamanan dengan metode : rekrutmen, pendidikan, latihan, penugasan, modernisasi, penelitian, dan pengembangan.

**Kata Kunci : Strategi, Lantamal II Padang, Pengamanan, Obyek Vital Nasional**

## ABSTRACT

### ***Strategy of Lantamal II Padang in Securing National Vital Object inside Southern Sea Areas of West Sumatera, Case Study Teluk Bayur Port.***

**Prima Tegar Anugrah**

*Indonesia has 4 choke points among world sea trade. Indonesia is in the cross position of the world, between the Indian and Pacific Oceans which makes the Indonesian sea becomes very strategic. Teluk Bayur Port is the spearhead in determining the success of goods delivery from the area around West Sumatra to the archipelago and abroad. This port is the gateway of the western Indonesian economy for export destinations to India and the Middle East region. Therefore, periodic management and security in the port is required. Some sets of security problem occurred around Teluk Bayur Port managed by PT. Pelindo II besides being a cruise line and fishing ground are shipping and resources threats. This research try to examine and reveal about the real condition on Strategy of Lantamal II Padang in securing national vital object through analyse on existing condition and the factors influence it. The research uses qualitative method and descriptive design which was endorsed by literature archive, observation, and also information of the incident. In result, the analysis have informed that Lantamal II Padang efforts of security on the national vital object was not working optimally. The inhibitor factors were human resources, both quantity and quality of patrolling equipments, and budgeting constrain. The advantage factors for instance were : regulations, and the stakeholder's support beside the positive culture of maritime society. Recommendation of optimalization on security such as : recruitment, education, training, assignment, revision, modernization, research, and development.*

**Keywords : Strategy, Lantamal II Padang, Security, National Vital Object.**

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PERSETUJUAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
LEMBAR PENGESAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	vii
ABSTRAK .....	ix
ABSTRACT .....	x
DAFTAR ISI .....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
DAFTAR TABEL .....	xv
DAFTAR SINGKATAN .....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Fokus dan Subfokus Penelitian .....	11
1.3. Rumusan Masalah.....	11
1.4. Tujuan Penelitian .....	12
1.5. Manfaat Penelitian .....	12
1.5.1. Manfaat Teoritis.....	12
1.5.2. Manfaat Praktis.....	12
BAB II KAJIAN TEORITIK.....	14
2.1. Deskripsi Konseptual .....	14
2.1.1. Teori Strategi Pertahanan Negara.....	14
2.1.2. Teori Trinitas AL .....	17
2.1.3. Teori Komponen Keamanan.....	18
2.1.4. Teori Logistik Pertahanan.....	21
2.1.5. Teori Ketahanan Nasional .....	22
2.1.6. Konsep Fokus Penelitian .....	22
2.2. Hasil Penelitian Terdahulu Yang Relevan .....	24
2.2.1. Analisis Pengaruh Motivasi Dan Kedisiplinan Terhadap Kinerja Prajurit TNI AL Di Lanal Dumai .....	24

2.2.2. Peran Lanal Dalam Pengamanan Obvitnas Di Kawasan Selatan Pulau Jawa (Studi Wilayah Kerja Lanal Cilacap) .....	25
2.2.3. Kemampuan Lantamal Sebagai Pangkalan Awal Dalam Mendukung Penanggulangan Bencana (Studi Lantamal III Jakarta) .....	26
2.2.4. Kemampuan Lanal Cirebon Dalam Pengamanan Obvitnas Di Wilayah Perairan Utara Jawa Barat .....	28
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>31</b>
3.1. Tempat Dan Waktu Penelitian .....	32
3.1.1. Tempat Penelitian.....	32
3.1.2. Waktu Penelitian.....	32
3.2. Subyek Dan Sampel Penelitian .....	33
3.2.1. Subyek Penelitian.....	33
3.2.2. Sampel Penelitian.....	33
3.3. Teknik Pengumpulan Data .....	34
3.3.1. Observasi .....	34
3.3.2. Studi Kepustakaan .....	35
3.3.3. Wawancara Mendalam.....	35
3.4. Pemeriksaan Keabsahan Data .....	35
3.5. Teknik Analisis Data .....	36
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>38</b>
4.1. Hasil Penelitian.....	38
4.1.1. Data Penelitian .....	38
4.1.1.1. Gambaran Umum Pelabuhan Teluk Bayur (Asset).....	39
4.1.1.2. Gambaran Umum Ancaman di Perairan Barat Pulau Sumatera ( <i>Threat</i> ) .....	40
4.1.1.3. Gambaran Lantamal II Padang ( <i>Protector</i> )....	44

4.1.1.4. Gambaran Pengamanan Pelabuhan Teluk Bayur yang dilaksanakan oleh Lantamal II Padang .....	52
4.1.2. Analisis Data.....	53
4.1.2.1. Strategi Intelijen .....	53
4.1.2.2. Strategi Pertahanan.....	56
4.1.2.3. Strategi Pengamanan .....	61
4.1.2.4. Strategi Dukungan .....	67
4.2. Pembahasan .....	70
4.2.1. Kondisi Nyata ( <i>Existing Condition</i> ) Strategi Lantamal II Padang Dalam Pengamanan Obvitnas ( <i>Strength</i> ).....	70
4.2.1.1. Aspek Strategi Intelijen .....	72
4.2.1.2. Aspek Strategi Pertahanan.....	76
4.2.1.3. Aspek Strategi Pengamanan .....	80
4.2.1.4. Aspek Strategi Dukungan .....	83
4.2.2. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Strategi Lantamal II Padang Dalam Pengamanan Obvitnas .....	85
4.2.2.1. Faktor Penghambat ( <i>Weakness</i> ) .....	89
4.2.2.2. Faktor Pendukung ( <i>Oppurtunity</i> ).....	94
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI .....	100
5.1. Kesimpulan.....	100
5.2. Rekomendasi.....	101
DAFTAR PUSTAKA.....	103
LAMPIRAN 1 PEDOMAN OBSERVASI.....	109
LAMPIRAN 2 PANDUAN WAWANCARA .....	110
LAMPIRAN 3 DOKUMENTASI .....	119
LAMPIRAN 4 DAFTAR NARASUMBER .....	121

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. <i>Choke Points</i> yang Ada di Indonesia .....	2
Gambar 2. Pelabuhan Teluk Bayur .....	9
Gambar 3. Trinitas Peran Kekuatan Laut.....	18
Gambar 4. Komponen – Komponen Keamanan .....	19
Gambar 5. Kerangka Pemikiran.....	23
Gambar 6. Peta Pelabuhan Teluk Bayur .....	39
Gambar 7. Gambaran Umum Ancaman .....	42
Gambar 8. Grafik <i>Security Incident</i> Pelabuhan Teluk Bayur .....	44
Gambar 9. Peta Wilayah Kerja dan Gelar Pos Lantamal II Padang.....	45
Gambar 10. Markas Komando (Mako) Lantamal II Padang.....	46
Gambar 11. Struktur Organisasi Lantamal II Padang .....	47

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Pelabuhan Strategis yang Dikelola oleh PT. Pelindo I .....	3
Tabel 2. Pelabuhan Strategis yang Dikelola oleh PT. Pelindo II .....	4
Tabel 3. Pelabuhan Strategis yang Dikelola oleh PT. Pelindo III .....	4
Tabel 4. Pelabuhan Strategis yang Dikelola oleh PT. Pelindo IV .....	5
Tabel 5. Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian ini.....	30
Tabel 6. Jadwal Penelitian .....	32
Tabel 7. Daftar Pemeriksaan Kapal oleh unsur Lantamal II.....	50
Tabel 8. Daftar Kunjungan unsur ke Lantamal II.....	50
Tabel 9. Sarana Patroli Lantamal II Padang .....	57
Tabel 10. Daftar Susunan Personel Lantamal II Padang .....	63

## DAFTAR SINGKATAN

<b>Singkatan :</b>	<b>Nama :</b>
AL	Angkatan Laut
Alutsista	Alat Utama Sistem Persenjataan
Asintel	Asisten Intelijen
Aslog	Asisten Logistik
Asops	Asisten Operasi
Aspers	Asisten Personel
Aspotmar	Asisten Potensi Maritim
Asrena	Asisten Perencana
AU	Angkatan Udara
BBM	Bahan Bakar Minyak
CPO	<i>Crude Palm Oil</i>
Dandenma	Komandan Detasemen Markas
Danlantamal	Komandan Lantamal
Disang	Dinas Angkutan
Disfaslan	Dinas Fasilitas Pangkalan
Disharkan	Dinas Pemeliharaan dan Perbaikan
Diskes	Dinas Kesehatan
Diskum	Dinas Hukum
Dismatbek	Dinas Material dan Perbekalan
Disminpers	Dinas Administrasi Personel
Dispen	Dinas Penerangan
Dispotmar	Dinas Potensi Maritim
Dissyahal	Dinas Kesyahbandaran AL
DLL	Dan Lain – Lain
DSP	Daftar Susunan Personel
ESDM	Energi dan Sumber Daya Mineral
Fasbek	Fasilitas Perbekalan
Fasharkan	Fasilitas Pemeliharaan dan Perbaikan

Faslabuh	Fasilitas Pelabuhan
Faswatpers	Fasilitas Perawatan Personel
HAM	Hak Asasi Manusia
IMO	<i>International Maritime Organization</i>
Intelijen	Intel
Juklak	Petunjuk Pelaksanaan
KAL	Kapal AL
Kadisnavkom	Kepala Divisi Navigasi dan Komunikasi
Kapolda	Kepala Kepolisian Daerah
Kasal	Kepala Staf AL
Kaset	Kepala Sekretariat
Kemhan	Kementerian Pertahanan
Kepmen	Keputusan Menteri
Keppres	Keputusan Presiden
Kotama	Komando Utama
KRI	Kapal Perang Republik Indonesia
Laksa	Laksamana Pertama
Lanal	Pangkalan TNI AL
Lantamal	Pangkalan Utama TNI AL
Lanud	Pangkalan Udara
Mako	Markas Komando
MDA	<i>Maritime Domain Awareness</i>
Migas	Minyak dan Gas
MoU	<i>Memorandum of Understanding</i>
No	Nomor
Obvitnas	Obyek Vital Nasional
Palaksa	Perwira Pelaksana
Pangkotamaops	Panglima Komando Utama Operasi
Patkamla	Kapal Patroli Keamanan Laut
PDAM	Perusahaan Daerah Air Minum
Pekas	Pemegang Kas

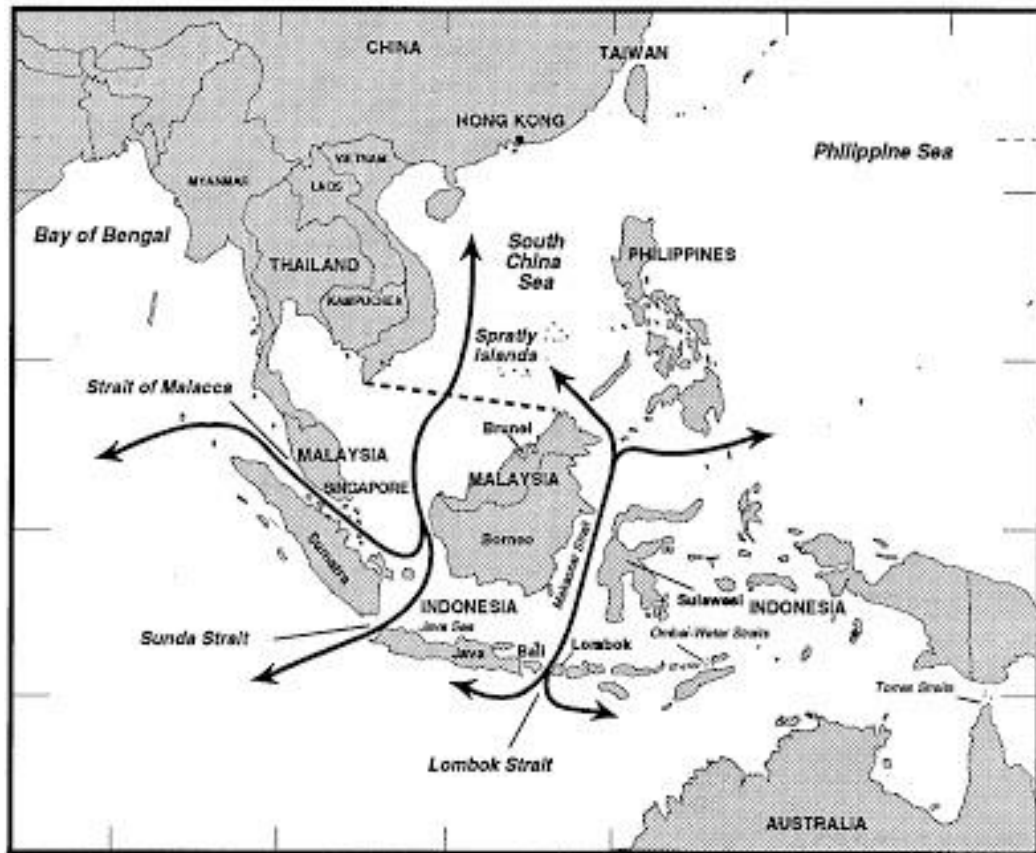
Pelindo	Pelabuhan Indonesia
Pemda	Pemerintah Daerah
Pesud	Pesawat Udara
PKS	Perjanjian Kerja Sama
PNS	Pegawai Negeri Sipil
Polri	Kepolisian Negara Republik Indonesia
Pomal	Polisi Militer AL
Posal	Pos AL
Poskamla	Pos Keamanan Laut
Posmat	Pos Pengamat
Protap	Prosedur Tetap
PT	Perseroan Terbatas
Purn	Purnawirawan
Rumkit	Rumah Sakit
Satkamla	Satuan Keamanan Laut
Satker	Satuan Kerja
Satkom	Satuan Komunikasi
SDM	Sumber Daya Manusia
SPBU	Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum
SPP	Surat Perintah Pelaksanaan
SSAT	Sistem Senjata Armada Terpadu
TNI	Tentara Nasional Indonesia
US	<i>United States</i>
UU	Undang – Undang
Wadan	Wakil Komandan
Yonmarhanlan	Batalion Marinir Pertahanan Pangkalan

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1. Latar Belakang**

Asia Pasifik adalah kawasan yang dinamis. Seiring dengan semakin meredupnya Eropa, *center of gravity* ekonomi dan geopolitik dunia telah bergeser ke Asia Pasifik, membuat kawasan tersebut menjadi semakin penting, terlebih dengan keberadaan sejumlah negara yang memiliki pengaruh besar dalam ekonomi dan geopolitik dunia, seperti Cina dan Amerika Serikat di kawasan tersebut. Laut merupakan aspek penting bagi pembangunan ekonomi sebuah negara khususnya sebagai media utama perdagangan dunia saat ini. Menurut Geoffrey Till (2009) setidaknya, laut memiliki empat fungsi yaitu : sebagai sumber daya, sarana transportasi, sumber pertukaran informasi dan sarana memperoleh kekuasaan.

Data International *Maritime Organization* (IMO) tahun 2018 menunjukkan bahwa 90% dari total perdagangan dunia dilaksanakan melalui domain laut. Hal ini disebabkan karena laut merupakan sarana transportasi yang paling murah dibandingkan dengan mode transportasi darat dan udara. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki wilayah laut lebih luas dari daratan, Indonesia mempunyai 4 *choke points* (selat sempit) perdagangan laut dunia. Selain itu posisi Indonesia berada di posisi silang dunia, di antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik yang mana hal ini membuat laut Indonesia menjadi sangat strategis baik bagi pelayaran maupun hasil sumber daya alam. Indonesia memiliki potensi sumber daya laut yang beragam, baik dari sektor perikanan, kelautan, pertambangan, dan lainnya. Sehingga diperlukan strategi untuk membangun Indonesia menjadi sebuah negara maritim yang tangguh dan berdaulat.



Gambar 1. *Choke Points* yang Ada di Indonesia  
Sumber : Tempest, 2014

Obyek Vital Nasional (Obvitnas) adalah kawasan/lokasi, bangunan/instalasi dan atau usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara dan/atau sumber pendapatan negara yang bersifat strategis. Obvitnas memiliki peranan penting ditinjau dari aspek ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Hal ini untuk mencegah semakin meningkatnya ancaman dan gangguan terhadap Obvitnas termasuk aksi terorisme. Menurut Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor (No) 63 Tahun 2004 Pasal 3, status Obvitnas harus ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri (Kepmen) dan atau kepala lembaga pemerintah non departemen.

Indonesia memiliki 69 unit pelabuhan strategis yang dikelola oleh Perseroan Terbatas (PT) Pelabuhan Indonesia (Pelindo), salah satunya adalah Pelabuhan Teluk Bayur. Pelabuhan ini merupakan salah satu

Obvitnas berdasarkan Kepmen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) (No) 3407 Tahun 2012. Ditetapkannya Pelabuhan Teluk Bayur sebagai Obitnas menunjukkan bahwa pelabuhan di Provinsi Sumatera Barat ini telah memenuhi persyaratan dan ketentuan, antara lain : 1) Ancaman dan gangguan terhadapnya mengakibatkan bencana terhadap kemanusiaan dan pembangunan, 2) Ancaman dan gangguan terhadapnya mengakibatkan kekacauan transportasi dan komunikasi secara nasional dan/atau, 3) ancaman dan gangguan terhadapnya mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan pemerintahan negara.

Tabel 1. Pelabuhan Strategis yang Dikelola oleh PT. Pelindo I

No	Nama	Pulau	Alamat
1	Belawan	Sumatera	Jl. Sumatera No. 1, Medan, Sumatera Utara
2	Dumai	Sumatera	Kota Dumai, Riau
3	<i>Belawan International Container Terminal</i>	Sumatera	Jl. Raya Pelabuhan Gabion Belawan, Medan, Sumatera Utara
4	Terminal Peti Kemas Domestik Belawan	Sumatera	Bagan Deli, Medan, Sumatera Utara
5	Tanjung Pinang	Bintan	Jl. Samudera No. 1, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau
6	Pekanbaru	Sumatera	Jl. Saleh Abbas No. 3, Pekanbaru, Riau
7	Tanjung Balai Karimun	Karimun	Jl. Teluk Air No. 12, Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau
8	Kuala Tanjung	Sumatera	Kuala Tanjung, Batu Bara, Sumatera Utara
9	Batam	Batam	Jl. Yos Sudarso No. 3, Batam, Kepulauan Riau
10	Sei Pakning	Sumatera	Jl. Jend. Sudirman, Bengkalis, Riau
11	Sibolga	Sumatera	Jl. Horas, Sibolga Selatan, Sumatera Utara
12	Malahayati	Sumatera	Jl. Laksamana Malahayati, Aceh Besar, Aceh
13	Lhokseumawe	Sumatera	Jl. Pelabuhan Umum Kreung Geukeuh, Aceh
14	Tanjung Balai Asahan	Sumatera	Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara

15	Tembilahan	Sumatera	Tembilahan Kota, Indragiri Hilir, Riau
16	Gunung Sitoli	Nias	Jl. Yos Sudarso, Gunung Sitoli, Sumatera Utara

Sumber : PT. Pelindo I (2018)

Tabel 2. Pelabuhan Strategis yang Dikelola oleh PT. Pelindo II

No	Nama	Pulau	Alamat
1	Tanjung Priok	Jawa	Jl. Raya Pelabuhan No. 8, Tanjung Priok, DKI Jakarta
2	Palembang	Sumatera	Jl. Belinyu No. 1, Palembang, Sumatera Selatan
3	Panjang	Sumatera	Jl. Yos Sudarso No. 337, Panjang, Bandar Lampung
4	Pontianak	Kalimantan	Jl. Pakasih No. 11, Pontianak, Kalimantan Barat
5	Teluk Bayur	Sumatera	Jl. Semarang No. 3, Teluk Bayur, Sumatera Barat
6	Banten	Jawa	Jl. Raya Pelabuhan No. 1, Ciwanden, Banten
7	Bengkulu	Sumatera	Pelabuhan Pulau Baai, Bengkulu
8	Cirebon	Jawa	Jl. Perniagaan No. 4, Cirebon, Jawa Barat
9	Jambi	Sumatera	Jl. Pelabuhan Talang Duku, Jambi
10	Pangkal Balam	Bangka	Jl. Yos Sudarso No. 1, Pangkal Pinang, Bangka Belitung
11	Sunda Kelapa	Jawa	Jl. Maritim No. 8, Sunda Kelapa, DKI Jakarta
12	Tanjung Pandan	Belitung	Jl. Pelabuhan No. 1, Tanjung Pandan, Bangka Belitung

Sumber : IPC (2018)

Tabel 3. Pelabuhan Strategis yang Dikelola oleh PT. Pelindo III

No	Nama	Pulau	Alamat
1	Tanjung Perak	Jawa	Jl. Tanjung Perak Timur No. 620, Surabaya, Jawa Timur
2	Banjarmasin	Kalimantan	Jl. Barito Hilir No. 6, Banjarmasin, Kalimantan Selatan
3	Bima	Sumbawa	Jl. Tanjung, Bima, Nusa Tenggara Barat
4	Gresik	Jawa	Jl. Pulo Pancikan, Gresik, Jawa Timur
5	Celukan Bawang	Bali	Jl. Pelabuhan Celukan Bawang, Buleleng, Bali
6	Kotabaru	Kalimantan	Jl. Raya Stagen, Kotabaru, Kalimantan Selatan
7	Kumai	Kalimantan	Jl. Bendahara No. 248, Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah

8	Tenau Kupang	Timor	Jl. Alak, Kupang, Nusa Tenggara Timur
9	Maumere	Flores	Kota Uneng, Sikka, Nusa Tenggara Timur
10	Pelabuhan Lembar	Lombok	Lembar, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat
11	Pelabuhan Sampit	Kalimantan	Jl. Usman Harun, Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah
12	Tanjung Intan	Jawa	Jl. Selat Madura, Cilacap Selatan, Jawa Tengah
13	Tanjung Emas	Jawa	Jl. Coaster No. 10, Kota Semarang, Jawa Tengah
14	Tanjung Wangi	Jawa	Jl. Klatak, Banyuwangi, Jawa Timur
15	Benoa	Bali	Jl. Pelabuhan Benoa, Denpasar, Bali
16	Tanjung Tembaga	Jawa	Jl. Tanjung Tembaga Barat, Kota Probolinggo, Jawa Timur
17	Terminal Peti Kemas Semarang	Jawa	Jl. Coaster No. 10A, Kota Semarang, Jawa Tengah

Sumber : PT. Pelindo III (2018)

Tabel 4. Pelabuhan Strategis yang Dikelola oleh PT. Pelindo IV

No	Nama	Pulau	Alamat
1	Makassar	Sulawesi	Jl. Sukarno No. 1, Makassar, Sulawesi Selatan
2	Pare – Pare	Sulawesi	Jl. Andi Cammi, Pare – Pare, Sulawesi Selatan
3	Kendari	Sulawesi	Jl. Konggoasa No. 1, Kendari, Sulawesi Tenggara
4	Pantoloan	Sulawesi	Jl. Kompleks Pelabuhan Pantoloan No. 3, Sulawesi Tengah
5	Toli – Toli	Sulawesi	Jl. Yos Sudarso No. 394, Toli – Toli, Sulawesi Selatan
6	Manado	Sulawesi	Jl. Pelabuhan III No. 1, Manado, Sulawesi Utara
7	Bitung	Sulawesi	Jl. D. S. Sumolang, Bitung, Sulawesi Utara
8	Terminal Peti Kemas Bitung	Sulawesi	Jl. Samuel Languyu No. 1, Bitung, Sulawesi Utara
9	Bau – Bau	Buton	Jl. Yos Sudarso, Kota Bau – Bau, Sulawesi Tenggara
10	Sorong	Papua	Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 13, Sorong, Irian Jaya
11	Jayapura	Papua	Jl. Koti II No. 21, Jayapura, Irian Jaya
12	Biak	Papua	Jl. Jenderal Sudirman No. 51, Biak, Irian Jaya

13	Merauke	Papua	Jl. Yos Sudarso No. 9, Merauke, Irian Jaya
14	Manokwari	Papua	Jl. Banjarmasin No. 3, Manokwari, Irian Jaya
15	Fak – Fak	Papua	Jl. Izak Tellusa No. 5, Fak – Fak, Irian Jaya
16	Balikpapan	Kalimantan	Jl. Yos Sudarso No. 30, Balikpapan, Kalimantan Timur
17	Samarinda	Kalimantan	Jl. Niaga Timur No. 130, Samarinda, Kalimantan Timur
18	Bontang	Kalimantan	Jl. Ir. H. Juanda No. 1, Bontang, Kalimantan Timur
19	Sengata	Kalimantan	Kantor Marine Depatemen, Sengata, Kalimantan Timur
20	Ambon	Ambon	Jl. Yos Sudarso No. 1, Ambon, Maluku
21	Ternate	Ternate	Jl. Kompleks Pelabuhan Ternate, Maluku Utara
22	Nunukan	Kalimantan	Jl. Pelabuhan Baru No. 10, Nunukan, Kalimantan Utara
23	Tarakan	Tarakan	Jl. Yos Sudarso No. 9, Tarakan, Kalimantan Utara
24	Tanjung Redeb	Kalimantan	Jl. Pangeran Antasari, Tanjung Redeb, Kalimantan Utara

Sumber : PT. Pelindo IV (2018)

Pelabuhan Teluk Bayur merupakan ujung tombak dalam menentukan kesuksesan pengiriman barang dari daerah sekitar Sumatera Barat ke nusantara dan mancanegara. Oleh karena itu dibutuhkan pengelolaan dan pengamanan pelabuhan secara periodik dan berkala. Pelabuhan ini dibuat di Kota Padang oleh Belanda pada tahun 1888 – 1893. Pelabuhan Teluk Bayur telah dilengkapi dengan peralatan modern yang mampu menangani berbagai jenis barang, tidak hanya barang tambang, tetapi juga barang curah serta komoditas yang menggunakan peti kemas (IPC, 2018).

Ancaman terhadap keefisienan yang ditimbulkan oleh pengelolaan pelabuhan yang buruk dapat dikategorikan sebagai kajian yang berdomain di sektor maritim, yaitu sektor ekonomi maritim (Douglas *et al.*, 2015). Jadi terdapat keterkaitan antara keamanan maritim bidang ekonomi maritim

dengan konsep keamanan. Fokusnya adalah bagaimana sebuah kebijakan berdimensi maritim mempengaruhi kondisi masyarakat yang tinggal di dalam sebuah negara. Pemanfaatan kapal sebagai moda transportasi dalam pendistribusian produk ke beberapa wilayah seringkali tidak terlepas dari beberapa potensi ancaman, antara lain perompakan, terorisme, pembajakan, dan ancaman keselamatan pelayaran.

Beberapa permasalahan yang terjadi di sekitar Pelabuhan Teluk Bayur yang terletak di wilayah perairan Selatan Sumatera Barat, selain merupakan jalur pelayaran dan daerah tangkapan ikan yaitu terjadinya penurunan kualitas struktur pelabuhan akibat adanya korosi dan *marine growth*. Maka oleh karena itu Pelabuhan Teluk Bayur perlu diperbaiki dan dikembangkan, agar kapal yang bersandar semakin nyaman dan eksportir tidak perlu lagi merasa khawatir terhadap ketiadaan kapal. Infrastruktur Pelabuhan Teluk Bayur juga harus dibangun untuk mewujudkan peningkatan pelayanan selaku penyedia jasa dan jantung perekonomian yang menunjang kemampuan nasional. Dengan adanya peralatan yang memadai, arus bongkar muat akan lebih cepat dan tidak ada lagi kapal – kapal di pelabuhan yang bersandar lama.

Isu keamanan laut yang cukup menonjol dan menjadi perhatian di wilayah perairan Selatan Sumatera Barat adalah : 1) Ancaman keselamatan pelayaran, berupa kurang terpeliharanya sarana bantu navigasi seperti pelampung suar dan rambu suar (Aliy, 2016), dan 2) Ancaman sumber daya, berupa kerusakan dan pencemaran laut beserta ekosistemnya akibat tumpahan minyak (Madani dan Candra, 2017). Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Laut (AL) merupakan pengaman inti dalam mengamankan laut Indonesia sesuai dengan Undang – Undang (UU) No. 34 Tahun 2004 tentang TNI yang selanjutnya akan dijelaskan di bawah.

UU Republik Indonesia (RI) No 34 Tahun 2004 tentang TNI Pasal 7 berbunyi : (1) Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan UU Dasar Negara RI Tahun 1945,

serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. (2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :

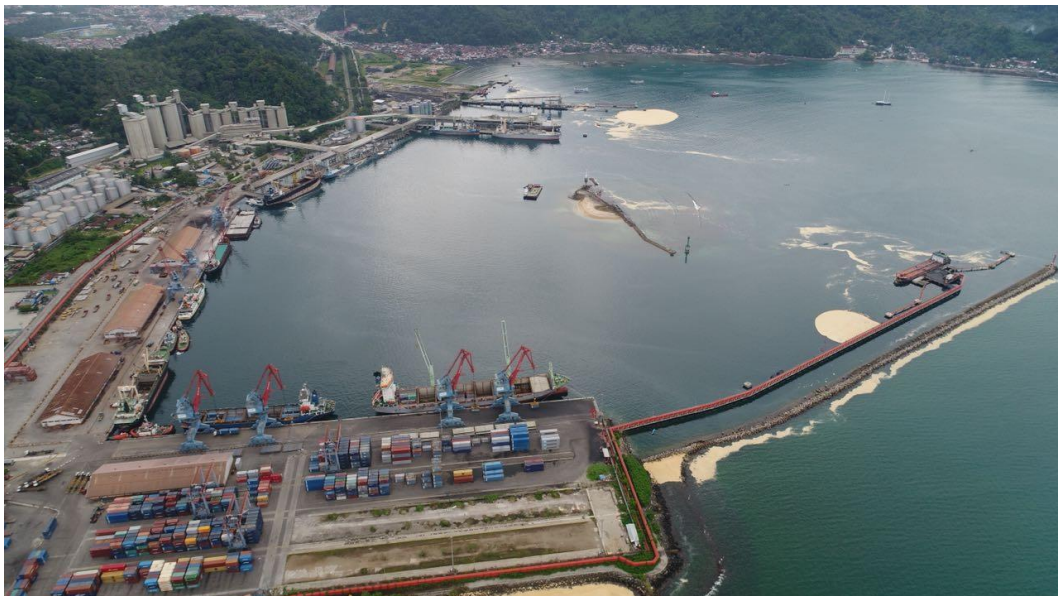
a. Operasi Militer Untuk Perang.

b. Operasi Militer Selain Perang (OMSP), yaitu untuk :

1. Mengatasi gerakan separatisme bersenjata;
2. Mengatasi pemberontakan bersenjata;
3. Mengatasi aksi terorisme;
4. Mengamankan wilayah perbatasan;
5. Mengamankan obyek vital nasional yang bersifat strategis;
6. Melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri;
7. Mengamankan Presiden dan wakil presiden beserta keluarganya;
8. Memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta;
9. Membantu tugas pemerintahan di daerah;
10. Membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam UU;
11. Membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia;
12. Membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan;
13. Membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (*search and rescue*); serta
14. Membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.

UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI Pasal 9 berbunyi : AL bertugas : a. melaksanakan tugas TNI matra laut di bidang pertahanan; b. menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi; c. melaksanakan tugas diplomasi AL dalam rangka mendukung kebijakan politik luar negeri yang ditetapkan oleh pemerintah; d. melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra laut; serta e. Melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut.



Gambar 2. Pelabuhan Teluk Bayur  
Sumber : Walhi Sumbar, 2017

Menurut Laksamana TNI Purnawirawan (Purn.) Ade Supandi (2016) doktrin Sistem Senjata Armada Terpadu (SSAT) terdiri dari empat unsur utama, yaitu Kapal Perang Republik Indonesia (KRI), Korps Marinir, Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal), dan pesawat udara, didukung sistem logistik dan komando pengendalian. Lantamal adalah Komando pelaksana dukungan yang memiliki tugas untuk menyelenggarakan dukungan tempur, dukungan logistik, dukungan administrasi dan dukungan khusus bagi unsur – unsur TNI AL. Baik itu kapal, pesawat udara maupun marinir dalam melaksanakan operasi dan melaksanakan pemberdayaan potensi maritim,

serta tugas tambahan untuk membantu menyelenggarakan dukungan fasilitas pangkalan bagi kesatuan non TNI AL yang melaksanakan operasi di wilayahnya (Darwanto, 2017).

TNI AL didukung oleh 3 Komando Armada dalam melaksanakan tugasnya, yaitu : 1) Komando Armada 1 yang berkedudukan di Jakarta, 2) Komando Armada 2 yang berkedudukan di Surabaya, dan 3) Komando Armada 3 yang berkedudukan di Sorong. Komando Armada membawahi satuan – satuan dan Lantamal – Lantamal, dan Lantamal membawahi Pangkalan – Pangkalan TNI AL (Lanal). Lantamal II Padang merupakan pemekaran dari Lanal Kelas B Teluk Bayur, agar kemampuan Lanal dalam mendukung satuan operasi di kawasan strategis ini bisa ditingkatkan untuk menjawab tuntutan kebutuhan pengendalian laut dan peningkatan keamanan.

Lantamal II Padang mempunyai beberapa tugas pokok, yaitu : 1) Menyelenggarakan dukungan logistik dan administrasi bagi unsur – unsur satuan dan Komando Utama (Kotama) TNI AL yang beroperasi di wilayahnya, 2) Menyelenggarakan dukungan administrasi, 3) Melaksanakan penegakan hukum, 4) Menjaga keamanan laut, dan 5) Melaksanakan pemberdayaan potensi maritim yang mendukung pertahanan di wilayah kerjanya (Sulaeman, 2017). Seiring dengan tugas pokok tersebut, Lantamal II Padang juga melaksanakan operasi keamanan laut secara terbatas.

Hari Jumat 14 Juli 2017, mantan Panglima TNI Jenderal TNI (Purn.) Gatot Nurmantyo dan Menteri ESDM Ignasius Jonan menandatangani nota kesepahaman terkait kerja sama pengamanan eksplorasi sumber daya alam. TNI akan melakukan pengamanan Obvitnas serta seluruh kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang dilakukan oleh Kementerian ESDM, baik dalam sektor laut maupun sektor darat di seluruh titik di Indonesia. Kerja sama tersebut merupakan salah satu upaya pencegahan agar kegiatan eksplorasi dan eksploitasi ESDM, termasuk penelitian di Indonesia tetap aman. Untuk melakukan kegiatan pengamanan ini, AL yang berada di

sekitar Obvitnas ditugaskan juga untuk melakukan pengawalan (Erdianto dan Galih, 2017).

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka judul penelitian ini adalah : “Strategi Lantamal II Padang Dalam Mengamankan Obyek Vital Nasional (Obvitnas) Di Wilayah Perairan Selatan Sumatera Barat, Studi Kasus Pelabuhan Teluk Bayur”. Untuk itu penelitian ini akan membahas mengenai bagaimana strategi Lantamal II Padang dalam mengamankan Obvitnas Pelabuhan Teluk Bayur di Sumatera Barat serta faktor apa saja yang mempengaruhi strategi tersebut.

### **1.2. Fokus dan Subfokus Penelitian**

Peneliti dalam penelitian ini akan memfokuskan pada strategi Lantamal II Padang dalam mengamankan Obvitnas Pelabuhan Teluk Bayur. Sementara itu, selain fokus tersebut peneliti juga menjadikan faktor – faktor yang mempengaruhi strategi Lantamal II Padang dalam mengamankan Obvitnas Pelabuhan Teluk Bayur sebagai subfokus dalam penelitian ini.

### **1.3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti merumuskan permasalahan mendasar yang akan di analisis dalam penelitian ini, yaitu persoalan keselamatan dan keamanan di wilayah Selatan Sumatera Barat terutama dalam hal strategi pengamanan Obvitnas berupa pelabuhan. Dari data yang ada gangguan keamanan atau aksi pelanggaran hukum masih terjadi sehingga dianggap mengganggu keselamatan dan keamanan maritim. Tuntutan akan jaminan keamanan di wilayah tersebut seperti disampaikan sebelumnya, masih belum dapat diwujudkan sepenuhnya agar laut bebas dari segala bentuk ancaman, dikarenakan kemampuan yang masih sangat terbatas. Dalam rangka mewujudkan kondisi stabilitas keamanan laut untuk menjamin integritas wilayah maupun kepentingan nasional di dan atau lewat laut, diperlukan *response* atas adanya ancaman keamanan dalam bentuk upaya penegakan kedaulatan dan penegakan

hukum. *Response* yang dimiliki pemerintah untuk menghadapi adanya ancaman keamanan di wilayah perairan Selatan Sumatera Barat adalah adanya aparat keamanan maritim (Lantamal II Padang).

Mengacu pada perumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka pertanyaan – pertanyaan penelitian yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah strategi Lantamal II Padang dalam mengamankan Obvitnas di wilayah Pelabuhan Teluk Bayur?
2. Faktor – faktor apa sajakah yang mempengaruhi strategi Lantamal II Padang dalam mengamankan Obvitnas di Pelabuhan Teluk Bayur?

#### **1.4. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, peneliti bertujuan melakukan penelitian ini untuk :

1. Menganalisis strategi Lantamal II Padang dalam mengamankan Obvitnas di wilayah Pelabuhan Teluk Bayur.
2. Menganalisis faktor – faktor apa sajakah yang mempengaruhi strategi Lantamal II Padang dalam mengamankan Obvitnas di wilayah Pelabuhan Teluk Bayur.

#### **1.5. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini terbagi atas dua, yaitu :

##### **1.5.1. Manfaat Teoritis**

1. Memperkaya referensi kajian keamanan maritim dalam kaitannya dengan strategi pengamanan Obvitnas untuk pertahanan negara.
2. Memperkaya referensi kajian pengembangan pengamanan Obvitnas Pelabuhan Teluk Bayur di wilayah Sumatera Barat.

##### **1.5.2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan mengenai strategi Lantamal II Padang dalam mengamankan area di sekitar Obvitnas

Pelabuhan Teluk Bayur di wilayah perairan Selatan Sumatera Barat, serta diharapkan dapat memberikan saran dan masukan untuk Lantamal II Padang dalam mengamankan area di sekitar Obvitnas Pelabuhan Teluk Bayur di wilayah perairan Selatan Sumatera Barat, sehingga laut bebas dari segala ancaman bisa diwujudkan.

## **BAB II KAJIAN TEORITIK**

### **2.1. Deskripsi Konseptual**

Menurut John W. Creswell (2011), tinjauan literatur (pustaka) adalah ringkasan dari artikel jurnal, buku, dan dokumen lain yang terkait dengan penelitian yang sedang dilakukan. Tinjauan pustaka menjadi penting dalam suatu penelitian, untuk menunjukkan bahwa penelitian yang dilakukan memiliki kebaruan dari penelitian – penelitian yang berada dalam satu tema dan kajian yang sama. Hal ini menjadikan penelitian yang sedang dilakukan bernilai baru dan dengan demikian dapat menyumbangkan atau berkontribusi terhadap kajian yang menjadi area tema penelitian tersebut.

#### **2.1.1. Teori Strategi Pertahanan Negara**

Strategi berasal dari bahasa Yunani strategi yang artinya seni untuk menjadi panglima militer. Komandan senior dalam militer Athena disebut *strategos* yang artinya pemimpin dari militer. Dalam bahasa Inggris pemimpin militer ini disebut dengan *general* (seseorang yang berkaitan dengan keseluruhan), sehingga jenderal dari militer adalah seseorang yang bertanggung jawab untuk seluruh militer dan juga bagian – bagiannya (Midhio, 2018). Pemakaian teori strategi pertahanan dalam penelitian ini adalah karena pengamanan Obvitnas Pelabuhan Teluk Bayur yang dilakukan oleh institusi keamanan negara Lantamal II Padang juga merupakan salah satu strategi pertahanan negara.

Strategi adalah cara untuk mengoptimalkan keadaan pada saat ini dan masa depan dengan memerlukan penyesuaian. Strategi dalam situasi militer adalah menang atau kalah. Strategi ini bertujuan mencapai tujuan militer dengan menggunakan usaha yang paling sedikit. Tujuan utamanya adalah melumpuhkan lawan sambil melanjutkan konflik dan mengakhiri perang (Gill, 2017).

Pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan keutuhan wilayah sebuah negara, kedaulatan negara, dan keselamatan segenap bangsa dari gangguan dan ancaman terhadap keutuhan bangsa dan negara. Kondisi dinamik suatu bangsa yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang berintegrasi, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan baik yang datang dari luar maupun dari dalam. Untuk menjamin identitas, integritas kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mencapai tujuan nasionalnya. Untuk mengembangkan pertahanan tersebut perlu menggunakan teori menurut John M. Collins (2002), dalam mengevaluasi ancaman terdapat tiga pertimbangan yang berpengaruh yaitu : pertama, dengan cara menilai kemampuannya (*capabilities*); kedua, intensitasnya (*intensions*); dan ketiga, kemudahan untuk dapat diserang (*vulnerabilities*).

Pertahanan dibagi menjadi dua jenis, yaitu pertahanan militer dan non militer. Pertahanan militer merupakan kekuatan utama pertahanan negara yang dibangun dan dipersiapkan untuk menghadapi ancaman militer, tersusun dalam komponen utama serta komponen cadangan dan komponen pendukung. Pendayagunaan lapis pertahanan militer diwujudkan dalam penyelenggaraan operasi militer. Pertahanan non militer merupakan kekuatan pendukung pertahanan negara yang dibangun untuk mencapai kesejahteraan nasional dan dipersiapkan untuk menghadapi ancaman non militer. Lapis pertahanan non militer tersusun dalam fungsi keamanan untuk keselamatan umum yang mencakup penanganan bencana alam dan operasi kemanusiaan lainnya, ekonomi, psikologi pertahanan, dan sosial budaya, yang pada intinya berkaitan dengan pengembangan teknologi, dan pemikiran kesadaran bela negara.

A. T. Mahan (1987) mengatakan bahwa untuk menjadikan bangsa yang besar harus dapat menguasai kepentingan – kepentingannya di laut dan membutuhkan AL yang kuat untuk melindungi dan meningkatkan

kepentingan – kepentingan yang lebih luas lagi. Kekuatan laut terdiri dari armada niaga, AL, dan pangkalan. Perkembangan kekuatan laut dipengaruhi oleh 6 elemen, yaitu :

1. Geografi

Kondisi geografi berkaitan dengan kelautan yang menjadikan negara bangsa itu memiliki kepentingan vital yang harus dilindungi demi kelangsungan hidupnya, karena hal itu sangat menentukan jatuh atau banggunya suatu bangsa

2. Posisi Wilayah

Konfigurasi wilayah yang memungkinkan untuk membangun pelabuhan dan pangkalan – pangkalan.

3. Luas Wilayah

Luas wilayah dikaitkan dengan kekayaan sumber daya alam kelautan yang dimiliki, sebagai sumber kekayaan negara.

4. Jumlah Dan Karakter Penduduk

Karakter rakyat terhadap lingkungan kehidupan di laut/jiwa kebaharian, dengan jumlah penduduk yang besar disertai jiwa dan semangat kebaharian serta tekad untuk tidak ingin kehilangan wilayahnya lagi satu jengkal pun.

5. Watak Bangsa

*Mind set* sebagai negara maritim yang harus dimunculkan.

6. Sikap Pemerintah.

Kebijakan pemerintah terhadap upaya pembangunan kelautan.

Sedangkan untuk instrumen kekuatan lautnya terdiri dari armada perang dan armada kapal – kapal komponen bangsa lainnya, pesawat udara patroli maritim, pangkalan – pangkalan pendukungnya termasuk Pangkalan Udara (Lanud), armada niaga nasional termasuk armada perikanan nasional serta pelabuhan – pelabuhan dan fasilitasnya. Dalam pandangannya, Mahan berpendapat pengamanan laut akan selalu melekat pada fungsi dan tugas AL suatu negara. Menurut James E. Willard (2006) sarana (*means*) untuk mencapai *Sea Power* dengan menggunakan

*Diplomatic, Informational, Military, and Economic (DIME) goals using maritime military diplomacy.* Teori Mahan digunakan dalam penelitian ini karena Lantamal II Padang merupakan institusi keamanan negara yang menjamin keamanan laut di wilayah perairan Selatan Provinsi Sumatera Barat.

### **2.1.2. Teori Trinitas AL**

Kent Booth (1977) menyatakan angkatan laut memiliki 3 peran dalam konteks kerja sama maritim antar negara di kawasan, yaitu : 1) Peran militer, 2) Peran diplomasi, dan 3) Peran Kepolisian. Peran kepolisian ditekankan pada wilayah perairan teritorial, dan dikhususkan mengatur kebutuhan masyarakat terhadap tantangan keadaan dunia luar. Peranan ini ditugaskan termasuk di dalamnya polisi perairan, penjaga perbatasan, serta bantuan militer, instansi masyarakat, hingga pengamanan terhadap Obvitnas di wilayah perairan sehingga penelitian ini relevan dengan teori Booth.

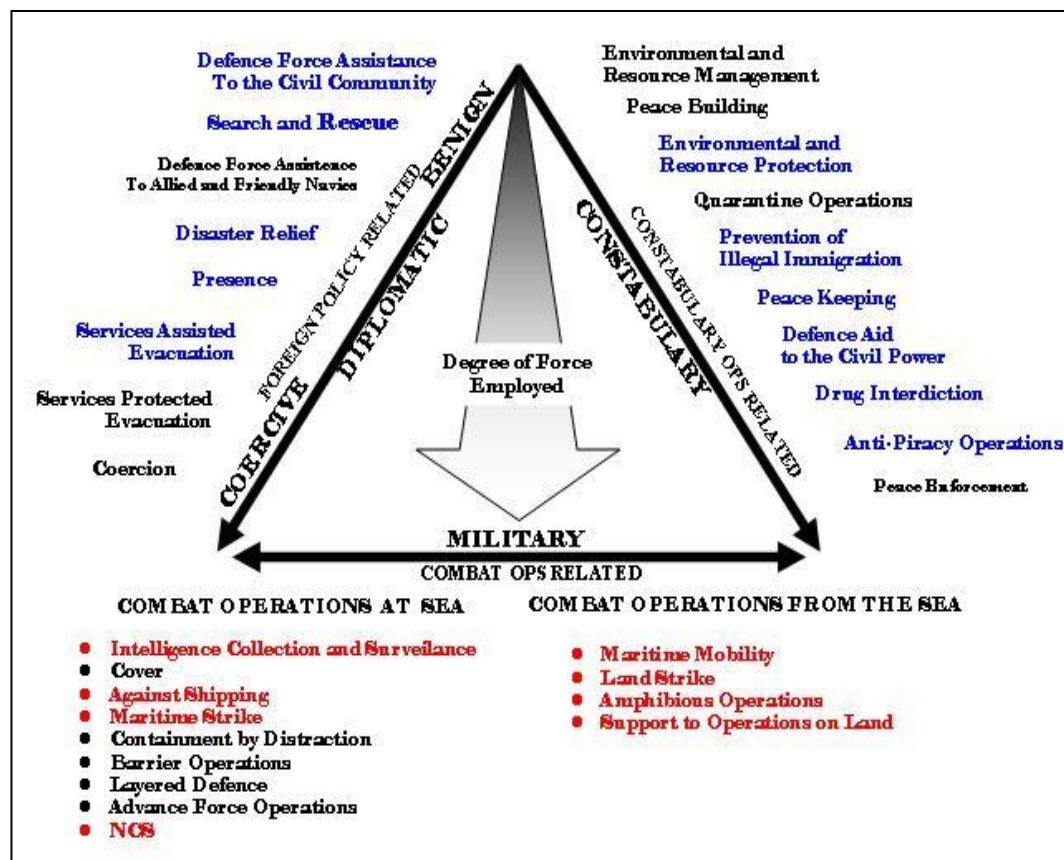
Tujuan utama dari peran kepolisian AL di antaranya :

- A. Peran *Coast Guard* terhadap *sovereignty*. Peran ini merupakan hal yang sangat penting dalam suatu kebijakan maritim terhadap negara pantai, pelayanan jasa maritim, AL, maupun kerja sama kelautan yang berhubungan dengan keutuhan *sovereignty, resource enjoyment, dan maintenance of good order*.
- B. Peran *nation – building* berperan terhadap *internal stability*, khususnya ketika keadaan politik dalam keadaan kacau maupun normal, serta berkontribusi terhadap *internal development*. Peran ini lebih banyak difungsikan pada pembangunan kembali wilayah yang terkena bencana alam maupun huru – hara di negara dunia ketiga.

OMSP oleh AL dalam menjalankan peran kepolisian terdiri dari :

- Manajemen lingkungan dan sumber daya
- Membangun perdamaian
- Perlindungan lingkungan dan sumber daya

- Operasi karantina
  - Pencegahan imigrasi ilegal
  - Pemeliharaan perdamaian
  - Bantuan pertahanan kepada kekuatan sipil
  - Pencegatan obat – obatan
  - Operasi anti pembajakan
- Penyelenggaraan perdamaian.

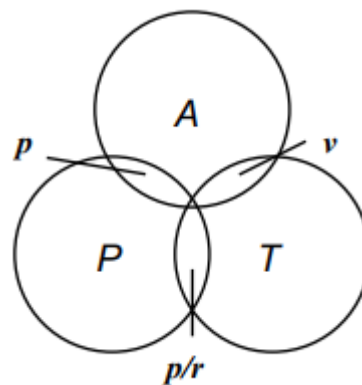


Gambar 3. Trinitas Peran Kekuatan Laut  
Sumber : Kent Booth (1977)

### 2.1.3. Teori Pengamanan

Komponen – komponen keamanan terdiri dari aset (*asset*), pelindung (*protector*), dan ancaman (*threat*). Aset adalah sesuatu atau seseorang yang bernilai atau berguna. Aset ini bisa bersifat sebagai benda fisik (*material*), seperti rumah, mobil, perhiasan, uang, bangunan, dan sebagainya, atau benda non – fisik (*immaterial*) seperti nilai – nilai agama,

ideologi suatu bangsa, dan lainnya. Aset dalam penelitian ini berupa Obvitnas Pelabuhan Teluk Bayur. Pelindung adalah seseorang atau sesuatu yang melindungi, misalnya tentara, polisi, baju anti peluru, mobil anti peluru, helm, dan lainnya. Pelindung dalam penelitian ini adalah Lantamal II Padang. Kemudian ancaman adalah sesuatu atau seorang yang menjadi sumber bahaya atau suatu maksud pernyataan untuk menyebabkan bahaya, luka, dan kesengsaraan, misalnya ancaman serangan nuklir, pemanasan global, perang, bencana alam, terorisme, krisis energi, limbah beracun, dan lainnya. Ancaman dalam penelitian ini berupa ancaman keselamatan pelayaran dan ancaman sumber daya. Hubungan ketiganya terlihat dalam Gambar 1 berikut ini :



Gambar 4. Komponen – Komponen Keamanan  
Sumber : Manunta, 1997

- A = *Asset*
- P = *Protector*
- T = *Threat*
- v = *vulnerability*
- p = *protection of Asset by Protector*
- p/r = *protection/respons (action taken against perceived threat)*

Liota P. H. (2002) menyatakan bahwa ketiga komponen dasar ini harus hadir dan berinteraksi untuk membentuk konteks keamanan dan menyelenggarakan suatu proses keamanan. Berdasarkan pemahaman akan komponen – komponen konsep keamanan di atas, maka keamanan (*security*) dapat diartikan sebagai ketiadaan ancaman (*the absence of*

*threat*) atau rendahnya kemungkinan terjadi kerusakan dan bahaya (*low probability of damage*). Suatu situasi keamanan dapat diterjemahkan sebagai sebuah situasi damai tanpa bahaya atau ancaman apapun (*liberation from uneasiness, or a peaceful situation without any risk or threats*).

*Critical Infrastructure Protection* (Pengamanan Infrastruktur Penting) bertujuan untuk mengamankan pasokan barang dan jasa penting, seperti energi, transportasi, dan perawatan kesehatan. Infrastruktur penting tidak hanya mencakup bangunan dan fasilitas, tetapi juga penyediaan sistem dan layanan dalam arti luas. Gangguan serius terhadap infrastruktur penting dapat menyebabkan kerusakan besar pada perekonomian. Pengamanan infrastruktur penting ini terdiri dari berbagai tindakan struktural, teknis, organisasi dan hukum yang bertujuan untuk mencegah gangguan atau memulihkan fungsi dari infrastruktur tersebut jika terjadi insiden (Alcaraz dan Zeadally, 2015).

Pengamanan adalah kegiatan tindakan pengendalian dalam pengurusan suatu instansi dalam bentuk fisik, administratif dan tindakan upaya hukum. 1) Pengamanan administratif meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan penyimpanan dokumen kepemilikan, laporan mutasi barang, daftar inventaris barang, laporan semester dan laporan tahunan. 2) Pengamanan hukum antara lain meliputi kegiatan melengkapi bukti status kepemilikan barang, misalnya melengkapi sertifikat tanah, melengkapi BPKB dan STNK untuk kendaraan bermotor, kuitansi dan faktur pembelian. 3) Pengamanan fisik dilakukan untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, penurunan jumlah barang, dan hilangnya barang. Pengamanan fisik terhadap barang – barang bergerak dilakukan dengan cara penyimpanan baik tertutup dan terbuka, pemberian garasi terhadap kendaraan bermotor. Pengamanan fisik kepada barang yang tidak bergerak dapat dilakukan dengan cara pemagaran, penjagaan, pemasangan kamera CCTV, pintu berlapis, pemberian kunci ganda, serta pemasangan alarm (Juliadi, 2014).

#### 2.1.4. Teori Logistik Pertahanan

Henry E. Eccless (1959) menyatakan bahwa *the objective of a logistic effort is the creation and sustained support of combat forces*. Eccles menjelaskan logistik secara luas, terutama mengenai hubungan antara Strategi – Logistik – Taktik. Strategi adalah “*seni dari pengerahan kekuatan yang komprehensif untuk mengendalikan situasi dan area agar tujuan tercapai*”. Kekuatan yang dimaksud di sini adalah kekuatan militer, sedangkan tujuannya adalah tujuan politik negara untuk memenangkan perang.

Taktik diartikan sebagai penggunaan suatu kesatuan tentara dan senjata tertentu secara langsung dan segera untuk mencapai tujuan strategi. Kata kuncinya adalah langsung dan segera. Dapat dipahami bahwa strategi tidak kelihatan di lapangan, yang kelihatan adalah taktik, karena taktik adalah implementasi dari strategi itu sendiri. Sedangkan logistik adalah “*pengadaan dan dukungan senjata serta kekuatan yang berkelanjutan untuk digunakan secara taktis agar tujuan strategis tercapai*”. Sederhananya logistik adalah ekonominya militer. Hubungan ketiganya digambarkan sebagai strategi dan taktik menentukan skema pelaksanaan kegiatan militer, logistik menyediakan sarana untuk mendukungnya. Strategi memberi skema menyeluruh, sedangkan skema taktik adalah langsung dan segera, sedangkan logistik menyediakan sarana tanpa memandang menyeluruh atau segera.

Hubungan tersebut dapat diartikan sebagai berikut : strategi adalah penentuan tujuan dan cara mencapainya, logistik adalah penciptaan dan penyelenggaraan dukungan yang berlanjut kepada satuan – satuan tempur dan taktik adalah menggunakan persenjataan tertentu dan kesatuan tempur demi tercapainya tujuan strategi. Strategi dan taktik adalah cara yang digunakan oleh pemimpin (umumnya pemimpin militer) untuk mencapai tujuan dari suatu kegiatan militer yaitu memenangkan peperangan. Untuk maksud tersebut selain strategi dan taktik, satu hal yang dominan dan sangat menunjang tercapainya kemenangan adalah dukungan logistik yang

memadai bagi personel maupun peralatan yang digunakan. Ketiga unsur tersebut merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan karena ketiganya saling mempengaruhi. Penelitian ini menggunakan teori Eccles karena ingin membedah strategi Lantamal II Padang dalam mengamankan Obvitnas Pelabuhan Teluk Bayur serta faktor – faktor yang mempengaruhinya seperti faktor logistik.

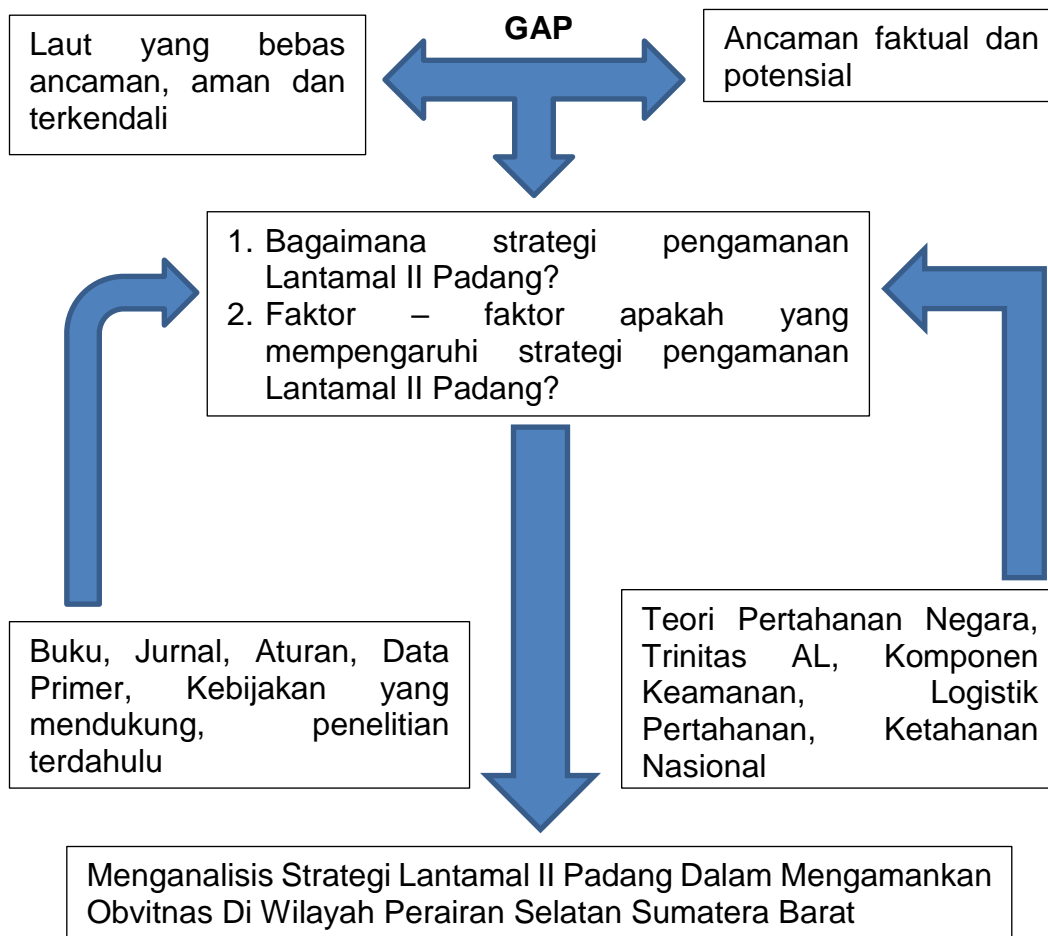
#### **2.1.5. Teori Ketahanan Nasional**

Menurut R. M. Sunardi (1997), ketahanan nasional merupakan kondisi dinamik suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional, dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman baik yang datang dari luar maupun dari dalam, yang langsung maupun tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mengejar tujuan nasional. Dalam konteks hubungan luar negeri, istilah Ketahanan Nasional lebih cenderung diterjemahkan dalam bahasa Inggris "*National Resilience*" karena dianggap memiliki pengertian yang dinamis, aktif, dan pro – aktif. Sebagai komponen unsur dasar, maka Ketahanan Nasional harus dibina secara terus menerus dalam upaya mencapai tujuan menciptakan masyarakat sejahtera, masyarakat yang aman, dan hubungan internasional yang harmonis. Penelitian ini akan mengkaji tentang strategi Lantamal II Padang dalam mengamankan Obvitnas Pelabuhan Teluk Bayur di perairan Selatan Provinsi Sumatera Barat agar keamanan maritim berupa laut yang bebas ancaman bisa diwujudkan, sehingga keamanan nasional dan ketahanan nasional dapat tercapai.

#### **2.1.6. Konsep Fokus Penelitian**

Konsep fokus penelitian yang menjadi fondasi dalam penelitian ini dapat dilihat dalam Gambar 2 di bawah. Fenomena atau masalah atau gejala adalah segala sesuatu yang dapat kita lihat, alami, dan rasakan. Sedangkan persoalan merupakan suatu fenomena yang kehadirannya

tidak dikehendaki, sehingga diperlukan usaha dan tindakan untuk dapat meniadakan persoalan tersebut. Fenomena yang telah terdefiniskan strukturnya disebut dengan sistem (Sasmojo, 2004). Fenomena penelitian ini adalah strategi Lantamal II Padang dalam mengamankan area sekitar Pelabuhan Teluk Bayur di wilayah perairan selatan Sumatera Barat.



Gambar 5. Kerangka Pemikiran

Persoalan penelitian ini adalah bahwa kondisi keamanan pelabuhan dan area sekitarnya di perairan selatan Sumatera Barat saat ini belum seperti yang diharapkan, yaitu kondisi laut yang aman digunakan bagi pengguna dan bebas dari ancaman atau gangguan terhadap penggunaan atau pemanfaatan laut (Markas Besar TNI AL, 2002). Kemudian dilakukan penelitian dengan menggunakan metode kualitatif yang menurut Bogdan dan Taylor (1975) diartikan sebagai bentuk penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata – kata tertulis atau lisan dari orang – orang dan

perilaku yang dapat diamati. Pengamatan yang diarahkan kepada individu secara utuh tidak boleh memisahkan individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis.

Menurut Denzin dan Lincoln (2005), penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, yaitu menafsirkan fenomena yang terjadi. Penelitian ini didukung oleh data – data primer dan sekunder yang diperoleh melalui proses komunikasi personal dan observasi, serta berpedoman pada konsep teori – teori yang relevan dan hasil penelitian terdahulu sebagai perbandingan. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap data – data yang diperoleh guna mendapatkan suatu kesimpulan berupa hasil penelitian, yang dapat menjawab dari apa yang menjadi pertanyaan penelitian pada rumusan masalah serta dapat memberikan masukan berupa saran – saran.

## **2.2. Hasil Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

Hasil penelitian terdahulu yang relevan dapat dijadikan sebagai acuan untuk melakukan penelitian. Walaupun ada perbedaan pada obyek, variabel, atau lokasi yang diteliti, penelitian tersebut dapat dipakai sebagai gambaran awal bagi peneliti untuk melaksanakan penelitian.

### **2.2.1. Analisis Pengaruh Motivasi Dan Kedisiplinan Terhadap Kinerja Prajurit TNI AL Di Lanal Dumai**

Tarmo, dalam bukunya yang berjudul Analisis Pengaruh Motivasi Dan Kedisiplinan Terhadap Kinerja Prajurit TNI AL Di Lanal Dumai, menurutnya suatu organisasi dapat berjalan dengan baik apabila pengawak dari organisasi tersebut mampu melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan baik. Lanal Dumai merupakan organisasi yang dituntut kemampuannya sebagai pendukung kesatuan TNI AL dalam rangka mobilitas kegiatan operasi. Maka Lanal dengan segenap kekuatannya bertugas pokok melaksanakan segala usaha, kegiatan, dan tindakan mengamankan dan mempertahankan pangkalan beserta segenap peralatan, perlengkapan,

dan fasilitasnya terhadap segala bentuk ancaman yang dapat merugikan terselenggaranya fungsi pangkalan.

Menurut Tarmo, dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, Lanal Dumai dipengaruhi oleh kinerja prajurit yang mengawakinya, sedangkan kinerja prajurit dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya motivasi dan kedisiplinan prajurit. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh motivasi dan kedisiplinan terhadap kinerja prajurit yang bertugas di Lanal Dumai. Penelitian ini dilakukan dengan memakai metode survei, dan data yang diperoleh dianalisis dengan statistik deskriptif dan statistik inferensial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor motivasi dan kedisiplinan secara bersama – sama mempunyai pengaruh yang kuat dan signifikan dengan kinerja prajurit TNI AL yang bertugas di Lanal Dumai. Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka TNI AL perlu meningkatkan motivasi dan kedisiplinan dalam rangka meningkatkan kinerja prajuritnya. Motivasi intrinsik maupun ekstrinsik juga perlu ditingkatkan untuk menambah motivasi kerja yang pada muaranya akan meningkatkan kinerja prajuritnya.

### **2.2.2. Peran Lanal Dalam Pengamanan Obvitnas Di Kawasan Selatan Pulau Jawa (Studi Wilayah Kerja Lanal Cilacap)**

Imam Supriyatno, dalam bukunya yang berjudul Peran Lanal Dalam Pengamanan Obvitnas Di Kawasan Selatan Pulau Jawa (Studi Wilayah Kerja Lanal Cilacap). Penelitian ini di latar belakang oleh fenomena bahwa wilayah kerja Lanal Cilacap terdapat sejumlah obyek vital yang strategis dan perlu diberikan jaminan keamanan oleh semua pihak termasuk TNI AL. Seiring dengan fenomena tersebut, kenyataan kawasan Samudera Hindia saat ini telah menjadi ajang persaingan kepentingan banyak negara dalam penguasaan sumber daya laut. Berdasarkan latar belakang tersebut, dirumuskan masalah bagaimana Lanal Cilacap bersinergi dengan instansi lain dalam pengamanan obyek vital di wilayah kerjanya.

Teori dan konsep yang relevan dengan penulisan tesis ini di antaranya adalah teori peran, konsep pangkalan, dan sinergitas, serta

obyek vital. Adapun metode penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Informan yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah Komandan Lanal Cilacap, *General Manager* Pertamina Unit Pengolahan (UP) IV Cilacap, Komandan Komando Distrik Militer (Kodim), Kepala Kepolisian Resor (Kapolres), Bupati, dan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cilacap.

Hasil penelitian, diperoleh data bahwa di wilayah Lanal Cilacap terdapat obyek vital yang memiliki nilai strategis, yakni Pertamina UP IV Cilacap yang harus diberikan jaminan keamanan oleh Lanal Cilacap. Dari hasil analisa yang dilakukan maka Lanal Cilacap pada dasarnya telah melaksanakan perannya sebagai alat negara dalam pengamanan obyek vital Pertamina UP IV Cilacap yang dilaksanakan melalui sinergitas dengan *stakeholder* lainnya. Namun demikian, disarankan bahwa Lanal Cilacap di masa – masa yang akan datang diharapkan agar lebih berperan dalam mengamankan obyek vital tersebut melalui perencanaan dan intensitas sinergi yang optimal, sehingga dapat lebih menjamin keamanan obyek vital tersebut dan kawasan Samudera Hindia pada umumnya yang ada di wilayah Cilacap.

### **2.2.3. Kemampuan Lantamal Sebagai Pangkalan Awal Dalam Mendukung Penanggulangan Bencana (Studi Lantamal III Jakarta)**

Dri Suatmaji, dalam bukunya yang berjudul Kemampuan Lantamal Sebagai Pangkalan Awal Dalam Mendukung Penanggulangan Bencana (Studi Lantamal III Jakarta). Indonesia merupakan negara yang secara geografis terletak pada wilayah cincin api (*Ring of Fire*), sehingga kondisi lingkungan sangat rawan terhadap berbagai kemungkinan bencana alam seperti gunung meletus, tsunami, tanah longsor, gempa bumi, dan lain - lain. Situasi ini menuntut aksi pemerintah untuk menetapkan suatu mekanisme yang tepat dalam mengantisipasi dan menanggulangi bencana yang terjadi. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) kemudian

di bentuk untuk menangani permasalahan ini. Namun pada dasarnya, tulang punggung upaya – upaya penanggulangan bencana pada akhirnya kembali kepada TNI yang memiliki kecepatan reaksi dan sangat terorganisir. Hal ini juga sebagai salah satu bentuk manifestasi dari tugas TNI yakni melaksanakan Operasi Militer Selain Perang (OMSP).

TNI AL sebagai salah satu komponen TNI dengan kekuatan armadanya sangat memegang peran penting dalam melaksanakan pergeseran personel dan barang bantuan yang diperlukan. Dalam pelaksanaannya, pangkalan awal di mana bantuan berasal dan diorganisir, sangat berpengaruh memberikan dukungan bagi keberhasilan operasi penanggulangan bencana ini. Di sini terlihat bagaimana peran serta Lantamal III Jakarta sebagai pangkalan awal dalam melaksanakan embarkasi untuk mendukung penanggulangan bencana. Namun berdasarkan fakta yang ditemukan dengan melihat pengalaman penanggulangan bencana selama kurun waktu 2004 – 2013, peran ini belum berjalan optimal karena adanya beberapa permasalahan pada aspek Sumber Daya Manusia (SDM), organisasi, dan sarana di Lantamal III Jakarta. Oleh karena itu, penelitian yang dilakukan Dri Suatmaju bermaksud untuk mengukur tingkat kemampuan Lantamal III Jakarta dalam melaksanakan OMSP penanggulangan bencana.

Desain penelitian ini deskriptif analisis yang merupakan jenis penelitian kualitatif, berdasarkan penelitian ini didapatkan bahwa solusi praktis terhadap aspek SDM, organisasi, dan sarana dapat dilakukan dengan kesinergian *stake holder* lainnya serta penerapan manajemen yang tepat. Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka kemampuan SDM Lantamal III Jakarta dalam mendukung penanggulangan bencana alam perlu ditingkatkan melalui pelatihan dan seminar tentang bencana alam atau kegiatan lain berupa *workshop*. Kesiapan organisasi Lantamal III Jakarta dapat ditingkatkan dengan mencantumkan pernyataan khusus untuk bencana alam dalam aspek visi, misi, dan tujuan Lantamal III serta perlu

diwadahi dengan membuat struktur organisasi khusus penanganan embarkasi dan penanggulangan bencana alam di Lantamal III Jakarta.

#### **2.2.4. Kemampuan Lanal Cirebon Dalam Pengamanan Obvitnas Di Wilayah Perairan Utara Jawa Barat**

Dede Rukman, dalam bukunya yang berjudul Kemampuan Lanal Cirebon Dalam Pengamanan Obvitnas Di Wilayah Perairan Utara Jawa Barat. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Indonesia yang merupakan salah satu dari negara – negara penghasil minyak dan gas alam dunia, di mana sumber minyak dan gas (migas) nya sebagian besar berada di wilayah lautan. Kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas apabila terganggu dapat menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi negara serta terganggunya stabilitas keamanan nasional, sehingga dibutuhkan pengelolaan dan pengamanan anjungan migas secara periodik dan berkala. Beberapa permasalahan yang terjadi pada anjungan migas lepas pantai di wilayah perairan Utara Jawa Barat, baik yang masih beroperasi maupun yang sudah tidak beroperasi selain posisinya terletak pada jalur pelayaran dan daerah tangkapan ikan adalah adanya aksi pencurian di atas anjungan migas, di perairan wilayah kerja Lanal Cirebon.

Tesis ini berupaya menjawab bagaimana sesungguhnya kemampuan Lanal Cirebon dalam melaksanakan pengamanan obvitnas dengan menganalisis kondisi nyata (*existing condition*) dan faktor – faktor yang mempengaruhi. Teori yang relevan dengan penulisan tesis ini di antaranya adalah teori trinitas AL, teori AL sebagai institusi pertahanan negara matra laut, teori logistik pertahanan, dan teori dasar keamanan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain deskriptif yang diperkuat dengan studi kepustakaan dan analisis situasi yang diperoleh dari gambaran dan informasi kejadian. Informan yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah Komandan Lanal Cirebon, Perwira Pembantu (Paban) Penyelidikan (Lid) Staf Intelijen (Sintel) Lantamal III Jakarta, Perwira Pelaksana (Palaksa) Lanal Cirebon, Perwira Seksi Intelijen (Pasintel) Lanal

Cirebon, Perwira Seksi Operasi (Pasops) Lanal Cirebon, Perwira Seksi Administrasi dan Logistik (Pasminlog) Lanal Cirebon, Perwira Seksi Potensi Maritim (Paspotmar) Lanal Cirebon, Komandan Kapal Angkatan Laut (KAL) Balongan, Asisten *Manager Security* Pertamina Hulu Energi (PHE) *Offshore North West Java* (ONWJ), dan Asisten *Manager Security* Pertamina *Exploration and Production* (EP).

Hasil analisis diketahui bahwa pengamanan obvitnas anjungan migas lepas pantai di perairan Utara Jawa Barat yang dilaksanakan oleh Lanal Cirebon dilihat dari aspek kemampuan intelijen, kemampuan pertahanan, kemampuan keamanan dan kemampuan dukungan masih belum optimal. Sumber daya manusia, kuantitas dan kualitas sarana patroli, keterbatasan anggaran pengamanan merupakan faktor penghambat, sedangkan faktor yang mempengaruhi dalam menguntungkan pengamanan adalah adanya payung hukum, dukungan dari *stakeholder* dan budaya positif dari lingkungan masyarakat maritim. Solusi penyelesaian dengan optimalisasi metode : rekrutmen, pendidikan, pelatihan, penugasan, revisi, modernisasi, penelitian, dan pengembangan.

Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini ditampilkan pada tabel di bawah :

Tabel 5. Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian ini

No	Judul	Peneliti	Tahun	Persamaan	Perbedaan
1	Analisis Pengaruh Motivasi Dan Kedisiplinan Terhadap Kinerja Prajurit TNI AL Di Lanal Dumai	Tarmo	2008	1. Meneliti tentang Lanal. 2. Meneliti tentang faktor kinerja Sumber Daya Manusia (SDM).	1. Lokasi penelitian di Dumai. 2. Metode yang digunakan berupa : survei, analisis statistik deskriptif, dan statistik.
2	Peran Lanal Dalam Pengamanan Obvitnas Di Kawasan Selatan Pulau Jawa (Studi Wilayah Kerja Lanal Cilacap)	Imam Supriyatno	2014	1. Meneliti tentang pengamanan Obvitnas oleh Lanal. 2. Metode yang digunakan deskriptif dengan pendekatan kualitatif.	1. Lokasi penelitian di Cilacap. 2. Obvitnas berupa Pertamina UP IV Cilacap.
3	Kemampuan Lantamal Sebagai Pangkalan Awal Dalam Mendukung Penanggulangan Bencana (Studi Lantamal III Jakarta)	Dri Suatmaji	2014	1. Meneliti tentang Lantamal. 2. Metode penelitian kualitatif dengan desain deskriptif analisis.	1. Meneliti kemampuan Lantamal dalam mendukung penanggulangan bencana. 2. Lokasi penelitian di Jakarta.
4	Kemampuan Lanal Cirebon Dalam Pengamanan Obvitnas Di Wilayah Perairan Utara Jawa Barat	Dede Rukman	2016	1. Meneliti tentang pengamanan Obvitnas oleh Lanal. 2. Metode penelitian kualitatif dengan desain deskriptif.	1. Lokasi penelitian di Cirebon. 2. Obvitnas berupa anjungan migas lepas pantai.

Diolah dari Berbagai Sumber

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Penelitian ini mengkaji masalah tentang strategi pengamanan Obvitnas berupa pelabuhan dan area sekitarnya yang berlokasi di wilayah perairan Selatan Sumatera Barat oleh Lantamal II Padang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain deskriptif, yaitu penelitian yang memberi gambaran secara cermat mengenai individu atau kelompok tertentu tentang keadaan dan gejala yang terjadi. Selanjutnya peneliti akan memberikan gambaran dengan secara cermat tentang fenomena yang terjadi mengenai sistem pengamanan terhadap Obvitnas yang dilaksanakan oleh Lantamal II Padang, khususnya pada aspek laut.

Menurut Koentjaningrat (1993), penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya motivasi, perilaku, tindakan, persepsi, dan lain – lain (dll), secara menyeluruh. Penelitian ini memanfaatkan metode alamiah, dan menghasilkan data deskriptif berupa kata – kata tertulis atau lisan dari orang – orang dan perilaku yang dapat diamati. Selanjutnya Moleong (2007) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah, dengan menggunakan metode alamiah, dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah.

Rancangan penelitian studi kasus dilakukan pada banyak bidang, khususnya evaluasi, di mana peneliti mengembangkan analisis mendalam atas suatu kasus, sering kali aktivitas, peristiwa, proses, program, atas satu individu atau lebih. Kasus – kasus dibatasi oleh aktivitas waktu dan, dan peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap berdasarkan waktu yang telah ditentukan dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data (Stake, 1995). Penelitian kualitatif bertujuan memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan manusia yang diteliti. Penelitian kualitatif berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat, atau kepercayaan orang yang diteliti dan kesemuanya tidak dapat diukur dengan angka. Sehingga peneliti memilih menggunakan metode penelitian kualitatif

untuk menentukan cara mencari, mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis interaksi sosial tentang faktor yang dapat berpengaruh terhadap strategi Lantamal II Padang dalam mengamankan Obvitnas berupa Pelabuhan Teluk Bayur dan area sekitarnya yang berada di perairan Selatan Sumatera Barat.

### 3.1. Tempat Dan Waktu Penelitian

#### 3.1.1. Tempat Penelitian

Terdapat beberapa instansi dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai tempat penelitian yaitu Lantamal II Padang dan Pelabuhan Teluk Bayur.

#### 3.1.2. Waktu Penelitian

Waktu yang direncanakan untuk melakukan penelitian ini dirinci dalam tabel di bawah :

Tabel 6. Jadwal Penelitian

Kegiatan	Waktu (Tahun 2018)							
	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Jan
Pengumpulan data awal penelitian								
Pembuatan proposal tesis								
Bimbingan proposal tesis								
Sidang Proposal tesis								
Revisi proposal tesis								
Pengumpulan dan pengolahan data penelitian								
Penyusunan temuan penelitian								
Konsultasi dan bimbingan								
Sidang tesis								
Revisi tesis								

### **3.2. Subyek Dan Sampel Penelitian**

Subyek dan sampel penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah :

#### **3.2.1. Subyek Penelitian**

Subyek penelitian merupakan tempat di mana data untuk variabel penelitian diperoleh (Arikunto, 2005). Subyek penelitian ini merupakan orang, tempat, atau benda yang diamati dalam rangka sebagai tujuan atau sasaran (Kamus Besar Bahasa Indonesia), terutama dalam menjelaskan permasalahan penelitian yang berkaitan dengan strategi Lantamal II Padang dalam mengamankan Obvitnas berupa Pelabuhan Teluk Bayur dan area sekitarnya yang berada di perairan Selatan Sumatera Barat serta faktor yang mempengaruhinya. Institusi yang dijadikan sebagai subyek penelitian adalah Lantamal II Padang dan Pelabuhan Teluk Bayur.

#### **3.2.2. Sampel Penelitian**

Sampel penelitian merupakan obyek permasalahan yang diteliti. Menurut Sugiyono (2012), obyek penelitian adalah suatu atribut dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Supranto (2000) mengungkapkan bahwa obyek penelitian adalah himpunan elemen yang dapat berupa orang, organisasi atau barang yang akan diteliti. Kemudian dipertegas oleh Dajan (1986) bahwa obyek penelitian adalah pokok persoalan yang hendak diteliti untuk mendapatkan data secara lebih terarah.

Penelitian ini memiliki sampel penelitian yang terdiri dari para narasumber yang berkompeten dalam menjawab permasalahan penelitian, yaitu :

- a) Komandan Lantamal (Danlantamal) II Padang.
- b) Wakil Komandan (Wadan) Lantamal II Padang.
- c) Asisten Intelijen (Asintel) Lantamal II Padang.
- d) Asisten Operasi (Asops) Lantamal II Padang.

- e) Asisten Logistik (Aslog) Lantamal II Padang.
- f) Asisten Personel (Aspers) Lantamal II Padang.
- g) Asisten Potensi Maritim (Aspotmar) Lantamal II Padang.
- h) Perwira Pelaksana (Palaksa) KRI Cakalang.
- i) Kepala Divisi Navigasi dan Komunikasi (Kadisnavkom) KRI Kala Hitam.
- j) Komandan Kapal Angkatan Laut (KAL) Sinyaru.
- k) Bagian Hukum dan Pengendalian Internal PT. Pelindo II unit Pelabuhan Teluk Bayur.

### **3.3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data dalam suatu penelitian. Pada penelitian kali ini peneliti memilih jenis penelitian kualitatif agar dapat diperoleh data yang mendalam, jelas, dan spesifik. Selanjutnya bahwa pengumpulan data dapat diperoleh dari hasil observasi, dokumentasi, komunikasi personal, dan gabungan/triangulasi.

#### **3.3.1. Observasi**

Observasi adalah pengamatan terhadap aktivitas individu atau obyek lain yang diselidiki dengan sengaja dan sistematis. Adapun jenis – jenis observasi tersebut di antaranya yaitu observasi partisipan, observasi terstruktur, observasi non partisipan, dan observasi tidak restruktur (Kusuma, 1987). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode observasi partisipan. Observasi partisipan yaitu suatu teknik pengamatan di mana peneliti ikut ambil bagian dalam kegiatan yang dilakukan oleh obyek yang diselidiki. Observasi ini dilakukan dengan mengamati dan mencatat langsung terhadap obyek penelitian, yaitu dengan mengamati kegiatan pengamanan yang dilakukan Lantamal II Padang terhadap Obvitnas, sehingga peneliti dapat menentukan narasumber yang akan diteliti, sekaligus data jabatan, kegiatan, alamat, dan no telepon sehingga mudah mendapatkan informasi.

### **3.3.2. Studi Kepustakaan**

Studi kepustakaan dalam penelitian kualitatif bertujuan untuk menyajikan perbandingan antara kajian terdahulu dengan hasil akhir penelitian. Hal ini berbeda dengan penelitian kuantitatif yang menggunakan tinjauan pustaka sebagai justifikasi untuk memulai penelitian yang berbasis pengujian dan pengukuran. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari buku – buku teks, literatur, dan makalah ilmiah, serta dokumen yang terkait di bidang pengamanan. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen yang digunakan peneliti di sini berupa data – data mengenai sistem pengamanan terhadap Obvitnas pada aspek laut yang di fokuskan kepada Lantamal II Padang.

### **3.3.3. Wawancara Mendalam**

Wawancara mendalam bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang rumit, berisi pendapat, sikap, dan pengalaman pribadi (Sulistyo dan Basuki, 2006). Untuk itu, peneliti melaksanakan komunikasi personal dengan narasumber sebagai upaya mendapatkan data dari para narasumber. Menurut Mashud (2011), komunikasi personal dapat diartikan sebagai cara yang dipergunakan untuk mendapatkan informasi (data) dari responden dengan cara bertanya langsung secara bertatap muka.

Peneliti melakukan teknik *purposive sampling* guna menentukan sampel komunikasi personal. Pendekatan ini memiliki karakteristik didasarkan sifat – sifat tertentu yang diperkirakan mempunyai sangkut paut dengan ciri – ciri atau sifat – sifat yang ada dalam populasi yang sudah diketahui sebelumnya (Narbuko dan Achmadi, 2012). Yang dimaksud dengan sifat – sifat tertentu dalam *purposive sampling* yakni pihak – pihak yang terkait dengan pelaksanaan pengamanan Pelabuhan Teluk Bayur di Perairan Selatan Sumatera Barat.

### **3.4. Pemeriksaan Keabsahan Data**

Pemeriksaan keabsahan data melalui dokumentasi dan referensi selama penelitian. Data – data yang diolah perlu dibuktikan kebenarannya,

maka dokumentasi berupa foto, rekaman wawancara, dan histori email (jika ada) merupakan bukti bahwa penelitian ini benar – benar dilakukan. Selanjutnya bahwa pemeriksaan keabsahan data dapat diperoleh dari hasil gabungan/triangulasi dari metode observasi, dokumentasi, dan komunikasi personal.

### **3.5. Teknik Analisis Data**

Analisis data kualitatif menggunakan tiga jenis teknik, yaitu : reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

- a. Reduksi tidak perlu diartikan sebagai kuantifikasi data. Reduksi data bertujuan untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil.
- b. Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif (berbentuk bagan, catatan lapangan, grafik, jaringan, dan matriks).
- c. Penarikan kesimpulan adalah hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan.

Proses analisis data kualitatif mendasarkan pada adanya hubungan semantis antar variabel yang diteliti. Tujuan analisis data kualitatif yaitu agar peneliti mendapatkan makna hubungan variabel – variabel sehingga dapat digunakan untuk menjawab masalah yang dirumuskan dalam penelitian. Hubungan antar semantis sangat penting karena dalam analisis kualitatif, peneliti tidak menggunakan angka – angka seperti pada analisis kuantitatif. Prinsip pokok teknik analisis data kualitatif ialah mengolah dan menganalisis data – data yang terkumpul menjadi data yang mempunyai makna, teratur, sistematis, dan terstruktur (Sutopo dan Arief, 2010).

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah – milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, menyintesiskannya, mencari dan

menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Berdasarkan definisi di atas, disimpulkan bahwa langkah awal dari analisis data adalah mengumpulkan data yang ada, menyusun secara sistematis, kemudian mempresentasikan hasil penelitiannya kepada orang lain.

Abstraksi yang sudah dibuat dalam bentuk satuan – satuan yang kemudian dikelompokkan dengan berdasarkan taksonomi dari domain penelitian. Analisis domain adalah memperoleh gambaran yang umum dan menyeluruh dari obyek/penelitian atau situasi sosial. Peneliti memperoleh domain ini dengan cara melakukan pertanyaan *grand* dan *minitour*. Domain akan berfungsi sebagai pijakan untuk penelitian selanjutnya. Mengenai analisis taksonomi yaitu dengan memilih domain kemudian dijabarkan menjadi lebih terinci, sehingga dapat diketahui struktur internalnya.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Hasil Penelitian**

##### **4.1.1. Data Penelitian**

Pengumpulan data – data yang dilakukan dalam penelitian kualitatif ini diperoleh dari hasil observasi, dokumentasi, komunikasi personal dan gabungan/triangulasi, sehingga diharapkan mendapatkan hasil data – data yang mendalam, jelas, dan spesifik, sebagai bahan untuk melakukan analisis. Observasi yang dilakukan berupa observasi partisipan, di mana peneliti ikut ambil bagian dalam kegiatan yang dilakukan oleh obyek yang diselidiki dengan mengamati dan mencatat langsung terhadap obyek penelitian di perairan Padang, yaitu Pelabuhan Teluk Bayur, strategi TNI AL di Lantamal II Padang dalam melaksanakan kegiatan pengamanan, serta ancaman aktual dan potensial di perairan sekitar Pelabuhan Teluk Bayur. Studi kepustakaan dilakukan dengan mempelajari buku – buku teks, literatur dan makalah ilmiah, serta dokumen terkait sistem pengamanan terhadap Obvitnas pada aspek laut, di antaranya Petunjuk Sumber dimaksud seperti Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Pengamanan Obvitnas, Prosedur Tetap (Protap) Pengamanan, buku – buku tentang pengamanan, jurnal ilmiah, dan sumber – sumber lainnya.

Komunikasi personal dilakukan dengan para narasumber praktisi yang berkecimpung dalam kegiatan pengamanan Pelabuhan Teluk Bayur. Antara lain Danlantamal II Padang, Wadan Lantamal II Padang, Asintel Lantamal II Padang, Asops Lantamal II Padang, Aslog Lantamal II Padang, Aspers Lantamal II Padang, Aspotmar Lantamal II Padang, Palaksa KRI Cakalang, Kadisnavkom KRI Kala Hitam, Komandan KAL Sinyaru, dan Bagian Hukum dan Pengendalian Internal PT. Pelindo II unit Pelabuhan Teluk Bayur. Sesuai teori Konsep dasar keamanan yang telah disampaikan sebelumnya, bahwa menurut G. Manunta (1997) komponen – komponen

keamanan terdiri dari aset (*asset*), pelindung (*protector*), dan ancaman (*threat*). Untuk itu akan dijelaskan lebih lanjut terkait aset berupa Pelabuhan Teluk Bayur, pelindung berupa strategi pengamanan Lantamal II Padang, dan ancaman aktual maupun potensial terhadap Pelabuhan Teluk Bayur.

#### **4.1.1.1. Gambaran Umum Pelabuhan Teluk Bayur (Asset)**

Pelabuhan adalah sebuah fasilitas di ujung Samudera, sungai, atau danau untuk menerima kapal dan memindahkan barang kargo maupun penumpang ke dalamnya. Pelabuhan juga merupakan suatu pintu gerbang untuk masuk ke suatu daerah tertentu dan sebagai prasarana penghubung antar daerah, antar pulau, bahkan antar negara (Triatmodjo, 2009). Adapun yang menjadi obyek penelitian adalah Pelabuhan Teluk Bayur yang berlokasi di Perairan Selatan Provinsi Sumatera Barat yang dikelola oleh PT. Pelindo II.



Gambar 6. Peta Pelabuhan Teluk Bayur  
Sumber : Bagian Hukum dan Pengendalian Internal PT. Pelindo II unit  
Pelabuhan Teluk Bayur, 2018

Pelabuhan Teluk Bayur dibangun sejak zaman kolonial Belanda antara tahun 1888 – 1893 di Kota Padang. Pelabuhan ini merupakan

pelabuhan Samudera yang terbuka untuk kegiatan perdagangan internasional. Pelabuhan Teluk Bayur merupakan gerbang perekonomian Indonesia bagian barat untuk tujuan ekspor ke India serta kawasan Timur Tengah. Pelabuhan Teluk Bayur termasuk ke dalam wilayah kerja Lantamal II Padang, sehingga dalam sektor pengamanannya sebagai Obvitnas PT. Pelindo II bekerja sama dengan Lantamal II Padang (Indra, 2018).

#### **4.1.1.2. Gambaran Umum Ancaman di Perairan Barat Pulau Sumatera (*Threat*)**

Pulau Sumatera merupakan salah satu pulau di Indonesia yang memiliki posisi sangat strategis. Secara geografis Perairan Barat Pulau Sumatera merupakan perairan lepas yang langsung berbatasan dengan Samudera Hindia, sehingga perairan ini digunakan sebagai alur pelayaran bagi kapal – kapal laut yang masuk dan keluar wilayah Indonesia. Apabila terjadi ancaman serius di wilayah perairan tersebut, sudah barang tentu akan mengganggu stabilitas keamanan nasional, khususnya pada sektor perekonomian.

Berdasarkan Peraturan Kepala Staf AL (Kasal) No Perkasal/36/VI/2011 tanggal 21 Juni 2011 tentang Buku Petunjuk Induk Pembinaan Bidang Operasi (PUM – 5), yang dimaksud dengan ancaman non militer, adalah ancaman yang berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan yang berkembang, pada eskalasi tertentu dapat mengganggu stabilitas nasional yang pada akhirnya akan mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa. Salah satu bentuk ancaman non militer adalah gangguan/ancaman keamanan terhadap Obvitnas yang bersifat strategis. Contohnya seperti kegiatan sabotase yang dilakukan oleh pihak – pihak tertentu terhadap Obvitnas yang bersifat strategis dan instalasi strategis lainnya dengan tujuan mengganggu/melumpuhkan fungsinya, sehingga dapat mengganggu stabilitas nasional.

Bagi bangsa Indonesia, laut dan perairan yang secara alami sudah menjadi lingkungan kehidupan, mempunyai makna dalam berbagai aspek sebagai berikut :

- a. Media pemersatu bangsa
- b. Media perhubungan
- c. Media penggalan sumber daya alam
- d. Media pertahanan (Soebijanto, 2006).

Pemanfaatan sumber daya alam di laut di samping untuk memenuhi kebutuhan pangan, energi dan bahan baku, juga untuk perluasan lapangan kerja dan peningkatan devisa negara, sehingga berpotensi menimbulkan konflik. Beberapa gambaran ancaman faktual dan ancaman potensial yang dapat terjadi di wilayah Perairan Barat Pulau Sumatera yang dapat berpengaruh terhadap stabilitas keamanan, diuraikan sebagai berikut :

a. Tindakan Kekerasan di Laut

- 1) Perairan Barat Sumatera termasuk kawasan yang rawan terjadinya bentrokan nelayan di mana sering terjadi gesekan antara nelayan tradisional dengan nelayan *trawl* walaupun daerah asalnya sama. Hal ini diduga karena motif politik.

b. Tindakan Pelanggaran Hukum di Laut

- 1) Penyebaran Narkoba yang dilakukan melalui Samudera Hindia bisa mendarat di Provinsi Sumatera Barat, namun sampai saat ini belum ditemukan secara signifikan.
- 2) Penangkapan ikan dengan menggunakan peralatan yang tidak sesuai (*illegal fishing*) seperti bahan peledak dan *trawl*, paling banyak di daerah Sibolga dan Bengkulu (Sulaeman, 2018).
- 3) Turis – turis asing yang dicurigai sebagai imigran gelap di pulau – pulau terluar perairan wilayah kerja Lantamal II Padang (Indra, 2018).

c. Ancaman Navigasi

Perairan yang berada di wilayah kerja Lantamal II Padang memiliki kekayaan perikanan dan kelautan yang berlimpah untuk di eksploitasi. Perairan wilayah kerja Lantamal II Padang juga berada di jalur pelayaran

antar pulau, sehingga banyak kegiatan dan kepentingan yang membuat lalu lintas pelayaran menjadi ramai dan menyebabkan banyaknya ancaman navigasi yang ditimbulkan akibat kepentingan atau kegiatan tersebut di samping ancaman navigasi yang ditimbulkan oleh bencana alam seperti kecelakaan kapal di laut. Ancaman navigasi yang disebabkan oleh bencana alam di perairan wilayah kerja Lantamal II Padang berupa ombak besar dan cuaca buruk (Suryo, 2018).



Gambar 7. Gambaran Umum Ancaman di Perairan Barat Pulau Sumatera  
Sumber : Asintel Lantamal II Padang, 2018

Keamanan laut bukan hanya menyangkut penegakan hukum di laut semata, melainkan bagaimana mewujudkan laut menjadi wilayah yang aman digunakan oleh pengguna dan bebas dari ancaman atau gangguan terhadap berbagai aktivitas penggunaan dan pemanfaatan laut, yaitu :

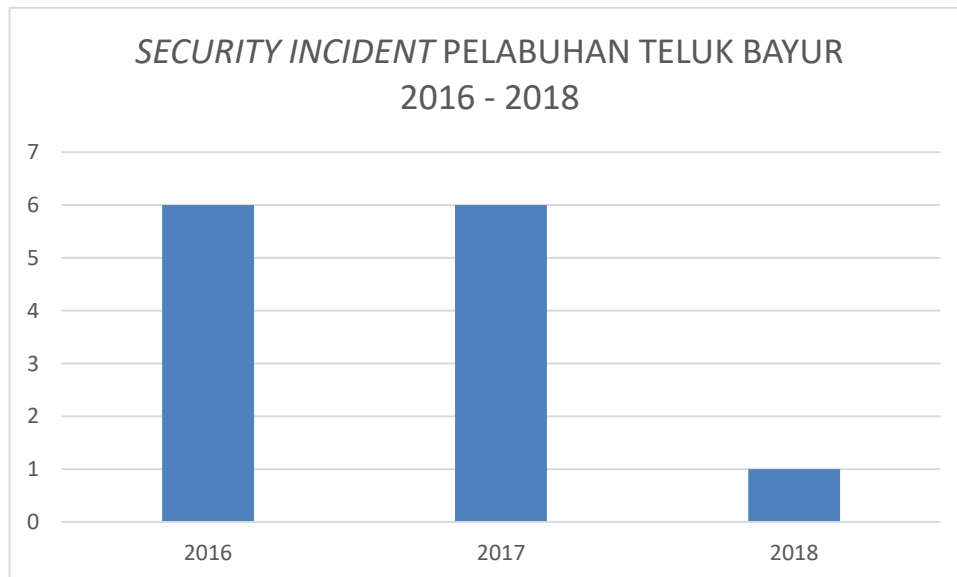
- a. Laut yang bebas dari ancaman kekerasan (*free from violence threat*), termasuk ancaman penggunaan kekuatan bersenjata yang dinilai mempunyai kemampuan untuk mengganggu dan membahayakan kedaulatan negara. Ancaman tersebut dapat berupa perompakan, sabotase obyek vital, peranjauan, dan aksi teror bersenjata.

- b. Laut yang bebas dari ancaman pelanggaran hukum (*free from law transgression threat*), yaitu pelanggaran terhadap hukum nasional dan internasional yang berlaku seperti *illegal logging*, dan *illegal fishing*.
- c. Laut yang bebas dari pencemaran dan perusakan ekosistem (*free from natural resources tribulation*), yaitu ancaman terhadap kelestarian lingkungan yang dampaknya merugikan bagi masyarakat sekitar dan juga generasi penerus. Fakta menunjukkan bahwa konflik pengelolaan sumber daya laut memiliki kecenderungan mudah dijadikan isu politik dan selanjutnya diikuti dengan penggelaran kekuatan militer asing.
- d. Laut yang bebas dari ancaman terhadap navigasi, yaitu ancaman yang ditimbulkan oleh kondisi geografi dan hidrografis, serta kurang memadainya sarana bantu navigasi serta informasi pelayaran, sehingga dapat membahayakan keselamatan pelayaran (Markas Besar TNI AL, 2002).

Ancaman di wilayah Pelabuhan Teluk Bayur sendiri berupa ancaman pencurian, yang biasanya dilakukan pada waktu dini hari pada saat penjagaan lengah. Aset yang dicuri biasanya berupa besi – besi bekas yang akan dijual oleh pihak Pelabuhan Teluk Bayur, akan tetapi tidak pernah terjadi dalam skala besar. Kerugian yang di alami oleh PT. Pelindo II unit Pelabuhan Teluk Bayur setiap adanya tindak pencurian nominalnya selalu berada di bawah nilai Rp. 5.000.000,-. Kasus pencurian di atas kapal yang sedang, telah, dan akan bersandar di Pelabuhan Teluk Bayur juga pernah terjadi. Akan tetapi frekuensi terjadinya sangat jarang sekali, yaitu satu kali dalam satu tahun.

Pihak Pelabuhan Teluk Bayur merekomendasikan kepada pihak kapal – kapal yang menjadi korban pencurian untuk melapor kepada pihak berwajib. Jika pencurinya tertangkap, pihak Pelabuhan Teluk Bayur akan membawa pelaku ke pihak kepolisian. Akan tetapi pencuri tidak pernah diproses lebih lanjut dan selalu dibebaskan karena hanya melakukan tindak pidana ringan. Ancaman kegiatan sabotase yang dilakukan oleh kelompok teroris terhadap Pelabuhan Teluk Bayur juga tidak pernah terjadi (Santoso,

2018). Berikut disajikan grafik *Security Incident* Periode 2016 s/d 2018 di Pelabuhan Teluk Bayur, di mana dalam periode ini menunjukkan angka kejadian *Security Incident* yang stabil di tahun 2016 – 2017 dan adanya penurunan angka kejadian *Security Incident* di tahun 2017 – 2018 :



Gambar 8. Grafik *Security Incident* Pelabuhan Teluk Bayur 2016 – 2018  
Sumber : Hasil Komunikasi Personal (Telah diolah Kembali), 2018

#### 4.1.1.3. Gambaran Lantamal II Padang (*Protector*)

Lantamal II Padang merupakan pemekaran dari Lanal Kelas B Teluk Bayur karena adanya perkembangan tuntutan kebutuhan peningkatan keamanan, khususnya di wilayah perairan nasional dan untuk mendukung strategi pertahanan laut nasional. Hal ini bertujuan dalam rangka pengendalian laut di kawasan strategis bagian barat Pulau Sumatera dan untuk meningkatkan kemampuan Lanal dalam mendukung satuan operasi di kawasan ini. Ketika masih berstatus sebagai Lanal, administratif dan pembinaannya berada di bawah Lantamal I.

Lantamal II Padang berkedudukan di Jalan Tanjung Priok Bukit Peti Peti Teluk Bayur Padang dengan Komandan Laksamana Pertama (Laksma) TNI Agus Sulaeman, M. Sc.. Setelah dilaksanakan peresmian berdirinya Lantamal II Padang, maka administratif dan pembinaan beralih dari Lantamal I kepada Komando Armada 1. Seiring dengan pemekaran organisasi, gedung pekantoran yang lama di Jalan Sutan Syahrir Bukit

Putus Teluk Bayur Padang digunakan sebagai gedung perkantoran untuk beberapa Satuan Kerja (Satker) Lantamal II Padang termasuk Batalion Marinir Pertahanan Pangkalan (Yonmarhanlan) II Padang.



Gambar 9. Peta Wilayah Kerja dan Gelar Pos Lantamal II Padang  
Sumber : Asintel Lantamal II Padang, 2018

Lantamal II Padang juga memiliki peran dan fungsi pangkalan sebagaimana umumnya, yaitu sebagai tempat penangkalan, pembekalan, penyelenggaraan pemeliharaan dan perbaikan unsur – unsur operasional TNI AL serta perawatan personel (rekreasi). Kemampuan pangkalan dipengaruhi oleh berbagai faktor dalam melaksanakan fungsi dan perannya, faktor – faktor yang perlu mendapat perhatian di antaranya adalah jumlah peralatan, terutama Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista), personel yang memiliki kemampuan, sarana dan prasarana pendukung serta peralatan pertahanan lainnya yang sesuai dengan perkembangan teknologi (Sulaeman, 2018).

Kegiatan tugas pokok yang dilaksanakan oleh Lantamal II Padang meliputi :

- a. Mendukung logistik unsur KRI/Pesawat udara (Pesud) dan personel yang singgah di Lantamal II Padang, meliputi fasilitas : bekal ulang

Bahan Bakar Minyak (BBM), Bahan Basah (Makanan), dan Air Tawar, akomodasi, rekreasi, dan perawatan bagi personel yang sakit (Lasmono, 2018).

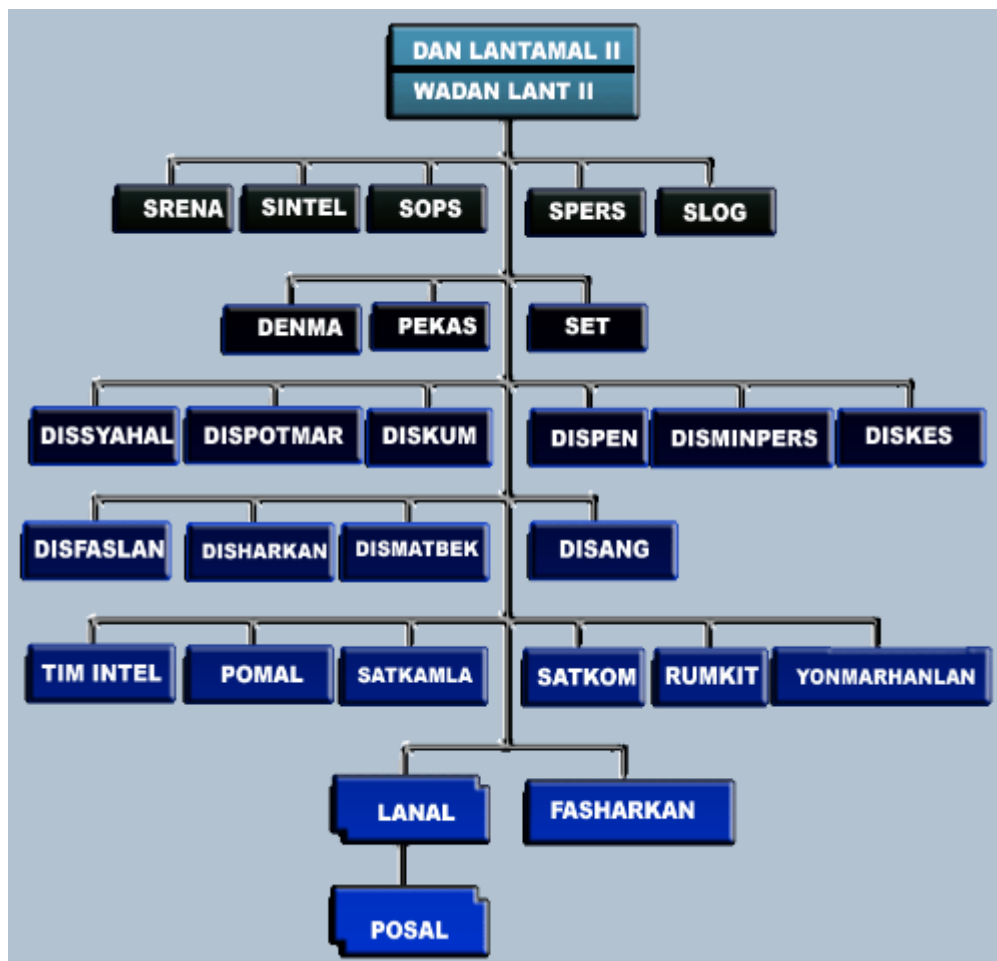


Gambar 10. Markas Komando (Mako) Lantamal II Padang  
Sumber : Dokumentasi Pribadi Peneliti, 2018

- b. Pembinaan Potensi Nasional Kekuatan Maritim, yang dilakukan secara rutin setiap tahun antara lain :
- 1) Melaksanakan kegiatan pembinaan desa – desa khususnya di daerah pesisir, dengan mengenalkan konsep negara maritim agar mereka berorientasi ke laut, sehingga bisa berdaya guna untuk kepentingan Lantamal II Padang, yaitu memberdayakan wilayah pertahanan di laut dari wilayah kerjanya sebagai upaya deteksi dini dengan menjadi mata dan telinga TNI AL.
  - 2) Melaksanakan penyuluhan untuk membangun kesadaran bagi masyarakat nelayan agar menaati peraturan dalam menangkap ikan dengan ramah lingkungan dan penyuluhan tentang keselamatan pelayaran serta pembinaan peningkatan kegiatan ekonomi.
  - 3) Melaksanakan pertemuan bulanan (*coffee morning*) seluruh *stakeholder* maritim di wilayah kerja Lantamal II Padang. Instansi tuan rumah dari pertemuan bulanan ini dilakukan secara bergilir.
  - 4) Membantu Kementerian Pertahanan (Kemhan) dalam melaksanakan sosialisasi Bela Negara melalui kegiatan komunikasi sosial tentang

ketahanan wilayah laut nasional di sekolah – sekolah dengan kegiatan pramuka, serta pembinaan pemuda – pemuda maritim dan remaja bahari.

- 5) Melaksanakan kegiatan bakti TNI AI, bakti Markas Besar TNI, serta bakti Kemhan. Kegiatan bakti fisik seperti TNI masuk desa untuk membangun dan memperbaiki infrastruktur dan bedah rumah penduduk. Kegiatan bakti non fisik seperti bersih pantai, pengobatan dan sunatan massal yang dilakukan secara masif (Sumarto, 2018).



Gambar 11. Struktur Organisasi Lantamal II Padang  
Sumber : Lantamal II Padang, 2017

Organisasi Lantamal II Padang disusun dalam dua tingkat, yaitu : Tingkat Mako Lantamal II Padang dan Tingkat Pelaksana Lantamal II Padang.

- a. Tingkat Mako Lantamal II Padang disusun dalam Tiga Unsur sebagai berikut :
- 1) Eselon Pimpinan, yaitu Danlantamal II Padang.
  - 2) Eselon Asisten/Pembantu Pimpinan, terdiri atas :
    - a) Wadan Lantamal II Padang.
    - b) Asisten Staf Lantamal II Padang, terdiri atas :
      1. Asisten Perencana (Asrena) Lantamal II Padang.
      2. Asintel Lantamal II Padang.
      3. Asops Lantamal II Padang.
      4. Aspers Lantamal II Padang.
      5. Aslog Lantamal II Padang.
      6. Aspotmar Lantamal II Padang.
  - 3) Eselon Pelayanan, terdiri atas :
    - a) Komandan Detasemen Markas (Dandenma) Lantamal II Padang.
    - b) Pemegang Kas (Pekas) Lantamal II Padang.
    - c) Kepala Sekretariat (Kaset) Lantamal II Padang.
- b. Tingkat Pelaksana Lantamal II Padang disusun dalam Dua Unsur sebagai berikut :
- 1) Unsur Pelaksana, terdiri atas :
    - a) Dinas Kesyahbandaran AL (Dissyahal) Lantamal II Padang.
    - b) Dinas Potensi Maritim (Dispotmar) Lantamal II Padang.
    - c) Dinas Hukum (Diskum) Lantamal II Padang.
    - d) Dinas Penerangan (Dispen) Lantamal II Padang.
    - e) Dinas Administrasi Personel (Disminpers) Lantamal II Padang.
    - f) Dinas Kesehatan (Diskes) Lantamal II Padang.
    - g) Dinas Fasilitas Pangkalan (Disfaslan) Lantamal II Padang.
    - h) Dinas Material dan Perbekalan (Dismatbek) Lantamal II Padang.
    - i) Dinas Angkutan (Disang) Lantamal II Padang.
  - 2) Unsur Satuan Pelaksana, terdiri atas :
    - a) Tim Intelijen (Intel) Lantamal II Padang.
    - b) Polisi Militer AL (Pomal) Lantamal II Padang.

- c) Satuan Keamanan Laut (Satkamla) Lantamal II Padang.
- d) Satuan Komunikasi (Satkom) Lantamal II Padang.
- e) Rumah Sakit (Rumkit) Lantamal II Padang.
- f) Yonmarhanlan II Padang.
- g) Lanal.
- h) Fasilitas Pemeliharaan dan Perbaikan (Fasharkan).
- i) Pos AL (Posal).

Dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok, Mako Lantamal II Padang menggunakan beberapa fasilitas maupun sarana yang dimiliki oleh instansi lain maupun milik Lantamal II Padang, yaitu :

- a. Fasilitas Pelabuhan (Faslabuh). Lantamal II Padang memiliki faslabuh yang berada di Pelabuhan Perikanan Bungus Padang dengan panjang dermaga 50 m dan lebar dermaga 8 m dengan kedalaman 12 m dan daya labuh 200 ton. Faslabuh ini bisa menampung 4 KRI yang dimiliki oleh Lantamal II Padang, yaitu KRI Cakalang, KRI Kala Hitam, KRI Kelabang, dan KRI Kurau. Akan tetapi jika ada KRI lain yang berukuran besar (+75 m) mengunjungi Lantamal II Padang, maka Lantamal II Padang memanfaatkan Faslabuh milik PT. Pelindo II unit Pelabuhan Teluk Bayur.
- b. Lapangan Terbang. Untuk pesud TNI AL yang memerlukan dukungan fasilitas lapangan terbang di Padang disiapkan di Lanud TNI AU Tabing. Akan tetapi bagi pesud yang berukuran besar disiapkan di Bandara Internasional Minangkabau Kabupaten Padang Pariaman. Mako Lantamal II Padang sendiri juga memiliki Helipad bagi Helicopter yang ingin melakukan aktivitasnya.
- c. Fasilitas Pengisian BBM. Lantamal II Padang sendiri belum memiliki fasilitas pengisian BBM, bagi unsur yang memerlukan dukungan BBM didukung melalui Surat Perintah Pelaksanaan (SPP) Pengambilan BBM dan Pelumas yang telah ditunjuk oleh Pertamina (Susilo, 2018).
- d. Sarana Patroli. Sarana Patroli yang dimiliki oleh Lantamal II Padang adalah :
  - 1) 4 KRI, yaitu :

- KRI Cakalang dengan panjang 43,25 m, kondisi siap.
  - KRI Kala Hitam dengan panjang 56,73 m, kondisi siap.
  - KRI Kelabang dengan panjang 56,79 m, kondisi tidak siap karena sedang melaksanakan docking di PT. Palindo Marine Ship Yard Batam.
  - KRI Kurau dengan panjang 45,5 m, kondisi tidak siap karena sedang melaksanakan docking di PT CMS Banten.
- 2) KAL Sinyaru dengan panjang 28 m, kondisi tidak siap karena ada kerusakan *gear box* I & II.
- 3) 4 Kapal Patroli Keamanan Laut (Patkamla), yaitu :
- Patkamla Bungus dengan panjang 12 m, kondisi tidak siap karena sedang melaksanakan perbaikan *medium overhaul*.
  - Patkamla Marak dengan panjang 8 m, kondisi siap.
  - Patkamla Pulau Harapan, kondisi siap.
  - Patkamla Pulau Pelangi, kondisi siap.
- 4) Sea Rider dengan panjang 7,5 m, kondisi siap.

Tabel 7. Daftar Pemeriksaan Kapal oleh unsur Lantamal II Padang Periode 2015 sampai dengan 2017

<b>Nama Unsur</b>	<b>KM</b>	<b>TB</b>	<b>Jumlah</b>
KAL Sinyaru	18	1	19
Patkamla Bungus	18	1	19
Patkamla Marak	37	6	43
Patkamla Pulau Harapan	49	1	50
Patkamla Pulau Pelangi	71	4	75
Patkamla Pulau Sao (Non Aktif)	15	2	17
Sea Rider	3	3	6
<b>Jumlah</b>	<b>211</b>	<b>18</b>	<b>229</b>

Sumber : Satuan Patroli Lantamal II Padang, 2018

Tabel 8. Daftar Kunjungan unsur ke Lantamal II Padang Periode 2016 sampai dengan 2018

<b>KRI</b>	KRI ABN – 503
	KRI ARN – 903
	KRI BAC – 593
	KRI BKD – 633
	KRI BSC – 945
	KRI CND – 375

	KRI DWR
	KRI FKO – 368
	KRI HLS – 630
	KRI IBL – 383
	KRI KKP – 811
	KRI KRP – 812
	KRI LSR – 924
	KRI MKS – 590
	KRI NALA – 363
	KRI OWA – 354
	KRI PTM – 371
	KRI PTS – 384
	KRI RGL – 923
	KRI SHN – 366
	KRI SHS – 990
	KRI SIM – 367
	KRI SPT – 923
	KRI SRE – 386
	KRI SRG – 911
	KRI SRI – 352
	KRI SSA – 378
	KRI STO – 377
	KRI SUR – 645
	KRI SWR – 646
	KRI TBN – 520
	KRI TCB – 532
	KRI TDK – 631
	KRI TGK – 531
	KRI TOK – 629
	KRI TRT – 509
	KRI TSB – 544
	KRI TSG – 536
	KRI TUM – 385
	KRI USH – 359
	KRI YOS – 353
<b>KAL</b>	KAL Nirwana 01
	KAL Nirwana 03
<b>Patkamla</b>	Patkamla Teluk Dalam II-2-14
<b>MV</b>	MV Oceanna 9

<b>Kapal Asing</b>	Admiral Vinogradov (RUS)
	BNS Somudra Avijan (BLD)
	Changxingdo (CHN)
	Dreger (PNG)
	Faty Krylov (RUS)
	Fos Vandemeire (FRA)
	HMAS Anzac (AUS)
	HTMS Narathiwat (THA)
	INS Sumedha (IND)
	Irkut (RUS)
	JS ISE (JPN)
	KD Kelantan (MAL)
	KD Mahawangsa (MAL)
	KDB Darutaqwa (BRN)
	Khanhoa (VIE)
	Moresby (PNG)
	RNOV Al Naasir
	RSS Tinaciouse (SIN)
	SLNS Samudura (SRL)
	USNS Mercy (USA)
USS Stockdale (USA)	
Weifang (CHN)	
<b>Pesud</b>	Heli HU – 417
	Heli NBO 105/NV – 409
	Pesud Cassa P862
	Pesud NV – 408
	Pesud NV – 412
	Pesud P – 852
	Pesud P – 861
	Pesud U – 611
Pesud U – 621	
<b>Pesud Asing</b>	US Hercules C – 140 (USA)

Sumber : Satuan Operasi Lantamal II Padang, 2018

#### 4.1.1.4. Gambaran Pengamanan Pelabuhan Teluk Bayur yang dilaksanakan oleh Lantamal II Padang

Secara garis besar kegiatan pengamanan Obvitnas adalah bagian dari OMSP yang dilakukan oleh Lantamal II Padang. Untuk melakukan OMSP ini pihak Lantamal II Padang akan membantu pengamanan di Pelabuhan Teluk Bayur apabila ada surat permohonan melakukan

pengamanan. Kegiatan pengamanan Pelabuhan Teluk Bayur yang dilakukan oleh Lantamal II Padang yaitu adalah berdasarkan data intelijen. Lantamal II Padang akan melakukan kegiatan pengamanan sesuai dengan aktivitas kerawanan di wilayah Pelabuhan Teluk Bayur, jadi tidak secara terus menerus. (Lasmono, 2018).

Apabila ada *event* tertentu seperti hari raya keagamaan, Lantamal II Padang akan turut serta mengamankan Pelabuhan Teluk Bayur. Personel yang diturunkan berupa anggota tim intelijen untuk mengamankan area Pelabuhan Teluk Bayur secara tertutup serta Pomal dan Marinir untuk mengamankan area Pelabuhan Teluk Bayur secara terbuka. Selama ini proses koordinasi antara PT. Pelindo II unit Pelabuhan Teluk Bayur dan Lantamal II Padang berlangsung dengan baik dan tidak ada kendala yang berarti (Arwani, 2018).

Untuk kegiatan pengamanan berupa pemeriksaan barang di Pelabuhan Teluk Bayur dilakukan oleh pihak *internal security* pelabuhan, Lantamal II Padang tidak ikut melaksanakan kegiatan tersebut. Pihak *internal security* pelabuhan mendapatkan pelatihan dan pembinaan dari pihak TNI AL. *Internal security* pelabuhan sendiri juga di isi oleh anggota TNI AL sebagai komandan regu dan *manager security* berdasarkan perjanjian kontrak kerja yang sudah dibuat (Santoso, 2018).

#### **4.1.2. Analisis Data**

##### **4.1.2.1. Strategi Intelijen**

Strategi intelijen diarahkan pada strategi untuk mengatasi, mencegah, dan menindak kegiatan – kegiatan : 1) Spionase yang dilakukan oleh negara lain untuk mencari dan mendapatkan rahasia militer, 2) Sabotase dari pihak tertentu untuk merusak instalasi pening dan Obvitnas, 3) Aksi teror bersenjata yang dilakukan oleh teroris internasional atau bekerja sama dengan teroris dalam negeri atau oleh teroris dalam negeri serta kegiatan pelanggaran hukum lainnya. Secara organisasi Lantamal II Padang memiliki Asintel dan Tim Intelijen yang bertugas di bidang intelijen

maritim, pengamanan dan penggalangan serta Posal, Pos Keamanan Laut (Poskamla), dan Pos Pengamat (Posmat) yang bertugas melaksanakan pengumpulan data intelijen maritim, melaksanakan pengamatan dan pengindraan terhadap aspek maritim setempat sesuai kemampuan yang dimiliki dan melaksanakan tindakan awal guna mencegah terjadinya kegiatan yang dapat mempengaruhi keamanan dan ketertiban di daerah kewenangannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Sulaeman, 2018).

Lantamal yang memiliki kekuatan pertahanan yang kuat bisa dilihat dari bentuk dan pengorganisasian intelijennya. Karena dengan keberadaan institusi tersebut perkembangan setiap wilayah bisa diketahui dan dianalisis untuk diolah dan dijadikan data ketahanan wilayah. Intelijen sebagai mata dan telinga memiliki peranan yang sangat penting, khususnya untuk kepentingan nasional dalam menjaga stabilitas dan mengendus suatu ancaman sedini mungkin (Suryo, 2018).

Strategi deteksi yang dilaksanakan oleh Asintel, Tim Intelijen, Posal, Poskamla, dan Posmat dapat diandalkan walaupun terkadang informasi yang di dapat sedikit terlambat. Hal ini dapat dimaklumi karena keterbatasan saran pendukung seperti belum adanya radar sebagai alat deteksi dini untuk mengantisipasi ancaman di wilayah kerja Lantamal II Padang yang sangat luas, serta jarak yang cukup jauh antara Posal, Poskamla, maupun Posmat dengan Mako Lantamal II Padang. Apabila ada kejadian yang terjadi di tengah laut, Lantamal II Padang hanya bisa mengandalkan informasi dari para nelayan – nelayan yang terlibat secara langsung. Khusus dalam pengamanan Pelabuhan Teluk Bayur sebagai Obvitnas, Lantamal II Padang dapat memonitor secara langsung karena posisi yang dekat dan bersebelahan dengan Mako dan dengan cara menempatkan personel intelijen secara bergantian meskipun tidak terus – menerus (Lasmono, 2018).

Setiap prajurit Lantamal II Padang memiliki kemampuan keprajuritan yang dapat diandalkan sesuai dengan kesatuan masing – masing. Hal ini diperoleh saat personel tersebut mengikuti pendidikan dasar keprajuritan

dan diasah di kedinasan. Kemampuan tersebut sangat bermanfaat dalam melaksanakan tugas – tugas yang menjadi tanggung jawabnya, termasuk dalam tugas pengamanan Pelabuhan Teluk Bayur. Secara kuantitas memang untuk personel yang saat ini mengawaki Tim Intelijen, Posal, Poskamla, dan Posmat sebagian besar belum melaksanakan pendidikan intelijen atau belum memiliki kualifikasi intelijen. Namun demikian itu bukanlah merupakan suatu hambatan bagi Prajurit Lantamal II Padang dalam melaksanakan tugas – tugas yang diberikan kepadanya (Arwani, 2018).

Perlengkapan alat pendukung kerja intelijen maupun peralatan – peralatan yang mampu untuk melaksanakan deteksi dini terhadap gangguan keamanan di laut masih sangat terbatas. Oleh karena itu dalam melaksanakan kegiatan intelijen, Lantamal II Padang melibatkan nelayan sebagai informan terhadap segala bentuk tindak pelanggaran pidana yang terjadi di laut. Pelibatan masyarakat nelayan ini sangat diperlukan, karena apabila dihadapkan dengan luasnya wilayah kerja Lantamal II Padang dengan luas wilayah laut yang ada mustahil personel Lantamal II Padang dapat melaksanakannya secara maksimal (Susilo, 2018).

Terkait dengan strategi operasi intelijen Lantamal II Padang yang berhubungan dengan kegiatan pengamanan Pelabuhan Teluk Bayur belum ada anggaran khusus untuk melaksanakannya. Adapun penyelenggaraan operasi tersebut selama ini dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau *Memorandum of Understanding* (MoU). Sehingga pihak ketiga yang menanggung atas semua anggaran yang diperlukan (Indra, 2018).

Faktor budaya di wilayah kerja Lantamal II Padang khususnya masyarakat pesisir terhadap kesadaran wilayah maritim (*maritime domain awareness*) dari segala sesuatu yang berhubungan dengan wilayah atau domain maritim serta pengaruhnya yang terkait dengan berbagai masalah keamanan, keselamatan, ekonomi, dan lingkungan sudah cukup baik. Termasuk dukungan dari beberapa komponen potensi – potensi maritim

yang saling terkait satu sama lain, di antaranya : 1) Pelayaran Niaga, 2) Perikanan, 3) Industri Maritim, dan 4) Pariwisata Bahari. Di mana mereka bertindak sebagai penunjang AL (Sulaeman, 2018).

Mengacu pada temuan peneliti dapat disimpulkan bahwa secara umum strategi deteksi, pengindraan, dan pengamanan terhadap aspek maritim maupun Obvitnas yang dilaksanakan oleh Lantamal II Padang masih terbatas. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor yang mempengaruhi seperti terbatasnya jumlah personel intelijen, dan sebagian besar personel pengawak organisasi yang ada belum memiliki kualifikasi intelijen, serta minimnya sarana peralatan pendukung kinerja intelijen, seperti dengan tidak adanya radar yang terpasang di wilayah kerja Lantamal II Padang, dan terbatasnya anggaran. Keadaan ini tentunya sangat terpengaruh terhadap strategi intelijen Lantamal II Padang dalam melaksanakan deteksi, pengindraan, dan pengamatan terhadap aspek maritim maupun dalam melaksanakan pengamanan Obvitnas Pelabuhan Teluk Bayur.

#### **4.1.2.2. Strategi Pertahanan**

Strategi pertahanan merupakan gabungan dari profesionalitas prajurit dan kesiapan Alutsista untuk melaksanakan kegiatan penegakan kedaulatan dalam rangka menjaga keutuhan wilayah NKRI. Kondisi kesiapan Alutsista Lantamal II Padang saat ini masih terbatas dilihat dari segi kuantitas unsur – unsur yang dimiliki oleh Mako Lantamal II Padang yaitu hanya 4 KRI, 1 KAL, 4 Patkamla, dan 1 Sea Rider. Sedangkan dilihat dari kualitas unsur – unsur yang ada kondisinya hanya 2 KRI, 3 Patkamla, dan 1 Sea Rider saja yang siap, hal ini disebabkan karena 2 KRI, 1 KAL, dan 1 Patkamla sedang melaksanakan proses perbaikan dan pemeliharaan (Susilo, 2018).

Kemudian persenjataan yang dimiliki oleh unsur – unsur Lantamal II Padang mengalami gangguan pada 1 KRI, yaitu KRI Kala Hitam dengan kondisi siap terbatas. Untuk prajurit yang ada di pangkalan maupun di unsur – unsur Lantamal II Padang sudah dilengkapi dengan senjata

organik/perorangan. Untuk pertahanan pangkalan Lantamal II Padang sudah memiliki Yonmarhanlan. Rendahnya kondisi dan jumlah Alutsista merupakan masalah terbesar yang masih dihadapi oleh TNI AL sebagai penunjang utama strategi pertahanan. Jumlah peralatan pertahanan terutama Alutsista yang terbatas dan kondisinya yang secara rata – rata tidak sesuai lagi dengan perkembangan teknologi merupakan suatu permasalahan yang harus segera untuk diselesaikan (Lasmono, 2018).

Tabel 9. Sarana Patroli Lantamal II Padang

No	Siap	Tidak Siap
1	 <p data-bbox="528 981 730 1014">KRI Cakalang</p>	 <p data-bbox="1010 981 1212 1014">KRI Kelabang</p>
2	 <p data-bbox="517 1368 738 1402">KRI Kala Hitam</p>	 <p data-bbox="1034 1413 1185 1447">KRI Kurau</p>
3	 <p data-bbox="512 1704 751 1738">Patkamla Marak</p>	 <p data-bbox="1023 1715 1201 1749">KAL Sinyaru</p>

4	 <p>Patkamla Pulau Harapan</p>	 <p>Patkamla Bungus</p>
5	 <p>Patkamla Pulau Pelangi</p>	
6	 <p>Sea Rider</p>	

Sumber : Satuan Patroli Lantamal II Padang, 2018

Untuk mempertajam strategi pertahanan Lantamal II Padang selalu melaksanakan kegiatan latihan Geladi Tugas Tempur dan latihan Pangkalan Tingkat 1 sampai dengan Tingkat 4 secara rutin setiap tri wulan. Sedangkan untuk meningkatkan profesionalitas prajurit, Lantamal II Padang melaksanakan kegiatan pembinaan latihan baik berupa teori di dalam ruangan/pencerahan, maupun latihan gabungan dengan instansi lainnya. Hal ini terus dilaksanakan secara berkesinambungan untuk menciptakan kesiapsiagaan Lantamal II Padang dalam mendukung pelaksanaan tugas pokoknya. Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan meliputi latihan F1QR/Pasukan Reaksi Gerak Cepat, dan Latihan Gabungan, serta meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pertahanan melalui Pembinaan Potensi Nasional Kekuatan Maritim dengan

melaksanakan pembinaan kepada masyarakat desa pesisir pantai (Sulaeman, 2018).

Kondisi Alutsista TNI AL yang saat ini berada di bawah jajaran Mako Lantamal II Padang rata – rata usia pakainya sudah tua (18,5 tahun), sehingga berpengaruh pada tingkat kesiapan operasional dan membutuhkan biaya operasional dan pemeliharaan yang tinggi. Masih kurang memadainya jumlah Alutsista, sarana dan prasarana pertahanan berpengaruh cukup signifikan terhadap penggelaran kekuatan pangkalan dalam mengatasi berbagai bentuk ancaman, seperti permasalahan perbatasan dan pulau – pulau terluar, termasuk dalam mengatasi permasalahan pengamanan Obvitnas Pelabuhan. Hal ini dipengaruhi oleh belum tercapainya postur pertahanan pada tingkat kekuatan pokok minimal (*minimum essential force*) yang berpengaruh secara signifikan terhadap pertahanan negara, selain itu Posal, Poskamla, maupun Posmat yang ada di jajaran Lantamal II Padang jumlahnya hanya 18 pos dengan jarak masing – masing pos yang cukup lumayan jauh (Indra, 2018).

Strategi Pemberdayaan Wilayah Pertahanan berupa strategi yang diarahkan pada peningkatan strategi pemberdayaan potensi maritim nasional maupun kewilayahan, seperti industri dan jasa maritim strategis serta berbagai komponen cadangan lainnya guna mendukung strategi pertahanan negara di laut. Secara organisasi Lantamal II Padang memiliki Dispotmar yang menyelenggarakan fungsi – fungsi : 1) Memberikan pengarahan dan mempromosikan Indonesia sebagai negara maritim untuk memberikan kesadaran bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa maritim kepada nelayan dan sekolah – sekolah baik sekolah maritim maupun sekolah umum, 2) Memberikan pengarahan untuk pembinaan karakter bela negara dan cinta tanah air, 3) Memberikan bantuan sembako dan bedah rumah serta pengobatan gratis bagi keluarga nelayan, 4) Mengadakan panen bersama untuk menggalang rasa persatuan dengan masyarakat nelayan sesuai dengan moto “Bersama Rakyat, TNI Kuat”, 5)

Mengingatkan kepada anggota jajaran Lantamal II Padang pepatah “Di mana Bumi Dipijak, Di situ Langit Dijunjung”, 6) Melakukan pembinaan terhadap pemuda – pemudi maritim dan remaja bahari, 7) Menyelenggarakan kegiatan olahraga bersama secara rutin, 8) Melaksanakan kegiatan bersih – bersih pantai, dan 9) Melaksanakan kegiatan pembinaan pramuka (Sumarto, 2018).

Lantamal II Padang mempunyai desa – desa binaan untuk pengenalan negara maritim agar masyarakatnya berorientasi ke laut. Desa – desa tersebut diarahkan agar bisa berdaya guna untuk kepentingan Lantamal II Padang, seperti deteksi dini. Masyarakat nelayan dijadikan agen agar saat menemukan hal ganjil di laut untuk segera melapor ke pihak Lantamal II Padang. Pemberdayaan ekonomi masyarakat juga dilakukan pada desa – desa binaan tersebut. Pada saat pertemuan bulanan antar *stakeholders* maritim yang berada di wilayah kerja Lantamal II Padang (*Coffee Morning*) juga diberikan pembekalan tentang potensi maritim. Lantamal II Padang juga turut serta membantu Kemhan dalam upaya sosialisasi tentang bela negara, melakukan komunikasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang ketahanan wilayah laut nasional dan juga melaksanakan bakti TNI (Lasmono, 2018).

Kendala yang dihadapi dalam melaksanakan pembinaan potensi maritim dihadapkan dengan keterbatasan jumlah personel di dalam struktur organisasi Dispotmar Lantamal II Padang. Selain itu, dari sisi tempat desa binaan Lantamal II Padang jaraknya jauh serta saran dan prasarana transportasi juga kurang memadai sehingga sulit untuk diakses, khususnya untuk desa yang berada di wilayah pulau – pulau terluar. Terbatasnya anggaran pembinaan potensi maritim juga menjadi kendala yang menyebabkan upaya pemberdayaan masyarakat pesisir kurang maksimal.

Untuk meminimalisir permasalahan yang ada, Lantamal II Padang berupaya untuk bekerja sama dengan *stakeholder* dan instansi pemerintah terkait dalam menjaga kesinambungan pemberdayaan masyarakat pesisir. Namun semua itu tergantung dari kesiapan, ketersediaan anggaran, dan

rencana kegiatan dari masing – masing institusi tersebut. Selama ini upaya kerja sama yang direncanakan oleh Lantamal II Padang dalam melaksanakan pembinaan di bidang pertahanan terlaksana dengan baik karena adanya sinkronisasi yang baik dengan rencana kegiatan *stakeholder* maritim lainnya (Sumarto, 2018).

Mengacu pada temuan peneliti dapat disimpulkan bahwa secara umum strategi pertahanan yang merupakan gabungan dari profesionalitas prajurit, dan kesiapan Alutsista untuk melaksanakan kegiatan penegakan kedaulatan dalam rangka menjaga keutuhan wilayah NKRI yang dilaksanakan oleh Lantamal II Padang masih kurang optimal, sehingga berpengaruh pada tingkat kesiapan operasional pangkalan dalam bidang pertahanan. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor yang mempengaruhi seperti : 1) Alutsista yang sangat terbatas, 2) Kondisi peralatan pertahanan yang secara rata – rata tidak sesuai lagi dengan perkembangan teknologi, 3) Kondisi Alutsista yang rata – rata usianya sudah tua (18,5 tahun) yang tentu saja berpengaruh pada tingkat kesiapan operasional yaitu membutuhkan biaya operasional serta biaya pemeliharaan yang tinggi.

Namun demikian untuk meningkatkan profesionalitas prajurit, Lantamal II Padang selalu melaksanakan kegiatan pembinaan latihan. Latihan yang selalu dilaksanakan secara rutin dan berkesinambungan berupa latihan Geladi Tugas Tempur dan latihan Pangkalan Tingkat 1 sampai dengan Tingkat 4, latihan berupa teori di dalam ruangan/pencerahan, maupun latihan gabungan dengan instansi lainnya, serta latihan F1QR/Pasukan Reaksi Gerak Cepat. Lantamal II Padang juga melaksanakan pembinaan potensi nasional kekuatan maritim guna untuk meningkatkan kemampuan pertahanan pangkalan.

#### **4.1.2.3. Strategi Pengamanan**

Strategi pengamanan meliputi : 1) Strategi penegakan hukum di laut dan pengamanan lalu lintas laut, 2) Strategi untuk membantu pelaksanaan OMSP termasuk pengamanan Obvitnas serta bantuan kepada Polri dan

otoritas sipil lain dalam upaya mewujudkan keamanan di wilayah kerja Lantamal II Padang, dan 3) Strategi anti perompakan dan tindak kekerasan di laut guna menurunkan angka perompakan dan kegiatan ilegal lainnya di laut dalam rangka menyelamatkan kekayaan negara, serta memperbaiki citra bangsa dan negara di mata internasional.

Sampai saat ini kapal patroli yang dimiliki oleh Mako Lantamal II Padang dalam melaksanakan kegiatan patroli dan penindakan sangat tergantung kepada sarana apung yang dimiliki oleh pangkalan, yaitu sebagai berikut : 1) 4 KRI, yaitu : KRI Cakalang, KRI Kala Hitam, KRI Kelabang, dan KRI Kurau, 2) KAL Sinyaru, 3) 4 Patkamla, yaitu : Patkamla Bungus, Patkamla Marak, Patkamla Pulau Harapan, dan Patkamla Pulau Pelangi, dan 5) 1 Sea Rider.

Kondisi kapal – kapal tersebut ada yang berada dalam : 1) Kondisi siap, yaitu : KRI Cakalang, Patkamla Marak, Patkamla Pulau Harapan, Patkamla Pulau Pelangi, dan Sea Rider, 2) Kondisi siap terbatas, yaitu KRI Kala Hitam, dan 3) Kondisi tidak siap, yaitu : KRI Kelabang, KRI Kurau, KAL Sinyaru, dan Patkamla Bungus. Rata – rata kondisi usia pakai kapal – kapal yang ada sudah tua (18,5 tahun) sehingga tidak dapat dioperasikan secara maksimal.

Jika dibandingkan dengan luas wilayah yang menjadi tugas dan tanggung jawab Lantamal II Padang, jumlah kapal yang dimiliki masih sangat kurang. Kapal KRI Kala Hitam dengan keadaan kondisi siap terbatas yang dalam artisan bahwa kapal tersebut masih dapat digunakan tetapi tidak dapat dioperasikan secara maksimal. Selain itu dukungan BBM untuk kapal – kapal patroli yang ada jumlahnya sangat terbatas sehingga dalam melaksanakan patroli sangat tergantung juga dari ketersediaan BBM (Indra, 2018).

Dari aspek personel pengawak kapal patroli, sampai dengan saat penelitian ini dilakukan ada sedikit masalah yang dihadapi oleh Lantamal II Padang, akan tetapi masalah ini tidak terlalu signifikan. Masalah tersebut berupa tuntutan kesesuaian jumlah Daftar Susunan Personel (DSP)

dengan jumlah riil personel yang masih belum terpenuhi secara kuantitas. Lalu ada ketidaksesuaian dari beberapa personel tersebut terutama dari persyaratan kepangkatan, namun hal ini tidak mengganggu kinerja dan semangat para personel itu sendiri. Pada saat dilakukan peninjauan ke lokasi tempat sandar dari kapal – kapal patroli Lantamal II Padang di wilayah Pelabuhan Perikanan Bungus, terlihat bahwa semangat kerja dari para personel pengawak kapal patroli masih cukup baik (Asky, 2018).

DSP Lantamal II Padang secara kuantitas memang mengalami kekurangan. Sesuai DSP Lantamal II Padang seharusnya diawaki oleh 2123 personel namun pada kenyataannya saat ini personel Lantamal II Padang diawaki oleh 1066 personel. Di mana komposisi Perwira, Bintara, Tamtama maupun Pegawai Negeri Sipil (PNS) mengalami kekurangan.

Tabel 10. Daftar Susunan Personel Lantamal II Padang

<b>Personel</b>	<b>Riil</b>	<b>DSP</b>	<b>Keterangan</b>
Perwira	172	436	Kurang 264
Bintara	390	880	Kurang 490
Tamtama	450	609	Kurang 159
PNS	54	198	Kurang 144
Jumlah	1066	2123	Kurang 1057

Sumber : Aspers Lantamal II Padang, 2018

Terkait dukungan kegiatan pengamanan yang dilaksanakan oleh Lantamal II Padang dari instansi pemerintahan (Pemerintah Daerah [Pemda] dan Instansi Maritim), tokoh agama dan tokoh masyarakat sekitar sangat mendukung. Dukungan dari instansi pemerintahan (Pemda dan Instansi Maritim), tokoh agama serta tokoh masyarakat sekitar terhadap pelaksanaan tugas pokok Lantamal II Padang maupun tugas pengamanan Obvitnas serta kegiatan keseharian sangat baik. Lantamal II Padang selalu menjalin hubungan baik dengan melibatkan atau bekerja sama dalam hal melaksanakan kegiatan – kegiatan sosial baik yang dilaksanakan berdasarkan program dari TNI AL maupun dari instansi lain. Kerja sama/dukungan dalam hal yang positif merupakan suatu hal yang baik guna mempererat tali silaturahmi antar instansi maupun dengan para tokoh agama atau tokoh masyarakat. Pentingnya dukungan dari instansi

pemerintahan (Pemda dan Instansi Maritim), tokoh agama serta tokoh masyarakat agar program dapat berjalan dengan sesuai rencana (Sulaeman, 2018).

Dari hasil evaluasi diketahui secara umum strategi Lantamal II Padang dalam penegakan hukum di laut dan pengamanan lalu lintas laut kurang memadai. Hal ini disebabkan karena keterbatasan sarana kapal patroli serta keterbatasan dukungan BBM. Strategi untuk membantu pelaksanaan OMSP termasuk pengamanan Obvitnas serta bantuan kepada Polri dan otoritas sipil dalam upaya mewujudkan keamanan dalam wilayah kerja Lantamal II Padang cukup memadai, termasuk dukungan dari instansi pemerintahan (Pemda dan Instansi Maritim), tokoh agama dan tokoh masyarakat sekitar.

Terkait dengan pengamanan Obvitnas berdasarkan UU RI No 34 Tahun 2004 Pasal 7 Ayat 2 B Angka 5, TNI memiliki tugas untuk mengamankan Obvitnas yang bersifat strategis, sedangkan Polri dapat juga meminta bantuan kekuatan berdasarkan Keppres RI No 63 Tahun 2004. Pengamanan Obvitnas oleh TNI AL terdiri dari Operasi Pengamanan Permanen dan Operasi Pengamanan Non Permanen.

a. Operasi Pengamanan Permanen :

- 1) Operasi pengamanan Obvitnas ini dilakukan dengan memanfaatkan gelar unsur yang ada.
- 2) Penanganan operasi pengamanan menggunakan metode dan Alutsista TNI AL.
- 3) Obvitnas tersebut adalah Obvitnas yang berada mulai di daerah operasi yang digelar.
- 4) Semua kegiatan perindustrian bidang maritim yang berskala nasional dan sangat mempengaruhi kepentingan nasional bidang maritim.
- 5) TNI AL berdasarkan UU RI No 34 Tahun 2004 dalam tugas OMSP mengemban fungsi mengamankan Obvitnas.

b. Operasi Pengamanan Non Permanen :

- 1) Operasi Pengamanan Bersifat Khusus, dengan pertimbangan :

- a) TNI AL berdasarkan UU RI No 34 Tahun 2004, dalam tugas OMSP mengemban fungsi mengamankan Obvitnas.
  - b) Dasar pelibatan TNI AL dalam pengamanan Obvitnas bersifat khusus adalah permintaan *stakeholder* yang bersangkutan kepada TNI AL.
  - c) Yang dimaksud dengan Obvitnas bersifat khusus adalah :
    - (1) Ancaman terhadap Obvitnas tersebut akan berpengaruh secara luas terhadap kepentingan negara.
    - (2) Obvitnas tersebut adalah Obvitnas yang berada mulai di daerah pesisir sampai ke perairan yurisdiksi nasional Indonesia dengan pertimbangan efektivitas pengamanan.
    - (3) Semua kegiatan perindustrian bidang maritim yang berskala nasional dan sangat mempengaruhi kepentingan nasional di bidang maritim.
  - d) Berdasarkan permintaan *stakeholder*, TNI AL membuat MoU dengan jangka waktu yang telah ditentukan.
  - e) Penanganan pengamanan menggunakan metode dan Alutsista TNI AL.
  - f) Permintaan pengamanan harus memuat :
    - (1) Perkembangan situasi terakhir.
    - (2) Alasan permintaan pengamanan.
    - (3) Jumlah kekuatan dan kemampuan yang diperlukan.
    - (4) Daerah/lokasi bantuan diperlukan.
    - (5) Waktu penggunaan bantuan dimulai dan berakhir.
    - (6) Dukungan administrasi dan logistik.
- 2) Operasi Pengamanan Atas Permintaan Polri.
- a) Polri tidak mampu mengatasi gangguan dan ancaman yang terjadi pada Obvitnas dari ancaman gangguan keamanan termasuk sabotase maupun aksi kelompok bersenjata atau teroris.
  - b) Permintaan pengamanan dilaksanakan secara tertulis oleh Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) kepada Panglima Komando Utama

Operasi (Pangkotamaops) TNI AL dan tembusan kepada Kasal dan Panglima TNI.

c) Permintaan pengamanan harus memuat :

- (1) Perkembangan situasi terakhir.
- (2) Alasan permintaan pengamanan.
- (3) Jumlah kekuatan dan kemampuan yang diperlukan.
- (4) Daerah/lokasi bantuan diperlukan.
- (5) Waktu penggunaan bantuan dimulai dan berakhir.
- (6) Dukungan administrasi dan logistik.

Terkait tuntutan tugas pokok dan tugas tambahan, di samping tugas pokok yang diemban dari komando atas. Lantamal II Padang memiliki tugas tambahan berkaitan dengan wilayah kerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Di antaranya melaksanakan pengamanan Obvitnas sesuai PKS antara TNI AL dengan pihak Pertamina dan PLN, berupa pengamanan Kapal Minyak dan PLTU di wilayah laut (Indra, 2018).

PT. Pelindo II selain melaksanakan kegiatan kerja sama pengamanan Pelabuhan Teluk Bayur dengan pihak Lantamal II Padang, juga melaksanakan kegiatan pembinaan/penyuluhan bersama dengan instansi kemaritiman lainnya kepada masyarakat. Khususnya kepada masyarakat pesisir yang letaknya berdekatan dengan wilayah operasi/lokasi fasilitas pelabuhan. Hal ini dilakukan untuk memberikan gambaran tentang sistem keamanan, keselamatan, larangan atau ketentuan yang berlaku, serta potensi terjadinya kecelakaan dan bahaya di perairan sekitar Pelabuhan Teluk Bayur.

Kegiatan ini merupakan bagian dari kepedulian PT. Pelindo II kepada masyarakat nelayan atau pengguna laut. Selain itu juga sebagai upaya preventif untuk mengurangi kecelakaan di laut serta meminimalisir terjadinya tindak kejahatan/pencurian baik di wilayah pelabuhan maupun di atas kapal yang sedang, akan, dan telah berlabuh. Kejahatan/pencurian ini masih terjadi meskipun intensitasnya tidak terlalu banyak.

Jumlah kejahatan/pencurian yang relatif sedikit mungkin disebabkan karena Pelabuhan Teluk Bayur tidak pernah kosong. Selalu ada personel yang *standby* baik petugas keamanan internal yang sedang bekerja maupun petugas keamanan yang ditempatkan oleh pihak Lantamal II Padang di Pelabuhan Teluk Bayur. Ancaman atau gangguan keamanan yang selama ini sering terjadi di Pelabuhan Teluk Bayur hanya sebatas pencurian besi tua. Hal ini disebabkan mungkin karena tuntutan ekonomi dari pihak pelaku (Santoso, 2018).

Mengacu pada uraian di atas dapat disimpulkan bahwa adanya kerja sama antara TNI AL dengan PT. Pelindo II, berupa pengamanan Pelabuhan Teluk Bayur dan wilayah sekitarnya di Perairan Selatan Provinsi Sumatera Barat. Pengamanan Obvitnas berupa Pelabuhan Teluk Bayur yang dikelola oleh PT. Pelindo II dan wilayah sekitarnya di Perairan Selatan Provinsi Sumatera Barat oleh TNI AL ini termasuk dalam kategori Operasi Pengamanan Non Permanen Bersifat Khusus. Pelabuhan Teluk Bayur yang dikelola oleh PT. Pelindo II masih mengalami tindakan pencurian meskipun jumlah kejadiannya tidak terlalu banyak.

#### **4.1.2.4. Strategi Dukungan**

Pangkalan merupakan salah satu komponen dari SSAT. Pangkalan harus mampu melaksanakan fungsi pendukung berupa fasilitas labuh, fasilitas pemeliharaan dan perbaikan, fasilitas perbekalan, perawatan personel, dan pembinaan pangkalan laut itu sendiri. Sebagai pendukung maka pangkalan memiliki bermacam jenis dan bentuk fasilitas agar kapal, Pesud, dan AL mampu melaksanakan tugas operasionalnya sebaik mungkin sesuai dengan Kebijakan Strategis Kasal tentang pengembangan Lanal untuk mewujudkan stabilitas keamanan daerah dalam rangka tetap tegaknya NKRI.

##### **a. Faslabuh**

Faslabuh dan pendukungnya meliputi fasilitas dermaga, listrik aliran darat, pipa penyalur air tawar, dan pipa penyalur BBM. Kondisi yang terjadi di Lantamal II Padang mengenai faslabuh dan pendukungnya

masih kurang memadai. Untuk pengoperasian menyandarkan dan melepaskan kapal, Lantamal II Padang sudah mempunyai dermaga sendiri yang berada di Pelabuhan Perikanan Bungus (Sulaeman, 2018). Dermaga ini sudah bisa digunakan untuk menyandarkan unsur – unsur yang dipunyai oleh Lantamal II Padang. Fasilitas tersebut digunakan oleh Lantamal II Padang untuk mendukung kegiatan operasional KRI, patroli keamanan laut, dan pengamanan Obvitnas. Akan tetapi apabila ada kunjungan unsur dengan ukuran panjang lebih dari 75 m, Lantamal II Padang akan menggunakan dermaga di Pelabuhan Teluk Bayur yang dikelola oleh PT. Pelindo II (Indra, 2018). Dalam melaksanakan bekal ulang bagi unsur – unsur satuan operasi/KRI yang singgah di Lantamal II Padang, untuk memenuhi kebutuhan listrik aliran darat menggunakan fasilitas yang sudah ada di dermaga Lantamal II Padang di Pelabuhan Perikanan Bungus. Untuk memenuhi kebutuhan air tawar, Lantamal II Padang menggunakan fasilitas milik Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang berada di Pelabuhan Perikanan Bungus. Sedangkan untuk mendukung kebutuhan BBM, Lantamal II Padang menggunakan fasilitas Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang dibangun oleh PT. Pertamina yang dimiliki oleh PT. Semen Padang sementara Stasiun Pengisian BBM milik Lantamal II Padang sendiri sedang dalam proses pengerjaan (Susilo, 2018).

b. Fasharkan

Untuk mendukung kegiatan pemeliharaan dan perbaikan, Lantamal II Padang tidak memiliki Fasharkan untuk perbaikan kapal – kapal yang mengalami kerusakan saat beroperasi di wilayah kerjanya. Lantamal II Padang dalam melakukan dukungan docking kapal terhadap KRI apabila ada yang mengalami kerusakan saat operasi/patroli keamanan laut bekerja sama dengan bengkel perkapalan swasta untuk melakukan perbaikan. Saat ini Lantamal II Padang bekerja sama dengan PT. CMS Banten untuk melakukan docking terhadap KRI Kurau, PT. Palindo Marine Shipyard di Batam untuk melakukan docking terhadap KRI

Kelabang, dan PT Pelangi Indah Nusantara di Jakarta untuk melakukan docking terhadap KAL Sinyaru (Satuan Patroli Lantamal II Padang, 2018). Lantamal II Padang mempunyai Disharkan dan memiliki personel yang mampu melaksanakan perbaikan kapal baik mesin maupun bangunan kapal, tetapi hanya terbatas pada pemeliharaan dan perbaikan Patkamla, untuk unsur KRI tidak bisa. Sehingga dalam mendukung perbaikan KRI yang sedang melaksanakan operasi rutin maupun operasi pengamanan Obvitnas bisa dilakukan, akan tetapi tidak optimal. Dengan kondisi sarana dan fasharkan yang tidak dimiliki oleh Lantamal II Padang, sangat sulit untuk memberikan dukungan perbaikan unsur operasi/KRI yang rusak tanpa bekerja sama dengan pihak lain atau perusahaan perkapalan swasta (Susilo, 2018).

c. Fasilitas Perbekalan (Fasbek)

Untuk mendukung kegiatan perbekalan unsur, personel, dan material Lantamal II Padang memiliki beberapa fasilitas yang berfungsi untuk mendukung kegiatan tersebut. Dalam melaksanakan penyimpanan BBM Lantamal II Padang tidak memiliki sarana tangki timbun. Untuk penyimpanan perbekalan Lantamal II Padang juga tidak memiliki gudang logistik cair yang bisa digunakan untuk menyimpan peralatan perbekalan, menampung minyak lincir, dan pelumas. Lantamal II Padang memiliki gudang yang berguna sebagai fasilitas untuk menampung perbekalan umum dan berada dalam satu lokasi dengan Mako Lantamal II Padang. Meskipun Lantamal II Padang memiliki gudang perbekalan umum, akan tetapi tidak biasa digunakan untuk mendukung kebutuhan operasional KRI. Karena gudang tersebut sudah terisi dengan bermacam – macam barang keperluan dinas Lantamal II Padang (Susilo, 2018).

d. Fasilitas Perawatan Personel (Faswatpers)

Untuk mendukung kegiatan perawatan personel, Lantamal II Padang memiliki fasilitas sebagai berikut : Rumah Dinas Perwira, Bintara, Tamtama, dan PNS, Mess Transit, Dinas Kesehatan, Masjid, dan Lapangan Olahraga (Badminton, Golf, Tenis, dan Voli). Untuk

mendukung kegiatan perawatan personel, Lantamal II Padang mempunyai fasilitas yang lumayan lengkap, mulai dari gedung perkantoran, perumahan dinas, kendaraan, sarana ibadah, dan sarana olahraga, meskipun gedung atau bangunannya sudah tua dan kapasitasnya terbatas (Lasmono, 2018). Dari hasil evaluasi, mengacu pada temuan peneliti di lapangan yang di perkuat oleh pernyataan para narasumber, secara umum strategi dukungan Lantamal II Padang masih kurang optimal. Hal ini disebabkan karena adanya keterbatasan sebagai berikut : (1) Untuk Faslabuh Lantamal II Padang sudah memiliki dermaga sendiri yang bisa menampung semua unturnya jika ingin bersandar. Akan tetapi Lantamal II Padang tidak memiliki dermaga yang bisa digunakan untuk mendukung operasional kapal – kapal TNI AL yang berukuran besar (+75 m), saat ini Faslabuh yang digunakan untuk mendukung operasional kapal – kapal TNI AL yang berukuran besar (+75 m) tersebut adalah milik PT. Pelindo II unit Pelabuhan Teluk Bayur yang dipinjamkan kepada Lantamal II Padang, (2) Lantamal II Padang tidak memiliki Fasharkan kapal. Untuk melaksanakan dukungan pemeliharaan dan perbaikan kapal, Lantamal II Padang bekerja sama dengan pihak lain, yaitu PT. CMS Banten, PT. Palindo Marine Shipyard Batam, dan PT. Pelangi Indah Nusantara Jakarta, (3) Strategi dukungan Fasbek masih kurang memadai karena Lantamal II Padang tidak memiliki tangki timbun BBM, tidak memiliki gudang penyimpanan logistik cair, dan hanya memiliki tempat penyimpanan perbekalan umum, (4) Untuk mendukung kegiatan perawatan personel, Lantamal II Padang memiliki beberapa fasilitas yang cukup memadai.

## **4.2. Pembahasan**

### **4.2.1. Kondisi Nyata (*Existing Condition*) Strategi Lantamal II Padang Dalam Pengamanan Obvitnas (*Strength*)**

Untuk menghasilkan gambaran yang obyektif tentang strategi Lantamal II Padang dalam pengamanan Obvitnas, data primer yang

didasarkan atas hasil Komunikasi Personal terhadap personel yang berkompeten dalam tugas pengamanan laut, serta data sekunder yang di dapatkan. Maka dilaksanakan penggabungan hasil Observasi, Dokumentasi, Komunikasi Personal, dan Teori. Sehingga tercipta triangulasi data tentang strategi Lantamal II Padang dalam mengamankan Obvitnas (Sugiyono, 2009).

Lantamal sebagai salah satu komponen SSAT mempunyai tugas pokok menyelenggarakan dukungan tempur, dukungan logistik, dan dukungan khusus bagi unsur – unsur operasional TNI AL serta membina potensi Pertahanan dan Keamanan Negara, dan tugas – tugas lain sesuai kebijakan Kasal. Mengacu kepada Keputusan Kasal No Kep/07/II/2001 tentang Doktrin TNI AL “Eka Sasana Jaya”, disampaikan bahwa strategi yang dimiliki oleh TNI AL terdiri dari : strategi pertahanan laut, strategi pengamanan laut, strategi intelijen maritim, strategi angkutan laut militer, strategi penyelaman dan penyelamatan bawah air, strategi penerbangan strategi dukungan, dan strategi bakti sosial. Namun dalam pembahasan selanjutnya di tesis ini hanya dibatasi terhadap permasalahan empat elemen strategi saja yang berkaitan dengan pengamanan Obvitnas di Pelabuhan Teluk Bayur. Strategi yang dimaksud adalah strategi intelijen maritim, strategi pertahanan laut, strategi pengamanan laut, dan strategi dukungan.

Sudah sangat tepat apabila dalam melaksanakan pengamanan di Pelabuhan melibatkan TNI AL di mana untuk lokasi yang berada di pantai selatan Sumatera Barat dengan melibatkan Lantamal II Padang. Hal ini dikarenakan pengamanan laut akan selalu melekat pada fungsi dan tugas AL suatu negara. Laut merupakan satu kesatuan (*the sea is all one*), artinya bahwa laut tidak dapat dipagari, diduduki, dan dipertahankan seperti daratan (Mahan, 1987).

Secara universal, tugas untuk menjamin keamanan dalam penggunaan laut berada di pundak AL, baik pada masa damai maupun masa perang (Hamman, 2002). Ada tiga fungsi pokok AL di seluruh dunia,

yaitu fungsi perang (*war fighting*), hubungan antar negara (*diplomacy*), dan tugas kepolisian (*constabulary*) (Booth, 1977). Setelah mempelajari kondisi nyata strategi yang dimiliki oleh Lantamal II Padang dalam pembahasan sebelumnya, maka akan dibahas bagaimana kondisi – kondisi ideal strategi yang diharapkan beserta upaya untuk dapat mencapai kondisi ideal tersebut. Sehingga Lantamal II Padang dapat melaksanakan tugas pengamanan Obvitnas secara maksimal terhadap segala bentuk ancaman yang mungkin dapat timbul.

#### **4.2.1.1. Aspek Strategi Intelijen**

Intelijen strategis adalah pengetahuan yang meliputi kemampuan, kelemahan, atau kerawanan dan kemungkinan cara bertindak suatu negara atau bangsa (Platt, 1957). Selanjutnya bentuk utama intelijen strategis dapat dibedakan menjadi :

- a. *Basic Description Form* (Intelijen Dasar), berupa *basic research* (penyelidikan dasar) dan *fundamental research* (penyelidikan lanjutan).
- b. *Current Reportional Form* atau bentuk laporan mengenai perkembangan yang sedang terjadi (aktual) (Kent, 1953).

Teori – teori tersebut di atas menjadikan dasar bagi aparat intelijen untuk melaksanakan kegiatan pengumpulan data – data mengenai kemampuan, kelemahan, atau kerawanan dan kemungkinan cara bertindak musuh. Dalam kaitannya dengan pengamanan Obvitnas Pelabuhan Teluk Bayur di dan wilayah sekitarnya di perairan Selatan Sumatera Barat, yang dimaksud dengan musuh adalah semua pihak – pihak yang bermaksud melakukan ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan terhadap keberlangsungan pengamanan Obvitnas tersebut oleh Lantamal II Padang. Melaksanakan strategi intelijen maritim bertujuan agar tercapainya strategi deteksi dini khususnya di corong – corong strategis dan daerah perbatasan, strategi analisa, evaluasi, dan distribusi data intelijen maritim secara cepat dan akurat sesuai kebutuhan operasi dan strategi kontra – intelijen (Soebijanto, 2006).

Berdasarkan kondisi *existing* di Lantamal II Padang seperti yang disampaikan dalam uraian di atas, ditemukan bahwa dalam aspek strategi intelijen secara umum strategi deteksi, penginderaan, dan pengamatan terhadap aspek maritim maupun Obvitnas yang dilaksanakan oleh Lantamal II Padang masih sangat terbatas. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi seperti terbatasnya peralatan pendukung kerja intelijen dan personel pengawak organisasi yang belum memiliki kualifikasi intelijen. Selayaknya, strategi intelijen yang diharapkan di Lantamal II Padang agar berpedoman pada Keputusan Kasal No Kep/07/II/2001 tentang Doktrin TNI AL “Eka Sasana Jaya”, yang memiliki 3 strategi, yaitu penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan.

a. Strategi Penyelidikan Maritim. Mencakup :

- 1) Kegiatan pengamanan laut,
- 2) Pendeteksian dan pengidentifikasian sasaran,
- 3) Mampu meneruskan laporan secara cepat.

b. Strategi Pengamanan. Mencakup :

- 1) Strategi mencegah dan menanggulangi setiap kerawanan serta kegiatan intelijen lawan/bakal lawan.
- 2) Strategi mencegah setiap usaha yang dapat merugikan personel, material, dokumen, dan kegiatan/operasi laut.

c. Strategi Penggalangan. Mencakup :

- 1) Strategi mempengaruhi sikap dan perilaku pihak tertentu untuk menciptakan iklim yang menguntungkan bagi kepentingan pertahanan negara di laut.
- 2) Strategi memelihara dan meningkatkan potensi nasional untuk membantu terwujudnya daya tangkal kewilayahan yang dapat digunakan bagi kepentingan operasi – operasi TNI AL.

Kondisi strategi intelijen Lantamal II Padang yang diharapkan ke depan adalah intelijen yang profesional, di dukung SDM intelijen yang mumpuni akan tugas dan tanggung jawabnya, serta dilengkapi dengan peralatan pendukung kerja intelijen yang baik, agar dapat mengatasi segala

kendala – kendala yang ada. Diharapkan visi intelijen dapat tercapai, yaitu : terwujudnya fungsi intelijen TNI AL yang dapat mendukung tugas TNI AL melalui misi – misi intelijen, seperti : meningkatkan peran intelijen dalam rangka mendukung tugas TNI AL dan melaksanakan pembinaan intelijen AL dan intelijen maritim.

a. Organisasi Satuan Intelijen. Asintel dan Tim Intelijen Lantamal II Padang harus dapat melaksanakan secara maksimal deteksi dini dan pencegahan dini setiap kerawanan dan ancaman yang mungkin timbul di wilayah kerjanya, serta kegiatan pengamanan internal.

b. Kondisi SDM.

1) Kuantitas Personel. Agar intelijen TNI AL dapat melaksanakan tugasnya melakukan kegiatan deteksi dini dan pencegahan dini secara lebih maksimal, diperlukan personel intelijen yang mencukupi secara kuantitas sesuai DSP yang telah ditetapkan organisasi, sehingga bisa mengcover segala bentuk kejadian yang terjadi di perairan wilayah kerja Lantamal II Padang.

2) Kualitas Personel. Dibutuhkan personel intelijen yang dapat diandalkan dan berkualitas melalui seleksi secara ketat terhadap personel. Hal ini meliputi beberapa aspek, yaitu :

a) Kejiwaan. Dimaksudkan untuk mendapatkan personel intelijen yang memiliki sikap mental yang baik, mempunyai loyalitas dan dedikasi tinggi terhadap tugas.

b) Jasmani. Dimaksudkan untuk mendapatkan personel intelijen yang memiliki jasmani yang prima, sehingga mampu melaksanakan tugas di lapangan.

c) Pengetahuan dan teknologi untuk memperoleh personel yang memiliki intelektual yang tinggi dan kemahiran dalam menunjang pelaksanaan tugas.

c. Peranti Lunak dan Peranti Keras.

1) Peranti Lunak. Kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatnya kecerdasan dan daya kritis masyarakat memiliki

dampak yang positif dan negatif terhadap negara. Peningkatan SDM masyarakat sering digunakan secara keliru, misalnya : merakit bom untuk teror, melakukan kejahatan di bidang ekonomi, dan lain sebagainya. Adanya perkembangan hakikat ancaman saat ini diharapkan ada perbaikan peranti lunak agar dapat menjawab peningkatan ancaman yang ada. Peranti – peranti lunak yang diperlukan guna meningkatkan kinerja aparat intelijen TNI AL adalah sebagai berikut :

- a) Penataan kurikulum pendidikan intelijen dengan memasukkan pelajaran ekonomi dan hukum agar aparat intelijen mampu mendeteksi dini kerawanan di bidang itu.
  - b) Revisi tentang buku – buku pelajaran yang menyangkut taktik dan teknik penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan.
  - c) Payung hukum nasional berbentuk UU RI tentang Intelijen yang mengatur kewenangan intelijen TNI AL sebagai pedoman bagi personel yang melaksanakan tugas di lapangan.
- 2) Peranti Keras. Mencermati berbagai ancaman yang semakin kompleks, sudah seharusnya peralatan pendukung kerja intelijen TNI AL dimodernisasi dan ditingkatkan agar terbentuk intelijen yang profesional dan proporsional guna menjawab tantangan dan ancaman. Diperlukan peranti keras berupa peralatan pendukung kerja intelijen yang canggih sesuai perkembangan zaman dan teknologi. Standarisasi material khusus intelijen (Telegram Kasal No 002/PAM/2010 TWU 0215.0900 penyebutannya telah berubah menjadi peralatan pendukung kerja intelijen) yang dibutuhkan oleh Intelijen TNI AL, diatur dalam Petunjuk Teknik Dinas Pengamanan AL No Juknik/02/II/2008 tanggal 2 Februari 2008 yang terdiri dari :
- a) Peralatan pendukung kerja intelijen untuk komunikasi.
  - b) Peralatan pendukung kerja intelijen untuk audio/video.
  - c) Peralatan pendukung kerja intelijen untuk deteksi visual.
  - d) Peralatan pendukung kerja intelijen untuk deteksi pengamanan.

- d. Sistem dan Mekanisme Kerja Intelijen.
- 1) Sistem Intelijen. Sistem dalam melaksanakan kegiatan dan operasi intelijen sudah ada, yaitu Roda Perputaran Penyelidikan atau Roda Perputaran Intelijen.
  - 2) Mekanisme Kerja Intelijen. Keberhasilan pelaksanaan tugas akan maksimal bila di dukung mekanisme kerja baik.
- e. Kontribusi. Data intelijen yang akurat sesuai keperluan penegakan hukum akan menghasilkan keberhasilan tugas operasi yang telah direncanakan.
- f. Indikator Keberhasilan. Pada upaya optimalisasi strategi intelijen Lantamal II Padang adalah sebagai berikut :
- 1) Terpenuhinya personel intelijen secara kuantitas dan kualitas untuk dapat mengcover seluruh perairan barat Sumatera yang sedemikian luasnya.
  - 2) Terpenuhinya peranti lunak dan peranti keras yang memadai, baik secara kuantitas dan kualitas.
  - 3) Terpenuhinya sistem dan mekanisme kerja intelijen yang sistematis sehingga dapat memberikan sistem pelaporan secara cepat dan akurat yang di dukung bank data yang *up to date*.

Apabila hal – hal yang menjadi harapan strategi intelijen Lantamal II Padang tersebut dapat tercapai. Dengan demikian akan memberikan kontribusi secara signifikan terhadap strategi Lantamal II Padang dalam melaksanakan pengamanan Obvitnas. Khususnya yang berada di wilayah kerjanya seperti Pelabuhan Teluk Bayur.

#### **4.2.1.2. Aspek Strategi Pertahanan**

Dalam kaitannya dengan tujuan dasar strategi militer, TNI AL memiliki dua fungsi dasar, yaitu pengendalian laut dan proyeksi kekuatan. Di mana terdapat hubungan saling kebergantungan di antara keduanya.

- a. Pengendalian Laut. Pada dasarnya bertujuan untuk menjamin kepentingan nasional di dan lewat laut, dan mampu secara optimal memanfaatkan potensi laut yang dimilikinya untuk kepentingan bangsa

sendiri, serta mampu mencegah/menghambat pemanfaatan oleh bangsa lain yang dapat merugikan kepentingan sendiri.

b. Proyeksi Kekuatan. Terbagi ke dalam :

- 1) Proyeksi kekuatan sebagai bagian dari pengendalian laut, yaitu penggunaan kapal – kapal TNI AL dan pasukan Marinir untuk memastikan pengendalian dan terpeliharanya keamanan di laut dan daerah penting lainnya.
- 2) Proyeksi kekuatan untuk mendukung kampanye kekuatan darat dan udara, di mana spektrum yang lebih luas ini meliputi operasi amfibi, penggunaan pesawat angkut udara, bantuan tembakan kapal terhadap sasaran di darat, dalam mendukung kampanye udara dan darat.

Saat ini berbagai bentuk ancaman non tradisional yang timbul di dalam negeri maupun yang bersifat lintas negara dapat menimbulkan kekhawatiran masyarakat internasional. Karena dianggap sebagai ancaman terhadap stabilitas keamanan nasional negara, keamanan regional, maupun keamanan global. Ancaman sudah tidak lagi mengenal batas – batas tradisional negara dan memiliki keterkaitan antara aspek militer dan non militer, untuk itu harus diselesaikan secara simultan dalam tataran nasional, regional, dan internasional. Strategi Keamanan Nasional haruslah didasarkan pada tiga pilar utama yang mengasumsikan bahwa :

- a. Ancaman tidak lagi mengenal batas – batas tradisional Negara.
- b. Ancaman memiliki keterkaitan antara aspek militer dan non militer.
- c. Ancaman harus diselesaikan secara simultan dalam tataran nasional, regional, dan internasional (Anggoro dan Perwita, 2006).

Konflik – konflik di masa depan akan terus bergeser ke arah aspek – aspek non – militer, seperti politik, pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), sosial ekonomi, dan lingkungan hidup. Salah satu contoh yang menjadi ancaman besar saat ini adalah terorisme, karena tidak saja sebagai ancaman serius terhadap perdamaian dan keamanan internasional, tetapi juga berdampak pada perkembangan sosial dan ekonomi negara – negara

di kawasan. Terorisme telah berdimensi luas terkait dengan berbagai aspek kehidupan dan telah melampaui batas – batas negara yang merusak dan menghancurkan kehidupan manusia. Seperti, menurunnya kegiatan perekonomian, terganggunya HAM dan budaya masyarakat beradab, sehingga sepatutnyalah apabila dikategorikan sebagai *trans national crime*. Terorisme tidak hanya melakukan kegiatan teror di daratan saja, melainkan dapat juga dilakukan di laut, khususnya terhadap Obvitnas di laut untuk mengganggu stabilitas keamanan (ASEAN, 2002).

Semua negara yang memiliki wilayah laut agar menyadari bahwa kedaulatannya sangat bergantung kepada strategi melakukan pengawasan secara fisik terhadap wilayah laut yang dikuasainya (Bynkershoek, 1703). Dengan demikian harus disadari bahwa untuk menjaga kedaulatan suatu negara tergantung dari strategi pertahanannya (Markas Besar TNI AL, 2009). Dalam hal pengamanan Obvitnas Pelabuhan Teluk Bayur dan daerah di sekitarnya di wilayah perairan Selatan Sumatera Barat, jangan sampai tindakan pengamanan diambil alih oleh pihak negara asing maupun tenaga pengamanan swasta, karena menyangkut kedaulatan wilayah NKRI.

Berdasarkan kondisi *existing* di Lantamal II Padang seperti yang disampaikan dalam uraian di atas. Secara umum strategi pertahanan yang merupakan gabungan dari profesionalitas prajurit dan kesiapan Alutsista untuk melaksanakan kegiatan penegakan kedaulatan dalam rangka menjaga keutuhan wilayah NKRI yang dilaksanakan oleh Lantamal II Padang masih kurang optimal. Hal tersebut disebabkan minimnya unsur – unsur patroli yang ada dihadapkan dengan luas wilayah yang menjadi tanggung jawab Lantamal II Padang. Namun demikian untuk meningkatkan profesionalitas prajurit, Lantamal II Padang selalu melaksanakan kegiatan pembinaan latihan baik berupa teori di dalam ruangan/pencerahan, maupun latihan gabungan dengan instansi lainnya.

Lantamal II Padang juga melaksanakan Latihan Geladi Tugas Tempur dan latihan Pangkalan Tingkat 1 sampai dengan Tingkat 4, serta

latihan F1QR/Pasukan Reaksi Gerak Cepat secara rutin setiap tri wulan. Hal ini terus dilaksanakan secara berkesinambungan untuk menciptakan kesiapsiagaan Lantamal II Padang dalam mendukung pelaksanaan tugas pokoknya. Lantamal II Padang juga melaksanakan Pembinaan Potensi Nasional Kekuatan Maritim guna meningkatkan kemampuan pertahanan pangkalan.

Selayaknya, strategi pertahanan laut yang diharapkan dapat dilaksanakan di Lantamal II Padang agar berpedoman kepada Keputusan Kasal No Kep/07/II/2001 tentang Doktrin TNI AL “Eka Sasana Jaya”, yaitu memiliki strategi peperangan di atas permukaan, strategi peperangan di bawah permukaan, strategi proyeksi kekuatan ke darat, strategi K3I (Komando, Kendali, Komunikasi, dan Informasi), strategi peperangan elektronika dan strategi sabotase bawah air (Markas Besar TNI AL, 2001). Kaitannya dalam melaksanakan kegiatan pengamanan Obvitnas Pelabuhan Teluk Bayur dan wilayah di sekitarnya di perairan Selatan Sumatera Barat, hendaknya strategi pertahanan yang harus dimiliki oleh Lantamal II Padang adalah strategi sabotase bawah air. Di mana diharapkan dengan strategi ini dapat mengurangi atau menghancurkan kekuatan lawan secara tersembunyi guna menggagalkan segala bentuk ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan terhadap semua kepentingan nasional di dan atau lewat laut.

Dari apa yang disampaikan di atas menunjukkan bahwa dalam hal ini Lantamal II Padang mengemban peran militer. Peran ini dilaksanakan dalam rangka menegaskan kedaulatan negara di laut dengan cara pertahanan negara dan penangkalan, menyiapkan kekuatan untuk persiapan perang, menangkal setiap ancaman militer melalui laut, melindungi dan menjaga perbatasan laut dengan negara tetangga, serta menjaga stabilitas keamanan kawasan maritim. Seperti apa yang tercantum dalam asas peran universal AL berdasarkan sudut pandang dari teori Kent Booth.

#### 4.2.1.3. Aspek Strategi Pengamanan

Berdasarkan kondisi *existing* di Lantamal II Padang seperti yang disampaikan dalam uraian di atas. Secara umum strategi pengamanan yang dilaksanakan oleh Lantamal II Padang adalah berupa patroli keamanan laut terbatas. Mengingat kondisi sarana patroli yang dimiliki saat ini ada yang tidak siap dan rata – rata sudah berusia pakai cukup lama. Sehingga kemampuan fisik sarana patroli tersebut sangat rentan dihadapkan dengan kondisi gelombang dan cuaca apabila terjadi kondisi buruk.

Terkait pengaman Obvitnas berdasarkan UU RI No 34 Tahun 2004 Pasal 7 Ayat 2 B Angka 5 bahwa TNI memiliki tugas untuk mengamankan Obvitnas yang bersifat strategis. Sedangkan Polri dapat meminta bantuan kekuatan berdasarkan Keppres RI No 63 Tahun 2004. Mengacu pada uraian di atas dapat disimpulkan bahwa adanya kerja sama antara TNI AL dengan PT. Pelindo II, berupa pengamanan Pelabuhan Teluk Bayur.

Pengamanan Obvitnas Pelabuhan Teluk Bayur oleh TNI AL ini termasuk ke dalam kategori Operasi Pengamanan Non Permanen Bersifat Khusus. Pelabuhan Teluk Bayur yang dikelola oleh PT. Pelindo II masih mengalami tindakan pencurian, meskipun jumlahnya relatif rendah. Tindakan pencurian ini dilakukan oleh orang – orang yang tidak bertanggung jawab. Strategi pengamanan laut yang diharapkan dapat dilaksanakan di Lantamal II Padang agar berpedoman pada Keputusan Kasal No Kep/07/II/2001 tentang Doktrin TNI AL “Eka Sasana Jaya”. Yaitu : strategi memelihara stabilitas keamanan di perairan yurisdiksi nasional, strategi menegakkan hukum di laut, dan strategi melaksanakan pengamanan Obvitnas di laut (Markas Besar TNI AL, 2001).

Dari ketiga strategi tersebut, strategi pengamanan Obvitnas di laut harus dapat direncanakan dan dipersiapkan dengan baik oleh Lantamal II Padang sehingga dalam pelaksanaannya tidak mendapatkan banyak kendala. Perencanaan merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk menetapkan tujuan yang akan dicapai beserta cara – cara yang akan

ditempuh dalam rangka mencapai tujuan tersebut. Dengan demikian diharapkan dapat memberikan kejelasan arah dan tujuan bagi setiap kegiatan, sehingga setiap kegiatan dapat dilaksanakan dengan seefisien dan seefektif mungkin.

Menurut Handoko (1995) terdapat 9 manfaat dilaksanakannya kegiatan perencanaan pada tahapan awal kegiatan, yaitu :

- a. Membantu manajemen untuk menyesuaikan diri dengan perubahan – perubahan lingkungan.
- b. Membantu dalam kristalisasi persesuaian pada masalah – masalah utama.
- c. Memungkinkan manajer memahami keseluruhan gambaran.
- d. Membantu penempatan tanggung jawab lebih tepat.
- e. Memberikan cara pemberian perintah untuk beroperasi.
- f. Memudahkan dalam melakukan koordinasi di antara berbagai bagian organisasi.
- g. Membuat tujuan lebih khusus, terperinci, dan lebih mudah dipahami.
- h. Meminimumkan pekerjaan yang tidak pasti.
- i. Menghemat waktu, usaha, dan dana.

Kebijakan dalam kegiatan pengamanan Obvitnas yang dilakukan oleh Lantamal II Padang terhadap Pelabuhan Teluk Bayur dan wilayah di sekitarnya yang berada di perairan Barat Pulau Sumatera dilaksanakan berdasarkan Keputusan Kasal No Kep/1808/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013. Tentang Buku Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Operasi Pengamanan Obvitnas oleh TNI AL (PUM-5.115). Sebagai petunjuk dan pedoman bagi Satker di lingkungan TNI AL dalam menyelenggarakan operasi pengamanan Obvitnas agar penyelenggaraannya dapat berjalan lancar dan mencapai hasil yang optimal.

Pengamanan adalah usaha, pekerjaan, dan kegiatan, serta tindakan yang dilaksanakan secara terus – menerus dan terencana, untuk mencegah, mengusut, melumpuhkan, menumpas, dan menghancurkan usaha – usaha, pekerjaan, dan kegiatan penyelidikan, sabotase, dan

penggalangan oleh pihak lawan (Pusat Pendidikan Intelijen Maritim Komando Pengembangan Dan Pendidikan AL, 2007). Pengamanan adalah segala usaha, pekerjaan, dan kegiatan dalam rangka mencegah, penangkalan, dan penanggulangan serta penegakan hukum terhadap setiap ancaman dan gangguan yang terjadi (Merdisyam, 2006). Sedangkan pengamanan Obvitnas adalah segala usaha, pekerjaan, dan kegiatan dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan, serta penegakan hukum terhadap setiap ancaman dan gangguan keamanan yang ditujukan kepada Obvitnas. "Objek Vital" sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Keppres RI No 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Obyek Vital.

Beberapa kriteria/indikator yang dapat digunakan untuk menilai kinerja sistem pengamanan Obvitnas antara lain sebagai berikut :

- a. Kebijakan Pengamanan Internal.
- b. Perencanaan Pengamanan.
- c. Standar dan Prosedur Pengamanan.
- d. Kualifikasi Personil Tenaga Pengamanan.
- e. Teknologi Pengamanan.
- f. Sistem Kerja Sama dan Koordinasi dengan Aparat Kepolisian.
- g. Kerja Sama Pengamanan Swakarsa dengan Masyarakat dan *Stakeholders*.
- h. Pengawasan dan Pengendalian.
- i. Evaluasi Berkala.
- j. Review dan Perbaikan Sistem Pengamanan (Polri, 2005).

Untuk memperbaiki strategi personel dalam pengamanan Obvitnas, dapat diselenggarakan pendidikan dan pelatihan khusus. Sedangkan untuk mendukung sistem pengamanan Obvitnas harus didukung sarana dan prasarana pengamanannya, seperti kendaraan operasional/kapal untuk bergerak cepat ke lokasi jika terjadi gangguan keamanan. Selain itu juga dibutuhkan teknologi pengamanan untuk penanggulangan gangguan keamanan atas Obvitnas, seperti sarana sistem komunikasi dan informasi

serta sarana pengendalian massa. Dalam rangka pencegahan dan penangkalan, pengamanan Obvitnas harus mengembangkan teknologi sistem peringatan dini (*early warning system*) yang mampu mendeteksi dini setiap potensi ancaman gangguan keamanan.

Upaya Lantamal II Padang dalam memperbaiki strategi pengamanan laut sering kali dihadapkan dengan adanya beberapa keterbatasan, antara lain dalam hal ketersediaan anggaran. Ketersediaan anggaran menjadi penghambat dalam pelaksanaan berbagai kegiatan, sehingga pelaksanaan tidak sesuai dengan yang direncanakan, karena harus disesuaikan dengan ketersediaan anggaran yang ada. Kaitannya dengan keterbatasan anggaran yang diterima oleh Lantamal II Padang sehingga mengalami kesulitan dalam menggerakkan unsur – unsur patroli. Akibat dari tidak melautnya kapal berdampak kepada keterampilan personel (Anak Buah Kapal). *Skill* yang diberikan untuk membuat mereka *instinctive* melakukan sebuah operasi di kapal ikut menurun karena kebiasaan setiap hari latihan selama berada di laut dengan ombak yang memberikan tantangan.

Latihan bisa dilakukan di darat saat sandar, sehingga pada saat mereka ke laut insting mereka menghadapi cuaca, alam, dan lain sebagainya akan sedikit berbeda. Artinya, kendala yang ada agak signifikan terhadap profesionalisme atau *outcome* dari Lantamal II Padang. Keterbatasan anggaran mengakibatkan sektor patroli harus diatur secara ketua sesuai prioritas keamanan. Demikian halnya dengan penempatan personel di Pelabuhan Teluk Bayur yang hanya akan ditempatkan apabila mendapat informasi dari Tim Intelijen tentang adanya ancaman atau gangguan yang akan terjadi. Idealnya ada personel yang *stand by* untuk menjaga Pelabuhan Teluk Bayur.

#### **4.2.1.4. Aspek Strategi Dukungan**

Pengertian tentang Lanal (*Naval Base*) berdasarkan buku *The Department of Defense Dictionary of Military and Associated Terms* di definisikan sebagai : *A Naval Base primarily for support of the forces afloat, contiguous to a port or an anchorage, consisting of activities or facilities for*

*which the Navy has operating responsibilities, together with interior lines of communication and the minimum surrounding area necessary for local security (normally, not greater than an area of 40 square miles)* (US Military 2009). Dari pernyataan tersebut maka sebuah Lanal memiliki tugas utama untuk mendukung seluruh kekuatan laut, menyediakan fasilitas berlabuh untuk kapal – kapal perang, menyediakan daerah lego jangkar, dan menyediakan fasilitas – fasilitas penunjang lainnya yang berkaitan dengan tugas – tugas operasi yang akan dilaksanakan oleh AL. Pangkalan juga harus memberikan fasilitas komunikasi yang diperlukan untuk keamanan lokal, dan juga harus memberikan dukungan administrasi dan logistik.

Dalam rangka mendukung satuan operasi dalam melaksanakan tugas pengamanan Obvitnas Pelabuhan Teluk Bayur. Seharusnya Lantamal yang disiapkan untuk mendukung kegiatan tersebut selayaknya harus memiliki strategi dukungan yang memadai. Strategi dukungan yang dimaksud, sebagaimana disebutkan dalam Keputusan Kasal No Kep/07/II/2001 tentang Doktrin Angkatan Laut “Eka Sasana Jaya” adalah memiliki Faslabuh, Fasharkan, Fasbek, dan Faswatpers (Markas Besar TNI AL, 2001).

Berdasarkan kondisi *existing* di Lantamal II Padang seperti yang disampaikan dalam uraian di atas, bahwa secara umum strategi dukungan Lantamal II Padang masih kurang optimal. Disebabkan adanya keterbatasan sebagai berikut : (1) Untuk Faslabuh Lantamal II Padang memiliki dermaga yang bisa digunakan untuk mendukung operasional kapal – kapal TNI AL. Akan tetapi apabila ada KRI dengan ukuran besar (panjang +75 m) yang melakukan kunjungan, Lantamal II Padang saat ini menggunakan Faslabuh milik PT. Pelindo II unit Pelabuhan Teluk Bayur yang dipinjamkan kepada Lantamal II Padang. (2) Lantamal II Padang tidak memiliki Fasharkan. Untuk melaksanakan dukungan perbaikan kapal, Lantamal II Padang bekerja sama dengan pihak lain, yaitu PT. CMS Banten, PT. Palindo Marine Shipyard Batam, dan PT. Pelangi Indah Nusantara Jakarta. (3) Strategi dukungan Fasbek masih kurang memadai. Lantamal II

Padang hanya memiliki gudang yang dipergunakan untuk tempat penyimpanan perbekalan umum. (4) Untuk mendukung kegiatan perawatan personel, Lantamal II Padang memiliki beberapa fasilitas yang sudah cukup memadai.

Strategi AL tidak hanya mengenai peperangan. Terdapat juga pengembangan taktik, logistik, komando, dan kendali pemerintah, komunikasi, kapal, senjata, dan aspek AL lainnya beserta teknologi. Kondisi demikian haruslah dapat dibenahi sehingga dapat terwujud strategi dukungan yang memadai yang dimiliki oleh Lantamal II Padang untuk dapat melaksanakan tugas pengamanan Obvitnas Pelabuhan Teluk Bayur yang dikelola oleh PT. Pelindo II dan wilayah sekitarnya di perairan Selatan Sumatera Barat.

Faktor strategi dukungan menjadi faktor yang tidak kalah penting dibandingkan dengan strategi – strategi lainnya. Karena menyangkut dengan ketahananlamaan dan keberlangsungan suatu operasi pengamanan yang dilakukan. Strategi dukungan yang dimiliki oleh Lantamal II Padang saat ini masih perlu ditingkatkan guna mendukung operasi pengamanan Lantamal II Padang dalam melaksanakan kegiatan pengamanan di Obvitnas Pelabuhan Teluk Bayur yang berada di wilayah kerjanya. Peningkatan strategi dukungan tersebut harus dapat mendukung dan menunjang kebutuhan pelaksanaan kegiatan operasi yang dilaksanakan oleh Lantamal II Padang.

#### **4.2.2. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Strategi Lantamal II Padang Dalam Pengamanan Obvitnas**

Kegiatan Lantamal II Padang dalam melaksanakan pengamanan Obvitnas Pelabuhan Teluk Bayur dan wilayah sekitarnya di perairan Barat Pulau Sumatera, tidak terlepas dari kegiatan penegakan hukum itu sendiri. Karena hasil akhir yang diharapkan dari kegiatan pengamanan adalah terciptanya kondisi aman di areal pelabuhan tersebut dari segala bentuk ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Namun demikian,

keamanan laut bukan hanya menyangkut penegakan hukum di laut semata, melainkan bagaimana mewujudkan laut menjadi wilayah yang aman digunakan oleh pengguna dan bebas dari ancaman atau gangguan terhadap berbagai aktivitas penggunaan dan pemanfaatan laut.

Secara etimologis, kata “keamanan” (*security*) berasal dari bahas latin “*securus*” (*es+cura*), yang memiliki makna terbebas dari bahaya, terbebas dari ketakutan (*free from danger, free from fear*). Kata ini juga bisa bermakna dari gabungan kata “*se*” yang berarti tanpa (*without*) dan “*curus*” yang berarti kesulitan (*un – easiness*), apabila digabungkan bermakna kebebasan dari kesulitan. Namun demikian, keamanan laut bukan hanya menyangkut penegakan hukum di laut semata. Melainkan bagaimana mewujudkan laut menjadi wilayah yang aman digunakan oleh pengguna dan bebas dari ancaman atau gangguan terhadap berbagai aktivitas penggunaan dan pemanfaatan laut (Markas Besar TNI AL, 2002).

Untuk dapat mengukur faktor – faktor yang mendukung dalam kegiatan pengamanan Lantamal II Padang terhadap Obvitnas yang selama ini telah berjalan, peneliti akan membandingkannya dengan pendapat Profesor Soekanto, seorang ahli hukum. Menurut Soekanto inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai – nilai yang terjabarkan di dalam kaidah – kaidah yang mantap dan mengejewantah dan sikap tidak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Sedangkan permasalahan pokok pada penegakan hukum terletak pada faktor – faktor yang mempengaruhinya, di mana faktor – faktor tersebut mempunyai arti yang netral. Sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi dari faktor – faktor tersebut. Agar hukum dapat berfungsi dan berjalan dengan baik, sangatlah diperlukan keserasian dalam hubungan antara faktor – faktor tersebut.

a. Faktor UU, di mana kemungkinannya adalah bahwa terjadi ketidakcocokan dalam peraturan perundang – undangan mengenai

bidang kehidupan tertentu, ketidakcocokan antar peraturan perundang – undangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan, atau ketidakserasian antara hukum tercatat dengan hukum kebiasaan, dan seterusnya. Dalam pembahasan ini akan dibatasi pada UU saja. Pengertian UU dalam arti material adalah peraturan tertulis yang berlaku secara umum dan dibuat oleh Pelaksana Pusat maupun Daerah yang sah, mencakup :

- 1) Peraturan pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau suatu golongan tertentu saja maupun yang berlaku secara umum di sebagian wilayah negara.
- 2) Peraturan setempat yang hanya berlaku di suatu tempat atau daerah tertentu saja.

Agar pembuatan UU mencapai tujuannya sehingga efektif bagi terlaksananya penegakan hukum, harus berpedoman pada asas – asas sebagai berikut :

- 1) UU tidak berlaku surut, artinya hanya diterapkan terhadap peristiwa yang kejadiannya setelah UU tersebut berlaku.
  - 2) UU yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
  - 3) UU yang bersifat khusus, menyampingkan UU yang bersifat umum.
  - 4) UU yang berlaku belakangan, membatalkan UU yang berlaku terdahulu.
  - 5) UU tidak dapat diganggu gugat.
  - 6) UU merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat maupun pribadi, melalui suatu pelestarian ataupun pembaharuan (inovasi) (Soekanto dan Purbacaraka, 1979).
- b. Faktor Penegak Hukum, yaitu pihak – pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Apabila peraturan perundang – undangan yang ada sudah memadai, akan tetapi mental penegak hukum kurang baik ataupun kapabilitasnya tidak handal, maka akan terjadi gangguan pada

sistem penegakan hukum. Halangan – halangan yang kemungkinan dijumpai terhadap penerapan peran yang seharusnya dari golongan panutan atau penegak hukum, kemungkinan berasal dari dirinya atau faktor – faktor lain di sekeliling/lingkungannya. Hal – hal yang memerlukan penanggulangan tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi.
  - 2) Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi.
  - 3) Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi.
  - 4) Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan material.
  - 5) Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme (Soekanto, 1983).
- c. Faktor Sarana atau Fasilitas, yaitu sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Hal ini sangat diperlukan juga selain kedua faktor di atas guna terjalinnya proses penegakan hukum. Tanpa didukung sarana dan prasarana yang memadai, mustahil penegakan hukum dapat berlangsung dengan aman. Sarana dan prasarana yang dimaksud antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan lain sebagainya. Sarana atau fasilitas memiliki peranan yang sangat penting di dalam upaya – upaya penegakan hukum. Tanpa adanya sarana/fasilitas, mustahil penegak hukum dapat menyerasikan peranan yang seharusnya dengan yang aktual.
- d. Faktor Masyarakat, yaitu lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan sehingga diperoleh kepatuhan terhadap hukum dari perilaku masyarakat. Suatu penegakan hukum berasal dari masyarakat bertujuan mencapai terjadinya kedamaian di lingkungan masyarakat itu sendiri.

- e. Faktor Kebudayaan, sistem hukum pada dasarnya mencakup nilai – nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai – nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap buruk sehingga patut untuk dihindari. Kedua hal tersebut merupakan pasangan nilai – nilai yang mencerminkan keadaan ekstrem yang harus diserasikan.

Untuk itu akan dibahas faktor – faktor yang menghambat dan faktor yang menguntungkan untuk memperbaiki strategi Lantamal II Padang dalam melaksanakan tugas pengamanan Obvitnas Pelabuhan Teluk Bayur yang berada di wilayah kerjanya, sebagai perpanjangan tangan dari TNI AL.

#### **4.2.2.1. Faktor Penghambat (*Weakness*)**

##### **a. SDM**

Masih banyak kejadian di daerah terlambat untuk diketahui dan diantisipasi sejak awal membuktikan bahwa intelijen belum mampu melaksanakan deteksi dini dengan cermat diakibatkan kondisi SDM aparat intelijennya yang belum memadai dihadapkan pada tugas yang diembannya.

- 1) Kuantitas Personel Lantamal II Padang. Dalam pengisian organisasi intelijen TNI AL, secara keseluruhan jumlah personel terpenuhi 50,2% dari DSP yang dibutuhkan. Jumlah personel Lantamal II Padang saat ini sebanyak 1066 orang sedangkan sesuai dengan DSP seharusnya 2123 orang. Hal ini dapat menimbulkan permasalahan terhadap pengawasan dan penempatan jabatan personel sesuai dengan kebutuhan. Menurut peneliti, kondisi demikian mengakibatkan tidak efisiennya anggaran dalam suatu organisasi, dan tidak menutup kemungkinan akan terjadi kelengahan dalam pengawasan, yang nantinya justru dapat menghambat peran pangkalan itu sendiri dalam melakukan pengamanan terhadap wilayah kerjanya. Kondisi demikian mengakibatkan gelar kekuatan dalam operasi pengamanan Obvitnas menjadi kurang optimal. Dengan kondisi kekurangan personel pada struktur organisasi Lantamal II Padang tersebut tetap akan berdampak pada pemerataan jumlah prajurit TNI AL secara

umum, dan pastinya akan membebani anggaran perawatan personel organisasi TNI AL.

2) Kualitas Personel Lantamal II Padang. Kualitas aparat intelijen belum memadai dan belum mampu menjawab perkembangan situasi yang ada dalam menghadapi ancaman terhadap negara yang muncul saat ini. Kualitas personel Lantamal II Padang yang ada masih belum dapat bekerja secara maksimal untuk melaksanakan kegiatan deteksi dini dan cegah dini serta lapor cepat. Hal ini dapat mengakibatkan pola penindakan yang tidak terlaksana dengan metode yang tepat dan dalam waktu yang cepat. Peran suatu Lanal dalam menciptakan kondisi kewaspadaan pada domain maritim di wilayah kerjanya, akan mempengaruhi dinamika keamanan pada lingkungan sekitarnya. Sebagaimana dengan kondisi demikian jika dicerminkan kepada konsep *Maritime Domain Awareness* (MDA) yang pertama kali digagas oleh *US Navy*. Namun bukan berarti MDA tidak dapat diaplikasikan di negara lain, termasuk di Indonesia. Melalui sederet penyesuaian tentunya MDA ini akan diadopsi mengingat kondisi awal setiap negara berbeda – beda. Bahwa kunci vital terciptanya MDA adalah kelancaran saluran informasi dan intelijen di antara pihak – pihak yang berperan dalam menjaga kondisi maritim yang aman, serta pihak – pihak yang berkepentingan di domain maritim itu sendiri. Sehingga setiap peristiwa yang mengancam keamanan maritim dapat segera direspons dengan cepat oleh setiap pelaku kemaritiman, yang antara lain pemerintah, perusahaan pelayaran, perusahaan ekspedisi, aparat keamanan, serta pengelola Obvitnas (Marsetio, 2013).

Solusi yang dapat ditempuh terhadap SDM agar Lantamal II Padang memiliki strategi yang mumpuni dalam pengamanan Obvitnas untuk menghadapi setiap ancaman terhadap kepentingan nasional di dan atau lewat laut. Diperlukan peningkatan kualitas personel sehingga terpenuhi sesuai kebutuhan organisasi. Pembinaan kuantitas dan kualitas personel Lantamal II Padang melalui tahapan – tahapan sebagai berikut :

- a) Pembinaan Awal. Proses untuk mendapatkan kualitas SDM yang mumpuni harus diawali dengan metode rekrutmen yang benar dengan standar tertentu terhadap anggota TNI AL.
  - b) Pembinaan Lanjutan. Untuk membekali personel agar memiliki kemampuan sesuai dinamika di lapangan baik secara teknik, taktik, maupun kemampuan akademik dilakukan melalui pendidikan lanjutan dan latihan keterampilan agar terjadi peningkatan kualitas SDM sesuai kebutuhan organisasi.
  - c) Penggunaan. Melaksanakan penugasan bagi personel secara bergantian dalam kegiatan rutin atau penugasan operasi, sesuai kebijakan pimpinan TNI AL "*tour of duty*" dan "*tour of area*", untuk meningkatkan profesionalisme. Dalam pelaksanaannya agar senantiasa dilakukan monitoring terhadap personel di lapangan yang dilakukan secara obyektif. Sehingga dapat diketahui personel yang bisa digunakan dan terukur dedikasinya serta loyalitasnya.
- b. Sarana dan Prasarana
- 1) Kuantitas sarana patroli yang dimiliki oleh Lantamal II Padang sangat terbatas jumlahnya jika dihadapkan dengan wilayah kerja yang menjadi tanggung jawabnya. Kondisi demikian mengakibatkan terbatasnya pelaksanaan operasi patroli di laut, yang ditujukan untuk menangkal terjadinya berbagai macam bentuk pelanggaran di laut. Salah satunya adalah aktivitas yang membahayakan obyek – obyek vital. Menurut peneliti, kondisi demikian sangat mempengaruhi kinerja Lanal dalam melakukan pengamanan obyek vital. Sebagaimana tercantum dalam tugas TNI AL pada UU RI No 34 Tahun 2004 tentang TNI Pasal 9 yang menyebutkan tentang menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi. Peneliti menafsirkan, obyek vital di sini sebagai obyek yang menjadi sumber pemasukan untuk negara dan sarana distribusi dengan nilai ekonomis tinggi yang sangat mempengaruhi keamanan

nasional, dan juga kapasitas elemen – elemen yang berperan dalam menciptakan kondisi keamanan.

- 2) Kualitas sarana patroli yang ada belum dapat bekerja secara maksimal untuk melaksanakan kegiatan patroli karena kondisi sudah cukup tua secara rata – rata usia. Kondisi ini sangat mempengaruhi pola operasi yang dilakukan dihadapkan pada karakteristik medan operasi (Samudera Hindia). Menurut penalti faktor tersebut dapat mengurangi pula peran Lantamal II Padang dalam melaksanakan tugas pengamanan terhadap obyek vital, sehingga akan mengurangi kualitas peran polisionil (*constabulary*) sebagaimana disebutkan dalam teori Kent Booth (Teori Trinitas AL).

Strategi dukungan Lantamal II Padang masih kurang optimal berdampak terhadap tugas dan kewajiban sebagai Lanal dalam mendukung seluruh kekuatan laut, menyediakan Faslabuh untuk kapal – kapal perang, menyediakan daerah lego jangkar, menyediakan fasilitas penunjang lainnya yang berkaitan dengan tugas – tugas operasi yang akan dilaksanakan oleh AL. Hal ini disebabkan karena berbagai keterbatasan yang ada di Lantamal II Padang, seperti Faslabuh yang ada tidak bisa digunakan untuk mendukung operasional kapal – kapal TNI AL yang berukuran besar (+75 m). Saat ini Faslabuh yang digunakan untuk mendukung operasional kapal – kapal TNI AL yang berukuran besar (+75 m) tersebut adalah milik PT. Pelindo II unit Pelabuhan Teluk Bayur yang dipinjamkan kepada Lantamal II Padang. Lantamal II Padang juga tidak memiliki Fasharkan. Untuk melaksanakan dukungan perbaikan kapal, Lantamal II Padang bekerja sama dengan pihak lain, yaitu PT. CMS Banten, PT. Palindo Marine Shipyard Batam, dan PT. Pelangi Indah Nusantara Jakarta. Strategi dukungan Fasbek Lantamal II Padang masih kurang memadai, Lantamal II Padang hanya memiliki gudang yang dipergunakan untuk tempat penyimpanan perbekalan umum. Solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan sarana dan prasarana yang

dimiliki, peneliti sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Soekanto dan Purbacaraka (1983) , sebagai berikut :

- 1) Yang tidak ada haruslah diadakan yang baru betul.
- 2) Yang rusak atau salah harus diperbaiki atau dibetulkan.
- 3) Yang kurang agar dilakukan penambahan.
- 4) Yang macet agar segera dilancarkan.
- 5) Yang mundur atau merosot segera dimajukan atau ditingkatkan.

c. Keterbatasan Anggaran

Dasar dalam kegiatan pengamanan Obvitnas yang dilakukan oleh TNI AL di Lantamal II Padang berpedoman kepada Keputusan Kasal No Kep/1808/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013 Tentang Buku Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Operasi Pengamanan Obvitnas oleh TNI AL (PUM-5.115) yang menyebutkan bahwa dukungan logistik Operasi Pengamanan Non Permanen Obvitnas oleh TNI AL dalam Pengamanan Bersifat Khusus, seperti Pelabuhan Teluk Bayur yang dikelola oleh PT. Pelindo II dan wilayah sekitarnya di perairan Selatan Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

- 1) Dukungan bekal awal dan bekal ulang operasi menjadi tanggung jawab *stakeholder* (pengelola Obvitnas).
- 2) Dukungan pemeliharaan dan perbaikan Alutsista menjadi tanggung jawab Markas Besar TNI AL.

Ketersediaan anggaran pengamanan yang dialokasikan oleh PT. Pelindo II unit Pelabuhan Teluk Bayur sangat menentukan untuk melaksanakan penyelenggaraan pengamanan di Pelabuhan Teluk Bayur itu sendiri, karena anggaran adalah salah satu kunci dari implementasi total kekuatan dalam gelar pengamanan. Dalam menentukan jumlah anggaran pengamanan tersebut sangat bergantung pada kemampuan keuangan PT. Pelindo II selaku pengelola Obvitnas Pelabuhan Teluk Bayur yang berada di perairan Selatan Provinsi Sumatera Barat. Pelabuhan Teluk Bayur adalah aset PT. Pelindo II yang termasuk ke dalam wilayah kerja Lantamal II Padang. Dalam pengamanannya

dilaksanakan oleh PT. Pelindo II bekerja sama dengan Lantamal II Padang. Lantamal II Padang hanya dapat melaksanakan pengamanan apabila ada permintaan dari pihak PT. Pelindo II, dan juga apabila ada informasi tentang status kerawanan yang meningkat dari Tim Intelijen. Hal ini dikarenakan keterbatasan anggaran pengamanan, sehingga kegiatan operasi pengamanan tidak bisa dilakukan secara terus – menerus.

#### **4.2.2.2. Faktor Pendukung (*Oppurtunity*)**

##### **a. Faktor Payung Hukum**

Menurut Soekanto (1983), bahwa permasalahan dalam penegakan hukum yang berasal dari undang – undang kemungkinan disebabkan oleh :

- 1) Tidak diikutinya asas – asas berlakunya UU.
- 2) Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk penerapan pelaksanaan UU.
- 3) Terdapat ketidakjelasan arti dari kata – kata di dalam UU yang mengakibatkan kesimpangsiuran penafsiran serta penerapannya.

Dalam melaksanakan kegiatan pengamanan Obvitnas Pelabuhan Teluk Bayur dan wilayah sekitarnya di perairan Barat Pulau Sumatera. Mengacu pada peraturan – peraturan dan perundang – undangan RI yang berlaku. Hal tersebut menjadi dasar hukum bagi TNI AL dalam melaksanakan tugas pengamanan Obvitnas. Dasar kebijakan bagi TNI AL dalam hal ini Lantamal II Padang dalam melaksanakan pengamanan Obvitnas di wilayah kerjanya berupa Pelabuhan Teluk Bayur dan wilayah sekitarnya di perairan Selatan Sumatera Barat adalah Keputusan Kasal No Kep/1808/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013. Tentang Buku Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Operasi Pengamanan Obvitnas oleh TNI AL (PUM-5.115). Dalam kebijakan tersebut memberikan petunjuk dan pedoman bagi Satker di lingkungan TNI AL dalam menyelenggarakan operasi pengamanan Obvitnas agar penyelenggaraannya dapat berjalan lancar dan mencapai hasil yang

optimal. Perumusan kebijakan pengamanan Obvitnas tersebut disusun berdasarkan ketentuan hukum penyelenggaraan pengamanan Obvitnas, yaitu :

- 1) UU RI No 34 Tahun 2004 tanggal 16 Oktober 2004 tentang TNI.
  - a) Bab IV Pasal 7 Ayat 2 B Angka 5 tentang tugas pokok TNI dalam OMSP menyebutkan salah satu tugas pokok TNI dalam OMSP adalah mengamankan Obvitnas yang bersifat strategis.
  - b) Bab IV Pasal 7 Ayat 3 ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada poin 1) dilaksanakan berdasarkan keputusan politik negara.
  - c) Pasal 9 Huruf B salah satu tugas TNI AL adalah menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional, sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi.
- 2) Keppres RI No 63 Tahun 2004 tanggal 5 Agustus 2004 tentang pengamanan Obvitnas.
  - a) Pengelola Obvitnas bertanggung jawab atas penyelenggaraan pengamanan Obvitnas masing – masing berdasarkan prinsip pengamanan internal.
  - b) Polri berkewajiban memberikan bantuan pengamanan terhadap Obvitnas.
  - c) Dalam melaksanakan pengamanan obvitnas, Polri dapat meminta bantuan kekuatan TNI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Hal ini mengandung arti bahwa Polri dapat meminta bantuan kepada TNI. Akan tetapi bukan berarti TNI harus menunggu permintaan Polri apabila menemukan pihak – pihak tertentu bermaksud untuk mengganggu dan mengancam keamanan Obvitnas yang bersifat strategis.
  - d) Pengamanan Obvitnas yang merupakan bagian organik atau termasuk dalam lingkungan TNI dilakukan oleh TNI.

Dengan demikian ditinjau dari aspek hukum, penyelenggaraan kegiatan pengamanan Obvitnas yang dilaksanakan oleh TNI AL di Lantamal II

Padang di wilayah kerjanya telah memiliki payung hukum dalam pelaksanaan tugasnya di lapangan. Faktor hukum yang menjadi faktor yang menguntungkan ini harus bisa dimanfaatkan oleh Lantamal II Padang untuk dapat melaksanakan tugas – tugas pengamanan tersebut secara maksimal. Karena sudah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Pembagian tugas – tugas antara unsur – unsur pelaksana harus dapat menjalankan tugas, peran, dan fungsi masing – masing dalam berupaya melaksanakan tugas dengan baik. Karena semuanya telah diatur dengan baik dalam Keputusan Kasal No Kep/1808/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013. Tentang Buku Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Operasi Pengamanan Obvitnas oleh TNI AL (PUM-5.115).

b. Faktor Lingkungan Masyarakat

Faktor masyarakat yaitu lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Sehingga diperoleh kepatuhan terhadap hukum dari perilaku masyarakat yang bertujuan mencapai terjadinya kedamaian di lingkungan masyarakat itu sendiri. Dalam lingkup yang dimaksud dengan faktor masyarakat dalam pembahasan tulisan ini adalah seluruh *stakeholder* yang berperan dalam menjaga stabilitas keamanan di sekitar Obvitnas Pelabuhan Teluk Bayur, yang terdiri dari TNI/Polri, Pemda, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat nelayan di sekitar lokasi Obvitnas. Kondisi ekonomi dan sosial masyarakat setempat turut berpengaruh dalam penciptaan kondisi keamanan laut di sekitar areal obyek vital tersebut. Bukan rahasia bahwa kondisi perekonomian masyarakat pesisir Indonesia sebagian belum dalam taraf yang mapan. Apalagi dikaitkan dengan keberadaan penduduk di daerah perkampungan pesisir yang kumuh sebagian besar masih tergolong dalam tingkat ekonomi lemah serta jauh dari sektor pembangunan. Selama masalah ini tidak terpecahkan, ancaman perompakan di laut akan selalu muncul dan kita akan selalu disudutkan sebagai negeri para perompak oleh dunia internasional. Di mana para pelakunya sebagian

besar adalah nelayan yang beralih profesi sebagai perompak. Karena merasa mendapat pendapatan yang lebih besar dengan cara mudah dibandingkan dengan pekerjaan nelayan. Masyarakat pesisir dan pulau – pulau yang mayoritas adalah nelayan tradisional perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah. Utamanya dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat berupa pembangunan infrastruktur. Sehingga mereka dapat turut berkembang seperti masyarakat lain pada umumnya. Dengan adanya peningkatan kesejahteraan terhadap masyarakat, diharapkan mereka dapat mencari penghasilan dengan tenang tanpa harus terdoda untuk melakukan aksi – aksi kekerasan yang dilakukan lewat laut seperti perompakan dan pembajakan kapal. Selain upaya peningkatan kesejahteraan, harus pula dibarengi dengan upaya peningkatan pendidikan masyarakat pesisir. Sehingga dengan bekal ilmu yang diberikan, mereka dapat terbentuk MDA yang dapat berfungsi sebagai sumber informasi intelijen dan benteng pertahanan terluar yang turut menjaga wilayah – wilayah perbatasan. Sosialisasi yang terus menerus dilakukan dan berlanjut terhadap masyarakat, seperti program pembinaan desa pesisir yang telah dilakukan oleh TNI AL diharapkan dapat memberikan kesadaran maritim bagi masyarakat pesisir dapat tercapai. Sehingga dapat ikut berperan aktif dalam menjaga wilayah kedaulatan NKRI. Upaya – upaya yang telah dilakukan oleh TNI AL berupa program pembinaan desa pesisir perlu mendapat dukungan dari semua *stakeholder*. Sehingga diharapkan kegiatan tersebut dapat lebih berkembang untuk menumbuhkan kesadaran bela negara bagi masyarakat pesisir. Apabila hal ini dilakukan secara bersama – sama oleh seluruh *stakeholder* maritim, sudah barang tentu akan mendapatkan hasil yang optimal. Masyarakat pesisir akan mendapatkan hasilnya dalam bentuk adanya peningkatan kesejahteraan dan pendidikan. Pengamanan Obvitnas Pelabuhan Teluk Bayur dan wilayah sekitarnya di pantai Selatan Sumatera Barat harus dilakukan secara sinergi dengan mengoptimalkan sarana dan prasarana yang telah ada melibatkan

secara langsung masyarakat dan instansi terkait melalui kerja sama – kerja sama. Pelaksanaan pembangunan oleh pemerintah daerah dapat dilakukan dengan melibatkan sektor swasta, pemerhati lingkungan, para tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat sehingga dapat berjalan secara terpadu. Pemberdayaan masyarakat kawasan pantai di sekitar Obvitnas Pelabuhan Teluk Bayur diharapkan dapat berkontribusi dalam upaya penegakan kedaulatan dan penegakan keamanan dapat terlaksana seperti apa yang diharapkan, yaitu laut yang terbebas dari segala bentuk ancaman dan gangguan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa faktor lingkungan masyarakat setempat menjadi faktor yang menguntungkan bagi Lantamal II Padang dalam melaksanakan kegiatan pengamanan Obvitnas Pelabuhan Teluk Bayur di wilayah kerjanya. Selama ini kegiatan tersebut telah mendapatkan dukungan dari seluruh *stakeholder* yang ada, seperti instansi TNI/Polri, Pemda, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat nelayan setempat. Hal ini terbukti dari data pelanggaran ancaman gangguan keamanan yang terjadi masih sangat kecil, namun hal ini bukan menjadi antisipasi pengamanan menjadi lemah.

c. Faktor Kebudayaan

Nilai – nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga dianggap perlu untuk dianut dan apa yang dianggap buruk sehingga patut untuk dihindari. Kedua hal tersebut, merupakan pasangan nilai – nilai yang mencerminkan keadaan ekstrem yang harus diserasikan. Akar permasalahan yang paling krusial dalam perkembangan stabilitas keamanan suatu kawasan berasal dari ketidakpuasan masyarakat setempat terhadap pemerataan kesejahteraan hasil pembangunan yang dirasakan. Di mana hal ini akan sangat mudah untuk melakukan ajakan – ajakan untuk turut serta dan berpihak pada paham – paham radikal yang pada akhirnya akan melahirkan aksi – aksi kriminal yang sulit dibendung. Hal ini akan sangat kompleks apabila kondisi kualitas pendidikan masyarakat sangat rendah

dan menjadikannya rentan terhadap keterpengaruhannya paham – paham yang radikal. Pemerataan kesejahteraan penduduk dapat terlihat dari kualitas pemerataan sarana publik dan infrastruktur yang tersedia. Sedangkan kualitas pendidikan dapat berdampak pada kualitas dan kesempatan kerja yang dimiliki masyarakat tersebut. Nilai – nilai kebudayaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana masyarakat dan lingkungan serta seluruh *stakeholder* dapat secara bersama – sama menumbuhkan MDA. Nilai – nilai kebudayaan ini sejalan dengan visi misi pemerintah untuk dapat mewujudkan Poros Maritim Dunia di wilayah NKRI. Pembangunan MDA akan mampu meningkatkan kepedulian seluruh instrumen negara dalam berbagai sektor terhadap lingkungan maritim. Melalui kepedulian tersebut diharapkan akan ikut meningkatkan stabilitas keamanan maritim. Selama ini masyarakat maritim di sekitar wilayah perairan Selatan Sumatera Barat sangat peduli terhadap keamanan di lingkungannya masing – masing. Budaya lapor dan peduli terhadap lingkungan yang dilakukan oleh masyarakat maritim apabila menemukan hal – hal yang bertentangan dengan hukum sangatlah membantu aparat keamanan. Termasuk Lantamal II Padang dalam melaksanakan pengamanan Obvitnas Pelabuhan Teluk Bayur dan sekitarnya di wilayah perairan Selatan Sumatera Barat.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut di atas, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

- a. Kondisi nyata (*existing condition*) strategi Lantamal II Padang dalam pengamanan Obvitnas Pelabuhan Teluk Bayur dan wilayah sekitarnya di perairan Selatan Sumatera barat secara umum masih belum optimal. Hal ini dilihat dari keempat elemen strategi yang dimiliki oleh Lantamal II Padang saat ini adalah sebagai berikut : Strategi intelijen dalam melaksanakan deteksi, penginderaan, dan pengamatan terhadap aspek maritim maupun Obvitnas masih sangat terbatas, disebabkan kurangnya sarana peralatan pendukung kerja intelijen seperti belum memiliki radar dan personel pengawak organisasi yang kurang dan belum sesuai DSP. Strategi pertahanan yang merupakan gabungan dari profesionalitas prajurit dan kesiapan Alutsista untuk melaksanakan kegiatan penegakan kedaulatan dalam rangka menjaga keutuhan wilayah NKRI belum terlaksana secara maksimal, disebabkan minimnya unsur – unsur patroli yang ada dihadapkan dengan luasnya wilayah kerja. Strategi pengamanan karena minimnya unsur yang ada tidak sesuai dengan luas wilayah kerja sehingga hanya mampu untuk melaksanakan patroli keamanan laut secara terbatas, demikian pula dengan kondisi sarana patroli yang dimiliki usia pakainya rata – rata sudah cukup tua, sehingga kemampuan fisik sarana patroli tersebut sangat rentan dihadapkan dengan kondisi gelombang dan cuaca buruk. Strategi dukungan Lantamal II Padang dalam mendukung operasi masih kurang memadai, disebabkan adanya beberapa keterbatasan yaitu tidak memiliki Faslabuh untuk unsur besar (panjang + 75 m), tidak memiliki Fasharkan, Fasbek yang masih kurang memadai, dan Faswatpers yang cukup lengkap.
- b. Faktor – faktor yang mempengaruhi strategi Lantamal II Padang dalam

pengamanan Obvitnas di wilayah perairan Selatan Sumatera Barat terdiri atas faktor penghambat dan faktor pendukung. Faktor penghambat yaitu : Secara kuantitas jumlah personel yang ada belum mencapai DSP sehingga banyak yang tidak memiliki tanggung jawab sesuai porsi jabatannya. Kualitas personel Lantamal II Padang secara umum belum mampu melaksanakan kegiatan pengamanan Obvitnas Pelabuhan Teluk Bayur. Kuantitas dan kualitas sarana patroli yang ada di lantamal II Padang belum mampu untuk menghadapi ancaman faktual dan potensial dihadapkan luasnya wilayah kerja. Keterbatasan anggaran pengamanan hanya bisa untuk melaksanakan pengamanan Obvitnas secara terbatas di Pelabuhan Teluk Bayur. Faktor pendukung yaitu : Sudah adanya payung hukum yang mengatur TNI AL (Lantamal II Padang) untuk melaksanakan pengamanan Obvitnas Pelabuhan Teluk Bayur dan wilayah sekitarnya di perairan Selatan Sumatera Barat. Adanya dukungan dari seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam menjaga stabilitas keamanan di sekitar Obvitnas Pelabuhan Teluk Bayur, terdiri dari TNI/Polri, Pemda, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat nelayan di sekitar lokasi Obvitnas. Adanya budaya positif dari lingkungan berupa kesadaran MDA dalam Menjaga lingkungan maritim di sekitarnya, sehingga turut dalam menciptakan stabilitas keamanan di perairan sekitar Obvitnas Pelabuhan Teluk Bayur.

## **5.2. Rekomendasi**

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka dapat kami rekomendasikan sebagai berikut :

- a. Perlunya penelitian lanjutan dengan sudut pandang yang berbeda dalam melakukan analisa terhadap strategi Lantamal II Padang dalam pengamanan Obvitnas Pelabuhan Teluk Bayur dan wilayah sekitarnya di perairan Selatan Sumatera Barat, seperti aspek perencanaan dan administrasi, karena dalam penelitian ini hanya terbatas pada pengukuran empat aspek strategi Lantamal II Padang, yaitu strategi

intelijen, strategi pertahanan, strategi pengamanan, dan strategi dukungan. Penelitian lanjutan tersebut juga perlu untuk mempertimbangkan faktor – faktor lainnya di luar faktor penghambat dan faktor pendukung yang telah dibahas dalam penelitian ini yang hanya mengupas payung hukum, aparat penegak hukum, sarana prasarana, masyarakat, kebudayaan, dan anggaran.

- b. Lantamal II Padang perlu memperbaiki implementasi strategi TNI AL di bidang intelijen, pertahanan, keamanan, dan dukungan dalam melaksanakan tugasnya.
- c. Markas Besar TNI AL perlu melakukan rekrutmen, pendidikan, latihan, penugasan, modernisasi Alutsista, penelitian, dan pengembangan untuk meningkatkan kuantitas, kualitas, pengetahuan, dan kompetensi personelnnya agar kemudian bisa ditempatkan ke Lantamal – Lantamal termasuk Lantamal II Padang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alcaraz, Cristina dan Sherali Zeadally. 2015. *Critical Infrastructure Protection: Requirements and Challenges for the 21st Century*. International Journal of Critical Infrastructure Protection. Volume 8, Januari 2015. Halaman 53 – 56.
- Aliy. 2016. *Disnav Teluk Bayur Optimalkan Sarana dan Prasarana Untuk Tingkatkan Kinerja*. Beritatrans. (Online). [beritatrans.com/2016/09/04/disnav-teluk-bayur-optimalkan-sarana-dan-prasarana-untuk-tingkatkan-kinerja/](http://beritatrans.com/2016/09/04/disnav-teluk-bayur-optimalkan-sarana-dan-prasarana-untuk-tingkatkan-kinerja/) Diakses pada Tanggal 13 Juni 2018 Pukul 16.30 WIB.
- Anggoro, Kusnanto dan Anak Agung Banyu Perwita. 2006. *Rekam Jejak SSR Indonesia 2000 – 2005*. Pro Patria Institute. Jakarta. Halaman 109.
- Arikunto, S. 2005. *Manajemen Penelitian*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- ASEAN. 2002. *Plan Of Action To Combat Transnational Crimes*.
- Bynkershoek, Cornelis Van. 1703. *De Dominio Maris Desertatio*.
- Bogdan, R. dan S. J. Taylor. 1975. *Introduction To Qualitative Research Methods*. New York : Wiley Interscience.
- Booth, Kent. 1977. *Navies And Foreign Policy*. New York : Crane, Russak & Company Inc.
- Collins, John M. 2002. “*Nuclear Warfare Strategies*”, dalam *Military Strategy : Principles, Practices and Historical Perspectives*. Washington, D. C. : Potomac Books.
- Creswell, John W.. 2011. *Educational Research Planning, Conducting, And Evaluating Quantitative And Qualitative Research : 4th Edition*. Boston : Pearson. Halaman 80 – 82.
- Dajan, Anto. 1986. *Pengantar Metode Statistik II*. Penerbit LP3ES : Jakarta. Halaman : 21.
- Darwanto. 2017. *Pangarmatim : Lantamal Adalah Komponen Kekuatan Sistem Senjata Armada Terpadu*. Wartasas.com (Online). <http://wartasas.com/nkri/pangarmatim-lantamal-adalah-komponen-kekuatan-sistem-senjata-armada-terpadu/> Diakses pada Tanggal 14 Juli 2018 Pukul 21.00 WIB.
- Denzin dan Lincoln. 2005. *The Sage Handbook Of Qualitative Research*. Thousand Oaks. California : Sage.

- Douglas D., Gary Cutter, & , Christopher Bever. 2015. *The VHA Multiple Sclerosis Surveillance Registry (MSSR) and it's Similarities with Other Contemporary MS Cohorts*. The Journal of Rehabilitation Research and Development. 52. 263-272. 10.1682/JRRD.2014.07.0172.
- Eccles, Henry E.. 1959. *Logistic In The National Defence*. Harrisburg Pennsylvania : The Stackpole Company.
- Gill, Chris. 2017. *Military Strategy VS Business Strategy*.
- Hamman, George. 2002. *Maritime Strategy In Asia*.
- Handoko, T. Hani. 1995. *Manajemen*. BPFE : Yogyakarta.
- H. Liota, P.. 2002. *Boomerang Effect : The Convergence Of National And Human Security*. Security Dialogue. Volume : 33. No. 4.
- International Maritime Organization Profile. (Online). <https://business.un.org/en/entities/13> diakses pada tanggal 14 Juli 2018 pukul 14.00 WIB.
- IPC. 2018. *Branches*. (Online). <http://www.indonesiaport.co.id/read/tanjungpriok.html> Diakses pada Tanggal 14 Juli 2018 Pukul 15.00 WIB.
- IPC. 2018. *Teluk Bayur*. (Online). [www.indonesiaport.co.id/read/telukbayur.html](http://www.indonesiaport.co.id/read/telukbayur.html) Diakses pada Tanggal 12 Juni 2018 Pukul 15.00 WIB.
- J. Supranto M. A. 2000. *Statistik Teori dan Aplikasi Jilid 1, Edisi Keenam*. Erlangga : Jakarta. Halaman 21.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Halaman 182.
- Kent, Sherman. 1953. *Strategic Intelligence For American World Policy*. New Jersey : Princeton University Press. Halaman 72.
- Keputusan Kasal No Kep/1808/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013. Tentang Buku Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Operasi Pengamanan Obvitnas oleh TNI AL (PUM-5.115)
- Keputusan Kepala Polri No Polri : Skep/738/X/2005 tentang Pedoman Sistem Pengamanan Obvitnas.
- Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 3407 Tahun 2012 Tentang Penetapan Obyek Vital Nasional Di Sektor Energi Dan Sumber Daya Mineral.
- Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 pasal 1 tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional Indonesia.

- Koentjaningrat. 1993. *Metode – Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta : PT. Gramedia. Halaman 89.
- Kusuma, S. T.. 1987. *Psiko Diagnostik*. Yogyakarta : SGPLB Negeri Yogyakarta. Halaman 25.
- Lantamal II Padang. 2018. *Profil*. (Online). [lantamal2.koarmabar.tnial.mil.id](http://lantamal2.koarmabar.tnial.mil.id) Diakses pada Tanggal 9 Oktober 2018 Pukul 13.30 WIB.
- Madani, Mohamad Amin dan Sapto Andika Candra. 2017. *CPO 3 Ribu Ton Tumpah Ke Laut, Teluk Bayur Tercemar*. Republika. (Online). [https://m-republika-co-id.cdn.ampproject.org/v/s/m.republika.co.id/amp\\_version/owzhwm283?amp\\_js\\_v=a1&amp\\_gsa=1&usqp=mq331AQCCA=#amp\\_tf=from%20%251%24s](https://m-republika-co-id.cdn.ampproject.org/v/s/m.republika.co.id/amp_version/owzhwm283?amp_js_v=a1&amp_gsa=1&usqp=mq331AQCCA=#amp_tf=from%20%251%24s) Diakses pada Tanggal 13 Juni 2018 Pukul 17.30 WIB.
- Mahan, A. T.. 1987. *The Influence Of Sea Power Upon History 1660 – 1783*. New York : Dover Publications, Inc.
- Manunta, Giovanni. 1997. *Towards A Security Science Through A Specific Theory And Methodology*. University Of Leicester. England. Halaman 169.
- Markas Besar TNI AL. 2001. *Doktrin TNI AL “Eka Sasana Jaya” (Keputusan Kasal No Kep/07/III/2001)*. Jakarta. Halaman 69 – 75.
- Markas Besar TNI AL. 2002. *Pokok – Pokok Pikiran TNI Angkatan Laut Tentang Keamanan Laut*. Jakarta. Halaman 15 – 16.
- Markas Besar TNI AL. 2009. *Gelar Kekuatan Di Wilayah Perbatasan Laut Dalam Mempertahankan Kedaulatan NKRI*. Jakarta. Halaman 10.
- Marsetio. 2013. *Membangun Maritime Domain Awareness Guna Mendukung Keamanan Maritim Dalam Perspektif TNI AL*.
- Mashud, Musta'in. *Teknik Komunikasi Personal*, dalam Suyanto, Bagong, dan Sutinah. 2011. *Metode Penelitian Sosial : Berbagai Alternatif Pendekatan – Edisi Revisi*. Halaman 69.
- Merdisyam. 2006. *Sistem Pengamanan Reaktor Nuklir Serba Guna GA Siwabessy Di Kawasan Puspiptek Serpong*. Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian. Program Pasca Sarjana. Universitas Indonesia. Jakarta.
- Midhio, I Wayan. 2018. *Kepemimpinan Strategis*. Universitas Pertahanan : Bogor.
- Moleong, Lexy J.. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya. Halaman 6.

- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. 2012. *Metodologi Penelitian*. Halaman 116.
- Pelindo I. 2018. *Wilayah Kerja*. (Online). <https://www.pelindo1.co.id/id/profil/Pages/Wilayah-Kerja.aspx> Diakses pada Tanggal 14 Juli 2018 Pukul 14.30 WIB.
- Pelindo III. 2018. *Cabang Perusahaan*. (Online). <https://www.pelindo.co.id/profil-perusahaan/cabang-anak-perusahaan/cabang-perusahaan> Diakses pada Tanggal 14 Juli 2018 Pukul 15.30 WIB.
- Pelindo IV. 2018. Peta Wilayah Operasi PT. Pelindo IV (Persero). (Online). <http://www.inaport4.co.id/pelabuhan> Diakses pada Tanggal 14 Juli 2018 Pukul 16.00.
- Platt, Washington. 1957. *Strategic Intelligence Production : Basic Principles*. New York : F. A. Praeger. Halaman 302.
- Pusat Pendidikan Intelijen Maritim Komando Pengembangan Dan Pendidikan AL. 2007. *Pengamanan Materil*. Surabaya.
- Rukman, Dede. 2016. *Kemampuan Lanal Cirebon Dalam Pengamanan Obvitnas Di Wilayah Perairan Utara Jawa Barat*. Bogor : Universitas Pertahanan.
- Sapri, Juliadi. 2014. *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Aset Tetap (Barang Miliki Daerah) Pada Kantor Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singigi*. Universitas Islam Negeri Riau Sultan Syarif Kasim Riau.
- Saswinadi, Sasmojo. 2004. *Sains, Teknologi, Masyarakat Dan Pembangunan*. Program Pascasarjana. Studi Pembangunan Institut Teknologi Bandung. Bandung. Halaman 7.
- Satuan Operasi Lantamal II Padang, 2018.
- Satuan Patroli Lantamal II Padang, 2018. *Data Teknis Unsur Jajaran Lantamal II*.
- Satuan Patroli Lantamal II Padang, 2018. *Dislokasi Posall/Posmat Jajaran Lantamal II*.
- Soebijanto, S.. 2006. *Doktrin TNI Angkatan Laut, Eka Sasana Jaya*. Mabelsal. Halaman 47 – 48.
- Soekanto, Soerjono dan Purnadi Purbacaraka. 1979. *Perundang – Undangan dan Yurisprudensi*. Bandung.

- Soekanto, Soerjono. 1983. *Penegakan Hukum*. Jakarta : Rajagrafindo Persada.
- Stake, R. E. 1995. *The Art of Case Study Research*. Thousand Oaks. CA : Sage.
- Suatmaji, Dri. 2014. *Kemampuan Lantamal Sebagai Pangkalan Awal Dalam Mendukung Penanggulangan Bencana (Studi Lantamal III Jakarta)*. Jakarta : Universitas Pertahanan.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D)*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Sulaeman, Agus. 2017. *Jaga Fisik Prajurit, Danlantamal II Pimpin Long March*. Channel Indonesia. (Online). <https://channel-indonesia.com/2017/12/27/jaga-fisik-prajurit-danlantamal-ii-pimpin-long-march/> Diakses pada Tanggal 17 Juni 2018 Pukul 11.30 WIB.
- Sulistyo dan Basuki. 2006. *Metode Penelitian*. Jakarta : Wedatama Widya Sastra. Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Halaman 173.
- Sunardi, R. M.. 1997. *Teori Keamanan Nasional*. Jakarta : Himpunan Alumni Ketahanan Nasional.
- Supandi, Ade. 2016. *TNI AL Akan Uji Coba Senjata Baru Di Armada Jaya 2016*. Kompas.com (Online). <https://nasional.kompas.com/read/2016/08/19/16443611/tni.al.akan.uji.coba.senjata.baru.di.armada.jaya.2016> Diakses pada Tanggal 14 Juli 2018 Pukul 20.30 WIB.
- Supriyatno, Imam. 2014. *Peran Lanal Dalam Pengamanan Obvitnas Di Kawasan Selatan Pulau Jawa (Studi Wilayah Kerja Lanal Cilacap)*. Jakarta : Universitas Pertahanan.
- Sutopo, Ariesto Hadi dan Adrianus Arief. 2010. *Terampil Mengolah Data Kualitatif Dengan NVIVO*. Penerbit Prenada Media Group : Jakarta.
- Tarmo. 2008. *Analisis Pengaruh Motivasi Dan Kedisiplinan Terhadap Kinerja Prajurit TNI AL Di Lanal Dumai*. Jakarta : Universitas Terbuka.
- Till, Geoffrey. 2009. *Seapower : A Guide for 21st Century Second Edition*. London : Routledge Publishing. Halaman 24.
- Triatmodjo, Bambang. 2009. *Perencanaan Pelabuhan*. Yogyakarta : Beta Offset.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.

US Military. 2009. *The Department Of Defense Dictionary Of Military And Associated Terms*. Joint Publication. 1 – 20. Halaman 386.

Walhi Sumbar, 2017. dalam Okezone.com (Online). <https://news.okezone.com/read/2017/10/02/340/1787257/perairan-teluk-bayur-tercemar-50-ton-minyak-sawit-pemerintah-diminta-hukum-pt-wira> Diakses pada Tanggal 18 Juli 2018 Pukul 20.30 WIB.

Willard, James E.. 2006. *Military Diplomacy : An Essential Tool Of Foreign Policy At The Theater Strategic Level*. School Of Advance Military Studies. US Army Command And General Staff College. Fort Leavenworth. Kansas.

## **LAMPIRAN 1 PEDOMAN OBSERVASI**

**Peneliti : Prima Tegar Anugrah  
120170302012  
Program Studi Keamanan Maritim  
Fakultas Keamanan Nasional**

Dalam pengamatan (observasi) yang dilakukan adalah mengamati Strategi Lantamal II Padang dalam Mengamankan Obvitnas di Wilayah Perairan Selatan Sumatera Barat, Studi Kasus Pelabuhan Teluk Bayur, meliputi :

A. Tujuan :

Untuk memperoleh informasi dan data baik mengenai kondisi fisik maupun non fisik pelaksanaan tugas pengamanan Obvitnas Pelabuhan Teluk Bayur oleh Lantamal II Padang.

B. Aspek yang diamati :

1. Sejarah berdirinya Lantamal II Padang
2. Letak geografis Lantamal II Padang
3. Visi dan misi Lantamal II Padang
4. Tugas pokok Lantamal II Padang
5. Keadaan personel Lantamal II Padang
6. Keadaan sarana dan prasarana Lantamal II Padang

## **LAMPIRAN 2 PANDUAN WAWANCARA**

**Narasumber : Agus Sulaeman**

**Wawancara tanggal 18 September 2018 di Lantamal II Padang**

1. Apa tugas pokok Lantamal II Padang?
2. Dari perkembangan lingkungan strategis saat ini, ditinjau dari nilai ancaman atau kerawanan apa yang mungkin terjadi di wilayah kerja Lantamal II Padang?
3. Untuk mengantisipasi gangguan keamanan di laut perlu dilaksanakan suatu upaya preventif salah satunya yaitu dengan melakukan deteksi dini terhadap kemungkinan ancaman atau kerawanan yang akan terjadi. Bagaimana strategi intelijen/deteksi Lantamal II Padang dalam menyikapi hal tersebut di atas? Faktor – faktor apa yang menjadi kendala dalam melaksanakan kegiatan tersebut?
4. Bagaimana menurut pendapat bapak tentang strategi pertahanan Lantamal II Padang dilihat dari alutsista yang ada dan profesionalisme prajurit Lantamal II Padang saat ini? Serta upaya apa yang dilakukan untuk melaksanakan strategi pertahanan Lantamal II Padang?
5. Untuk menjaga perairan yang menjadi tanggung jawab/wilayah kerja Lantamal II Padang perlu adanya suatu kegiatan patroli termasuk upaya penindakannya yang dilaksanakan oleh unsur – unsur Lantamal II Padang. Bagaimana strategi patroli dan penindakan yang dilakukan oleh Lantamal II Padang? Serta faktor – faktor apa yang menjadi kendala dalam melaksanakan kegiatan tersebut?
6. Bagaimana strategi Lantamal II Padang dalam melaksanakan penyidikan terhadap kasus tindak pidana di laut?
7. Bagaimana strategi Lantamal II Padang dalam melaksanakan dukungan logistik dan administrasi?
8. Bagaimana strategi Lantamal II Padang dalam melaksanakan pembinaan potensi maritim?

9. Bagaimana strategi Lantamal II Padang dalam mengamankan obyek vital Pelabuhan Teluk Bayur? Serta kendala apa yang dihadapinya?
10. Bagaimana menurut pendapat bapak tentang organisasi Lantamal II Padang saat ini? Dihadapkan dengan situasi dan kondisi serta ditinjau dari nilai strategis, ancaman, luas wilayah kerja serta aset yang dimiliki oleh Lantamal II Padang?
11. Bagaimana menurut pendapat bapak tentang kebijakan pimpinan TNI AL saat ini terhadap evaluasi strategi Lantamal II Padang?
12. Bagaimana dukungan dari instansi pemerintahan (Pemda dan Instansi Maritim), tokoh agama dan tokoh masyarakat sekitar dalam melaksanakan tugas – tugas sebagai Lantamal, khususnya dalam pengamanan obvitnas Pelabuhan Teluk Bayur?

**Narasumber : Lasmono**

**Wawancara tanggal 13 September 2018 di Lantamal II Padang**

1. Untuk mengantisipasi gangguan keamanan di laut perlu dilaksanakan suatu upaya preventif, salah satunya yaitu dengan melakukan deteksi dini terhadap kemungkinan ancaman atau kerawanan yang akan terjadi. Bagaimana strategi intelijen/deteksi Lantamal II Padang dalam menyikapi hal tersebut di atas? Faktor – faktor apa yang menjadi kendala dalam melaksanakan kegiatan tersebut?
2. Bagaimana upaya – upaya Lantamal II Padang dalam melaksanakan pembinaan potensi maritim?
3. Dalam melaksanakan dukungan logistik dan administrasi bagi unsur – unsur TNI AL yang melaksanakan kunjungan atau bekal ulang di Lantamal II Padang, fungsi dukungan 4 R (*Rebase, Repair, Replenishment, Rest or Recreation*) bagi satuan operasi berupa penyiapan fasilitas pangkalan secara terbatas antara lain fasilitas labuh, fasilitas perbaikan, fasilitas perbekalan, dan fasilitas perawatan personel. Bagaimana strategi Lantamal II Padang dalam melaksanakan dukungan fasilitas labuh bagi unsur – unsur TNI AL?

4. Bagaimana strategi Lantamal II Padang dalam melaksanakan dukungan perbaikan dan pemeliharaan kapal?
5. Bagaimana strategi Lantamal II Padang dalam melaksanakan dukungan perbekalan bagi unsur – unsur TNI AL?
6. Bagaimana strategi Lantamal II Padang dalam melaksanakan pembinaan perawatan personel pangkalan maupun personel dari unsur – unsur TNI AL yang melaksanakan kunjungan di Lantamal II Padang?
7. Dalam melaksanakan kegiatan pengamanan Pelabuhan Teluk Bayur sebagai obvitnas, apakah ada kualifikasi/persyaratan tertentu bagi personel yang ditugaskan?

**Narasumber : Taufik Suryo**

**Wawancara tanggal 13 September 2018 di Lantamal II Padang**

1. Dari perkembangan lingkung strategis saat ini, ancaman atau kerawanan apa yang mungkin terjadi di wilayah kerja Lantamal II Padang?
2. Untuk mengantisipasi gangguan keamanan di laut perlu dilaksanakan suatu upaya preventif, salah satunya yaitu dengan melakukan deteksi dini terhadap kemungkinan ancaman atau kerawanan yang akan terjadi. Bagaimana strategi intelijen/deteksi Lantamal II Padang dalam menyikapi hal tersebut di atas? Serta faktor apa yang menjadi kendala dalam melaksanakan kegiatan tersebut?
3. Bagaimana strategi Lantamal II Padang dalam melaksanakan dukungan fasilitas labuh bagi unsur – unsur TNI AL?
4. Dalam melaksanakan kegiatan pengamanan obvitnas Pelabuhan Teluk Bayur, apakah ada kualifikasi tertentu bagi personel yang ditugaskan untuk melaksanakan pengamanan obyek vital tersebut?

**Narasumber : Cahya Indra**

**Wawancara tanggal 13 September 2018 di Lantamal II Padang**

1. Dari perkembangan lingkungan strategis saat ini, ancaman atau kerawanan apa yang mungkin terjadi di wilayah kerja Lantamal II Padang?
2. Bagaimana menurut pendapat bapak tentang strategi pertahanan Lantamal II Padang dilihat dari alutsista yang ada dan profesionalisme prajurit Lantamal II Padang saat ini? Serta upaya apa yang dilakukan untuk melaksanakan strategi pertahanan Lantamal II Padang?
3. Untuk menjaga perairan yang menjadi tanggung jawab/wilayah kerja Lantamal II Padang perlu adanya suatu kegiatan patroli, termasuk upaya penindakannya yang dilaksanakan oleh unsur – unsur Lantamal II Padang. Bagaimana strategi patroli dan penindakan yang dilakukan oleh Lantamal II Padang? Serta faktor apa yang menjadi kendala dalam melaksanakan kegiatan tersebut?
4. Bagaimana strategi Lantamal II Padang dalam melaksanakan penyidikan terhadap kasus tindak pidana di laut?
5. Dalam melaksanakan dukungan logistik dan administrasi bagi unsur – unsur TNI AL yang melaksanakan kunjungan atau bekal ulang di Lantamal II Padang, fungsi dukungan 4 R (*Rebase, Repair, Replenishment, Rest or Recreation*) bagi satuan operasional atau unsur KRI. Bagaimana strategi Lantamal II Padang dalam melaksanakan dukungan fasilitas labuh bagi kapal – kapal yang melaksanakan singgah di Lantamal II Padang?
6. Bagaimana strategi Lantamal II Padang dalam mengamankan obyek vital Pelabuhan Teluk Bayur? Serta kendala apa yang dihadapinya?
7. Dalam konteks organisasi Lantamal II Padang merupakan Lantamal yang berada di bawah jajaran Komando Armada 1. Bagaimana menurut bapak tentang organisasi Lantamal II Padang saat ini? Dihadapkan dengan situasi dan kondisi serta ditinjau dari nilai strategis, ancaman, luas wilayah kerja serta aset yang dimiliki oleh Lantamal II Padang?

8. Bagaimana dukungan dari instansi pemerintah (Pemda dan Instansi Maritim), tokoh agama da tokoh masyarakat sekitar dalam melaksanakan tugas – tugas sebagai Lantamal khususnya dalam pengamanan obvitnas Pelabuhan Teluk Bayur?

**Narasumber : Budi Susilo**

**Wawancara tanggal 17 September 2018 di Lantamal II Padang**

1. Dalam melaksanakan dukungan logistik dan administrasi bagi unsur – unsur TNI AL yang melaksanakan kunjungan atau bekal ulang di Lantamal II Padang, fungsi dukungan 4 R (*Rebase, Repair, Replenishment, Rest or Recreation*) bagi satuan operasi berupa penyiapan fasilitas pangkalan secara terbatas antara lain fasilitas labuh, fasilitas perbaikan, fasilitas perbekalan, dan fasilitas perawatan personel. Bagaimana strategi Lantamal II Padang dalam melaksanakan dukungan fasilitas labuh bagi unsur – unsur TNI AL?
2. Bagaimana strategi Lantamal II Padang dalam melaksanakan dukungan perbaikan dan pemeliharaan kapal?
3. Bagaimana strategi Lantamal II Padang dalam melaksanakan dukungan perbekalan bagi unsur – unsur TNI AL?
4. Dengan terbatasnya anggaran pertahanan dari pemerintah, menurut bapak bagaimana dukungan logistik operasi terutama bahan bakar untuk kebutuhan KRI dan KAL dalam melaksanakan patroli rutin di wilayah kerja Lantamal II Padang apakah dapat tecukupi?

**Narasumber : Arwani**

**Wawancara tanggal 13 September 2018 di Lantamal II Padang**

1. Secara organisasi berapa seharusnya jumlah Daftar Susunan Personel (DSP) Lantamal II Padang? Serta bagaimana kondisinya saat ini apakah sudah sesuai dengan DSP?

2. Dalam melaksanakan kegiatan pengamanan obvitnas Pelabuhan Teluk Bayur berapa jumlah personel yang terlibat secara langsung? Dan apakah ada kualifikasi tertentu bagi personel yang ditugaskan untuk melaksanakan pengamanan obyek vital tersebut?
3. Bagaimana organisasi yang dibentuk dalam pengamanan obyek vital Pelabuhan Teluk Bayur?

**Narasumber : Sumarto**

**Wawancara tanggal 13 September 2018 di Lantamal II Padang**

1. Apa tugas pokok Asisten Potensi Maritim Lantamal II Padang?
2. Pembinaan potensi maritim menjadi kekuatan pertahanan dan keamanan negara di laut merupakan salah satu tugas pokok pangkalan, bagaimana menurut pendapat bapak tentang pembinaan potensi maritim yang ada di Lantamal II Padang?
3. Wilayah/daerah mana saja yang dijadikan tempat binaan Lantamal II Padang dalam melaksanakan kegiatan pembinaan potensi maritim?
4. Bagaimana kegiatan pembinaan potensi maritim yang dilaksanakan oleh Lantamal II Padang?
5. Apa kendala yang dihadapi oleh Lantamal II Padang dalam melaksanakan pembinaan potensi maritim?

**Narasumber : Pradipta Asky**

**Wawancara tanggal 19 September 2018 di KRI Cakalang**

1. Apa tugas pokok serta fungsi dari KRI Cakalang?
2. Berapa jumlah personel pengawak KRI Cakalang? Dan apakah sudah sesuai dengan DSP?
3. Bagaimana menurut pendapat bapak tentang kondisi fasilitas labuh yang selama ini sering digunakan oleh Lantamal II Padang baik dalam mendukung unsur – unsur satuan operasi/KRI yang singgah di Padang maupun untuk mendukung kebutuhan dari unsur – unsur Lantamal II Padang sendiri?

4. Bagaimana kondisi/kemampuan KRI Cakalang saat ini dalam melaksanakan kegiatan patroli rutin atau pengamanan wilayah perairan di sekitar obvitnas Pelabuhan Teluk Bayur yang menjadi tugas dan tanggung jawab dari Lantamal II Padang?
5. Dengan terbatasnya anggaran pertahanan dari pemerintah, menurut pendapat bapak bagaimana dukungan logistik operasi terutama bahan bakar untuk kebutuhan KRI dalam melaksanakan patroli rutin di wilayah kerja Lantamal II Padang apakah dapat tercukupi?

**Narasumber : Lutfi**

**Wawancara tanggal 19 September 2018 di KRI Kala Hitam**

1. Apa tugas pokok serta fungsi dari KRI Kala Hitam?
2. Berapa jumlah personel pengawak KRI Kala Hitam? Dan apakah sudah sesuai dengan DSP?
3. Bagaimana menurut pendapat bapak tentang kondisi fasilitas labuh yang selama ini sering digunakan oleh Lantamal II Padang baik dalam mendukung unsur – unsur satuan operasi/KRI yang singgah di Padang maupun untuk mendukung kebutuhan dari unsur – unsur Lantamal II Padang sendiri?
4. Bagaimana kondisi/kemampuan KRI Kala Hitam saat ini dalam melaksanakan kegiatan patroli rutin atau pengamanan wilayah perairan di sekitar obvitnas Pelabuhan Teluk Bayur yang menjadi tugas dan tanggung jawab dari Lantamal II Padang?
5. Dengan terbatasnya anggaran pertahanan dari pemerintah, menurut pendapat bapak bagaimana dukungan logistik operasi terutama bahan bakar untuk kebutuhan KRI dalam melaksanakan patroli rutin di wilayah kerja Lantamal II Padang apakah dapat tercukupi?

**Narasumber : Yeri Kusmantoro****Wawancara tanggal 14 September 2018 di Satuan Patroli Lantamal II Padang**

1. Apa tugas pokok serta fungsi dari KAL Sinyaru?
2. Berapa jumlah personel pengawak KAL Sinyaru? Dan apakah sudah sesuai dengan DSP?
3. Bagaimana menurut pendapat bapak tentang kondisi fasilitas labuh yang selama ini sering digunakan oleh Lantamal II Padang baik dalam mendukung unsur – unsur satuan operasi/KAL yang singgah di Padang maupun untuk mendukung kebutuhan dari unsur – unsur Lantamal II Padang sendiri?
4. Bagaimana kondisi/kemampuan KAL Sinyaru saat ini dalam melaksanakan kegiatan patroli rutin atau pengamanan wilayah perairan di sekitar obvitnas Pelabuhan Teluk Bayur yang menjadi tugas dan tanggung jawab dari Lantamal II Padang?
5. Dengan terbatasnya anggaran pertahanan dari pemerintah, menurut pendapat bapak bagaimana dukungan logistik operasi terutama bahan bakar untuk kebutuhan KAL dalam melaksanakan patroli rutin di wilayah kerja Lantamal II Padang apakah dapat tercukupi?

**Narasumber : Santoso****Wawancara tanggal 21 September 2018 di PT. Pelindo II unit Pelabuhan Teluk Bayur**

1. Ancaman dan gangguan keamanan apa saja yang selama ini sering terjadi di Pelabuhan Teluk Bayur?
2. Upaya apa yang dilakukan oleh pihak Pelabuhan Teluk Bayur selama ini untuk meminimalisir/mengatasi adanya gangguan keamanan tersebut?
3. Faktor/kendala apa saja yang dihadapi dalam melaksanakan pengamanan Pelabuhan Teluk Bayur?

4. Apakah pernah ada ancaman/kegiatan sabotase terhadap Pelabuhan Teluk Bayur yang dilakukan oleh kelompok teroris?
5. Bagaimana modus operandi pelaku tindak kejahatan yang terjadi di Pelabuhan Teluk Bayur saat ini?
6. Bagaimana menurut pendapat bapak tentang pentingnya menjaga keamanan Pelabuhan Teluk Bayur ditinjau dari aspek strategis dan apa dampak yang akan terjadi bila operasi pelabuhan terganggu?
7. Apakah selama ini ada kerja sama dengan instansi lain terkait pengamanan Pelabuhan Teluk Bayur? Dan bagaimana dukungan yang diberikan dari pihak PT. Pelindo II kepada instansi lain khususnya TNI AL terkait dengan pengamanan Pelabuhan Teluk Bayur?
8. Bagaimana pendapat bapak tentang strategi Lantamal II Padang dalam melaksanakan pengamanan Pelabuhan Teluk Bayur dilihat dari sarana dan SDM yang ada di Lantamal II Padang?

### LAMPIRAN 3 DOKUMENTASI



Peneliti dengan Komandan Lantamal II Padang  
Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2018



Wawancara dengan Asintel Lantamal II Padang  
Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2018



KRI Cakalang sandar di Dermaga Lantamal II  
Padang di Pelabuhan Perikanan Bungus  
Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2018



KRI Kala Hitam sandar di Dermaga Pelabuhan Perikanan Bungus  
Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2018

**LAMPIRAN 4**  
**DAFTAR NARASUMBER**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Instansi</b>
1	Agus Sulaeman Laksma TNI	Komandan	Lantamal II Padang
2	Lasmono Kolonel (Mar)	Wadan	Lantamal II Padang
3	Taufik Suryo Letkol Laut (P)	Asintel	Lantamal II Padang
4	Cahaya Indra Letkol Laut (P)	Asops	Lantamal II Padang
5	Arwani Letkol Laut (KH)	Aspers	Lantamal II Padang
6	Budi Susilo Kolonel Laut (T)	Aslog	Lantamal II Padang
7	Sumarto Kolonel (Mar)	Aspotmar	Lantamal II Padang
8	Pradipta Asky Lettu Laut (P)	Palaksa KRI Cakalang	Lantamal II Padang
9	Lutfi Letda Laut (P)	Kadisnavkom KRI Kala Hitam	Lantamal II Padang
10	Yeri Kusmantoro Letda Laut (P)	Komandan KAL Sinyaru	Lantamal II Padang
11	Santoso	Bagian Hukum dan Pengendalian Internal	PT. Pelindo II Unit Pelabuhan Teluk Bayur